

ANALISA

1986-4

India - Indonesia dan Perkembangan Kawasan

Keajaiban Penampilan India

Segi-segi Ekonomi Hubungan India-Indonesia

Interaksi India-Indonesia

Hubungan Bilateral Indonesia-India

Kawasan Asia Tenggara dan Negara-negara Besar:
Praktek Ambivalensi ASEAN

Kerjasama Regional di Asia Selatan

Asia Selatan dan
Kepentingan Negara-negara Besar



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Clara JOEWONO
Kirdi DIPOYUDO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH
Medelina KUSHARWANTI
S. TJOKROWARDOJO
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Tata Usaha

Harga Rp 750,00 per eksemplar; langganan setahun (12 nomor, sudah termasuk ongkos kirim) Rp 9.000,00, untuk Mahasiswa Rp 6.750,00. Pesanan ke Biro Publikasi CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

Daftar Isi

TAHUN XV, NO. 4, APRIL 1986

Pengantar Redaksi	250
Keajaiban Penampilan India <i>Catherine GWIN dan Lawrence A. VEIT</i>	253
Segi-segi Ekonomi Hubungan India-Indonesia <i>H.M.L. BERI</i>	270
Interaksi India-Indonesia <i>K.N. RAMACHANDRAN</i>	277
Hubungan Bilateral Indonesia-India <i>Kirdi DIPOYUDO</i>	287
Kawasan Asia Tenggara dan Negara-negara Besar: Praktek Ambivalensi ASEAN <i>J. Soedjati DJIWANDONO</i>	303
Kerjasama Regional di Asia Selatan <i>K. SUBRAHMANYAM</i>	315
Asia Selatan dan Kepentingan Negara-negara Besar <i>K. SUBRAHMANYAM</i>	324

Pengantar Redaksi

Hubungan antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin dan intensitasnya selalu mengalami perubahan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya sejak pemerintahan Orde Baru, hubungan kedua negara cenderung bertambah baik. Mengamati kecenderungan ini timbul pertanyaan, apakah hal tersebut dapat berlanjut dan/atau dilanjutkan terus. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hubungan antara satu negara dengan negara lainnya sering menjadi kurang baik dan merugikan karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat masing-masing negara tentang persepsi dari negara yang menjadi mitranya. Kerugian yang terjadi karena alasan seperti ini pada dasarnya dapat diminimalisasikan kalau tidak mungkin dihilangkan. Atas dasar pemikiran seperti ini, ANALISA kali ini mengetengahkan hal-hal yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan antara Indonesia dengan India, dengan menurunkan tujuh buah tulisan.

India sering menjadi berita karena alasan kehidupan ekonomi yang tragis dari sebagian anggota masyarakatnya. Berita kesedihan tersebut ternyata sering menutupi keberhasilan yang dicapai oleh India, khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini. Catherine GWIN dan Lawrence A. VEIT dalam tulisan pertama yang berjudul "Keajaiban Penampilan India," mengemukakan bahwa dalam bidang ekonomi India telah mencapai prestasi yang cukup gemilang walaupun masalah-masalah yang dihadapi tidak sedikit. Selama sepuluh tahun terakhir ini, India mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan dan ini sebagai hasil dari kebijakan investasi dan perubahan kebijakan ekonomi. Dengan lebih mengandalkan kekuatan swasta dan memberi prioritas kepada sektor pertanian serta pembangunan prasarana dan sarana, keadaan perekonomian India jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, walaupun sampai sekarang India masih tergolong negara berpendapatan rendah.

Tulisan kedua yang berjudul "Segi-segi Ekonomi Hubungan India-Indonesia" yang ditulis oleh H.M.L. BERI, menguraikan perkembangan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan India, khususnya sejak pemerintahan Orde Baru. Dalam uraiannya, penulis mengemukakan bahwa hubungan ekonomi India dan Indonesia telah bertambah intensif dan peluang untuk memperkembangkannya masih cukup besar.

Perubahan intensitas hubungan Indonesia-India terjadi karena perbedaan dan/atau persamaan persepsi atau malah ambisi dari para pemimpin kedua negara. Tulisan ketiga dan keempat masing-masing, "Interaksi India-Indonesia" yang ditulis oleh K.N. RAMACHANDRAN dan "Hubungan Bilateral Indonesia-India" yang ditulis oleh Kirdi DIPOYUDO, menganalisa pasang-surutnya hubungan India dan Indonesia. Dari kedua tulisan ini menjadi jelas perkembangan hubungan kedua negara secara kronologis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sejak terbentuknya ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara banyak perhatian yang tercurah kepadanya, baik dari masyarakat anggota ASEAN sendiri maupun dari masyarakat atau negara lainnya dan terutama negara adidaya. J. Soedjati DJIWANDONO dalam tulisannya yang berjudul "Kawasan Asia Tenggara dan Negara-negara Besar: Praktek Ambivalensi ASEAN" menganalisa hubungan ASEAN dengan negara-negara besar. Dalam uraiannya penulis mengetengahkan bahwa kendatipun terdapat variasi dan keanekaragaman dari sudut pandangan persepsi-persepsi dan prioritas-prioritas nasional, suatu kebersamaan tertentu dapat dilihat dan diidentifikasi di antara negara-negara ASEAN dalam pandangan mereka mengenai, dan dalam hubungan mereka dengan, negara-negara besar, khususnya sejak pembentukan perhimpunan itu.

Ide kerjasama regional tampak mulai berakar di hampir seluruh wilayah. Oleh beberapa pengamat hal ini dinyatakan terutama karena didasarkan atas konsensus politik dan keamanan. Tetapi dalam tulisannya yang berjudul "Kerjasama Regional di Asia Selatan," K. SUBRAHMANYAM, mengemukakan bahwa dalam upaya untuk menciptakan kerangka kerjasama regional di Asia Selatan yang disebut Kerjasama Regional Asia Selatan (SARC) negara-negara utama tidak memiliki perspektif yang sama mengenai masalah-masalah keamanan atau politik. Bagaimana bentuk dan sejauh mana perbedaan perspektif tersebut kiranya dapat dipahami melalui tulisan ini. Selanjutnya, dalam tulisan ketujuh dan terakhir yang berjudul "Asia Selatan dan Kepentingan Negara-negara Besar," kembali K. SUBRAHMANYAM, menjelaskan kepentingan serta interaksi ketiga negara besar di kawasan Asia Selatan.

Dari seluruh tulisan yang dikemukakan dalam penerbitan kali ini diharapkan pengetahuan mengenai India bertambah luas dan perilaku negara tersebut dalam pergaulan antarnegara dapat lebih dipahami.

April 1986

REDAKSI

Keajaiban Penampilan India*

Catherine GWIN dan
Lawrence A. VEIT

India telah menjadi berita karena alasan-alasan yang tragis. Pembunuhan PM Indira Gandhi dan kecelakaan industri yang paling besar dalam sejarah, pada pabrik Union Carbide Corporation di Bhopal, pada bulan-bulan terakhir 1984 telah menarik perhatian dunia. Menyusul kedua kejadian itu, suatu kemenangan besar dalam pemilihan umum membuat Rajiv Gandhi berkuasa. Para analis meneliti masa lampau non-politiknya untuk mengetahui hari depan India.

Akan tetapi terjadi suatu perkembangan lain yang lebih mendalam tetapi biasanya diabaikan. Perekonomian India pada tahun-tahun belakangan ini telah menghimpun suatu momentum dan kini berjanji akan memperbaiki taraf hidup dalam negeri dan merubah tempat dan citra India di dunia.

Persepsi mengenai India sebagai suatu negeri yang sangat miskin sudah tidak mencerminkan kenyataan. Kemajuan ekonomi yang besar, khususnya selama 10 tahun terakhir, bukan saja mendatangkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan diversifikasi dan mengurangi kerawanan terhadap cuaca buruk dan kejutan-kejutan lain. Prospeknya kini baik bagi India untuk mencapai pertumbuhan penting yang berlanjut selama dasawarsa 1980-an dan sesudahnya. Hasil-hasil ini menunjukkan apa yang mungkin bila usaha-usaha pembangunan dalam negeri yang kuat ditunjang oleh bantuan pembangunan internasional:

Mungkin tampak lancang bagi orang asing untuk menemukan di India suatu laju pertumbuhan ekonomi yang banyak orang India ragu-ragu untuk

*Terjemahan karangan "The Indian Miracle" yang dimuat dalam *Foreign Policy*, Nomor 57, Winter 1984-1985, hal. 79-99. Diterjemahkan oleh Kirdi DIPOYUDO.

mengakuiinya. Satu sebab mengapa prestasi India itu tidak dilihat ialah bahwa masih diperlukan lebih banyak lagi usaha. Kemiskinan masih di mana-mana; sekitar 40% penduduk masih di bawah garis kemiskinan kurang dari US\$100 seperti dibatasi oleh India sendiri. Walaupun laju pertumbuhan penduduk telah menurun sejak 1950-an dan 1960-an menjadi sedikit di atas 2%, jumlah orang miskin masih meningkat. Lagipula, pendapatan per jiwa India sekitar US\$260 per tahun menempatkannya di antara ke-20 negara termiskin di dunia.

Pandangan-pandangan politik yang telah mapan juga menggelapkan pengakuan prestasi India. Di AS banyak orang rupanya menaruh prasangka terhadap suatu negeri yang dianggapnya moralis, sosialis dan dekat dengan Moskwa. Di India, kaum elite dari kalangan pemerintah, bisnis dan intelektual rupanya tidak bersedia mengakui kemajuan-kemajuan yang berasal dari pembaharuan kebijaksanaan yang kurang menguntungkan kepentingan-kepentingan tertanam mereka. Selain itu, banyak di antara orang India di luar negeri rupanya buta terhadap berita-berita baik, untuk sebagian karena mereka menentang segi-segi pemerintahan PM Indira Gandhi yang kadang-kadang sewenang-wenang.

Namun pengakuan prestasi India perlu diberikan walaupun agak lambat. Kalau orang-orang India -- dan lain-lain -- menyadari gerak maju India belakangan ini, suatu lingkaran perkembangan positif yang berlangsung selama dasawarsa terakhir bisa menjadi lebih kuat, kemungkinan-kemungkinan perkembangan lebih lanjut bisa diwujudkan, segi-segi konflik etnik yang lebih keras diredakan, dan peluang-peluang diperbanyak untuk menjalin hubungan yang lebih menguntungkan dengan Barat.

Salah satu keterangan momentum perekonomian India belakangan ini tak lain ialah bahwa investasi sebelumnya dalam prasarana, industri dasar, irigasi dan sumber daya manusia akhirnya mendatangkan hasil yang berarti. Investasi-investasi ini memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan daripada dugaan semula. Tetapi India kini mempunyai alasan untuk merasa aman dalam usahanya ke arah kemajuan -- dalam kontras dengan sementara negara lain yang masih harus menanamkan banyak modal dalam sumber-sumber daya manusia dan lembaga-lembaga.

Alasan kedua momentum sekarang ini ialah kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi India yang diperbaiki, yang dapat dilaksanakannya lebih dari suatu dasawarsa tanpa gangguan konflik militer. Dalam kedua dasawarsa pertama sesudah kemerdekaan, India menganut suatu strategi pembangunan industri yang terlalu terarah ke dalam. Untuk sementara waktu, ini menghasilkan pertumbuhan tinggi, lagipula melebarkan dan memperdalam basis industri India.

Akan tetapi waktu itu adalah juga suatu periode peraturan-peraturan dan prosedur administratif yang semakin ketat dan kompleks. Kebijakan-kebijaksanaan yang baik maksudnya ini lambat laun menahan inisiatif, menekan investasi swasta, dan mempolitikkan keputusan-keputusan ekonomi yang lebih baik dibuat oleh kekuatan-kekuatan pasar.¹ Secara berangsur-angsur kebijakan-kebijaksanaan itu menimbulkan pasaran gelap dan struktur ekonomi pekerjaan dan produksi yang tidak termasuk statistik dan sistem perpajakan India -- apa yang disebut ekonomi paralel atau ekonomi bawah tanah.

Kemudian terjadi kelaparan Bihar tahun 1966-1967, krisis devisa yang dibarengi devaluasi India tahun 1966, dan kekurangan pangan tahun 1971-1972. Pemerintah meninjau kembali kebijakan-kebijaksanaan ekonominya, dengan memberikan prioritas yang lebih besar kepada pertanian, meningkatkan pengendalian sektor swasta, mengendorong prosedur pemberian lisensi yang mempengaruhi penanaman modal dan impor, dan membiarkan partisipasi asing yang lebih besar dalam ekonomi, termasuk sektor minyak. Pemerintah masih menguasai puncak-puncak ekonomi yang menentukan seperti terungkap dalam nasionalisasi bank tahun 1969. Tetapi perubahan-perubahan itu berakbar. Sementara "revolusi hijau" -- yang berdasarkan peningkatan penggunaan irigasi, bibit unggul, pupuk buatan dan pestisida (obat pembasmi hama) -- berjalan lancar, India bergerak dengan cepat menuju swa-sembada pangan. Ekspor meluas dan cadangan valuta asing bertambah. Faktor-faktor ini, khususnya pengendoran kendali impor, mempermudah liberalisasi ekonomi. Kemudian, pada tahun 1977, pemerintah Janata merebut kekuasaan atas parlemen dari Ny. Gandhi. Pemimpin-pemimpin baru itu mulai sungguh-sungguh menggunakan kekuasaan politik pemerintah untuk membebaskan impor dan mengisi kekurangan-kekurangan dalam negeri dalam bahan-bahan pokok seperti baja, semen, dan minyak konsumsi. Kemudian, pada tahun 1979, ketika neraca pembayaran India diperlemah oleh harga minyak yang telah tinggi, pemerintah mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menggalakkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pada bulan April 1980, ketika cadangan valuta asing menurun, pemerintah baru Ny. Gandhi mengumumkan akan meningkatkan dan bukannya mencabut tindakan-tindakan liberalisasi impor yang diambil oleh pendahulunya. Kebijakan-kebijaksanaan industri yang diumumkannya pada bulan Juli 1980 mengendorong pembatasan-pembatasan atas perusahaan-perusahaan swasta dan meningkatkan proses penyusunan kembali industri-industri milik negara yang tidak untung. Harga-harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk komoditi-komoditi pokok seperti semen, minyak dan pupuk buatan dinaikkan secara

¹Lihat Lawrence A. Veit, *India's Second Revolution: The Dimensions of Development* (New York: McGraw-Hill Book Co., 1976).

berkala dan sampai batas-batas tertentu dibebaskan. Menjelang akhir 1980, satuan-satuan produksi yang mengekspor 100% produknya dibebaskan dari bea masuk. Pembatasan atas perluasan kapasitas dikendorkan, khususnya bila produk barunya diekspor, dan suatu bank ekspor-impor didirikan. Selanjutnya, pemerintah mengundang perusahaan-perusahaan minyak asing untuk ikut dalam suatu program memperluas eksplorasi dan pengembangan minyak dalam negeri dan menggarisbawahi minatnya atas investasi asing langsung dengan membebaskan kendali-kendali birokratis. Akhirnya, India memasuki pasaran modal internasional swasta untuk mendapatkan pinjaman untuk beberapa proyek besar dan mulai perundingan-perundingan dengan IMF untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih besar guna mendukung usaha-usaha memperbaiki kedudukan pembayaran luar negeri melalui pembaharuan kebijaksanaan yang substansial.

Pada tahun-tahun sebelumnya, New Delhi menanggapi kesulitan-kesulitan pembayaran luar negeri dengan mengurangi impor -- dan secara tak sengaja mengganggu proses pembangunan. Tetapi sejak 1980 pemerintah memilih untuk tidak mundur melainkan menyesuaikan diri dengan memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya, menggalakkan investasi dan mempertahankan pertumbuhan dengan bantuan sumber-sumber daya luar negeri.

Perekonomian kini telah diinternasionalisasi begitu jauh sehingga India tidak dapat merubah haluan tanpa mengeluarkan biaya tinggi. Secara kasar 85% impor India adalah komoditi pokok dan suplai industri yang diperlukan untuk mempertahankan produk dalam negeri. Sektor-sektor ekonomi penting yang berbeda-beda seperti alat-alat tangan dan pakaian jadi menghasilkan untuk ekspor maupun untuk pasaran dalam negeri.

Perubahan demografi juga memainkan suatu peranan dalam internasionalisasi itu. Baik emigrasi orang-orang India maupun pulangnya orang-orang India dalam jumlah yang lebih kecil menghubungkan India secara lebih erat dengan ekonomi dunia. Kiriman uang dari sejuta orang India yang bekerja di kawasan Teluk Parsi menyumbang sekitar US\$2 milyar per tahun kepada pendapatan valuta asing India. Investasi langsung juga meningkat dan menciptakan suatu arus dua arah di mana perusahaan-perusahaan India pergi ke luar negeri sementara perusahaan-perusahaan asing memulai usaha-usaha manufaktur di India. Pada akhir 1981, jumlah nilai investasi langsung AS di India mencapai US\$425 juta, dan Jerman Barat serta AS menggantikan Inggris sebagai investor asing utamanya. Jepang pun menjadi antusias mengenai peluang-peluang investasi India. Jumlah investasi-investasi asing yang baru itu tidak besar dibandingkan dengan perekonomian India, tetapi penting di pinggirnya. Transaksi-transaksi belakangan ini kebanyakan terjadi dalam bentuk kerjasama luar negeri yang melibatkan perjanjian-perjanjian pemberian li-

sensi dan royalti. Dalam hal AS, kerjasama teknologi berbeda-beda nilainya dari US\$4 juta sampai US\$90 juta. Proyek-proyek baru belakangan ini meliputi kerjasama untuk pembuatan mikrochip dan bahan pewarna sintesis dan untuk produksi kendaraan-kendaraan pertanian. Suatu petunjuk meningkatnya minat bisnis India maupun AS adalah naiknya jumlah kerjasama yang disetujui setiap tahun.

Secara yang mengherankan, kejutan-kejutan minyak dasawarsa 1970-an telah menguntungkan India. Selain memancing suatu sikap yang umumnya lebih ketat dan lebih pragmatis terhadap kebijaksanaan ekonomi di India, melonjaknya harga-harga minyak itu juga menciptakan daya beli di negara-negara yang bersedia menyewa pekerja-pekerja India, membeli barang-barang India, dan dengan cara lain menunjang perekonomian India. Karena takut bahwa rekening minyaknya akan menjadi terlalu berat, New Delhi mempercepat usahanya untuk mencari dan mengembangkan sumber-kekayaan sumber daya minyak dan sumber energi lainnya sendiri. Reaksi internasional terhadap kejutan-kejutan minyak tersebut bersama tanggapan kebijaksanaan dalam negeri India menciptakan kondisi bagi India untuk membujuk IMF pada tahun 1980 agar memberikan kredit US\$5,7 milyar untuk tiga tahun. Ini memungkinkan India memperluas kebijaksanaan liberalisasinya pada waktu India mengalami tekanan-tekanan pembayaran yang serius.

KELAS MENENGAH YANG BERKEMBANG

Dibandingkan dengan keadaannya 20 tahun yang lalu, India dewasa ini menunjukkan rakyat yang lebih sehat dan dengan pangan dan perumahan yang lebih baik. Di daerah pedesaan baik panen maupun ternak pertanian lebih kuat. Pangan dan barang-barang konsumsi lain tersedia, bukan saja di kota-kota besar, tetapi juga di daerah pedesaan. Buah-buahan dan sayuran, susu dan keju (yang merupakan "revolusi putih" dalam makanan India), pakaian buatan pabrik, dan pada tingkat yang lebih rendah barang-barang yang canggih seperti jam komputer dan kaset video adalah barang jualan biasa. Pabrik-pabrik mobil dan elektronika untuk konsumsi, pabrik-pabrik baja dan semen bekerja siang-malam. Di seluruh negeri terdapat suatu vitalitas ekonomi yang tampak dan meningkat.

Statistik resmi membenarkan peningkatan taraf hidup bagi semakin banyak orang, berkurangnya kepekaan produksi pertanian terhadap tingkah musim, dan penerobosan-penerobosan dalam kendala-kendala pertumbuhan yang telah lama. Laju pertumbuhan tahunan yang nyata dalam pendapatan nasional kotor India selama ketiga dasawarsa pertama perencanaan (1951/52-1970/80) hanya sekitar 3,5% rata-rata. Tetapi dari 1979/80 sampai sekarang

angka itu naik menjadi 5% lebih. Akselerasi ini berarti bahwa laju pertumbuhan pendapatan per jiwa telah meningkat dua kali, dari 1,5% pada tahun-tahun pertama kemerdekaan menjadi 3% selama 10 tahun terakhir.

Harapan hidup pada kelahiran di India telah meningkat dari 43 tahun pada tahun 1960 menjadi 52 tahun pada tahun 1981; angka kematian anak menurun dari 165 per mille menjadi 121 per mille dalam periode yang sama. Proporsi anak usia sekolah yang masuk sekolah dasar selama itu naik dari 61% menjadi 79%, dan kemampuan membaca di kalangan dewasa meningkat dari 28% menjadi 36%. Suatu kelas menengah yang besar dan berkembang -- diperkirakan 70-100 juta orang, yang terbesar di Dunia Ketiga dan jauh lebih besar daripada penduduk Perancis, Inggris dan Jerman Barat -- kini merupakan bagian yang semakin besar dari penduduk India sebanyak lebih dari 700 juta. Terdapat suatu kumpulan pekerja berbakat yang semakin besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen kendati terjadi suatu "brain drain" besar yang berlanjut. Angka-angka ini akan lebih mengesankan kalau penduduk India tidak tumbuh 2% lebih sedikit per tahun.

Produksi meningkat di tiga sektor penting: pertanian, industri dan energi. Dari tingkat 50 juta ton pada tahun 1950/51, *produksi pangan-padi-padian* meningkat menjadi lebih dari 150 juta ton tahun 1983/84. Kenaikan lebih lanjut diperkirakan menjadi lebih dari 200 juta ton pada tahun 2000. Produksi gandum di Punjab meningkat rata-rata 7% per tahun selama 15 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, India telah bergeser dari ketergantungan pada impor pangan-padi-padian rata-rata 6 juta ton per tahun pada 1960-an menjadi swasembada.

Minyak goreng merupakan satu-satunya pangan yang masih berulang kali membebani rekening impor India karena produksi dalam negeri tidak memadai. Tetapi usaha riset yang berlangsung untuk menyuling minyak goreng dari dedak boleh jadi akan mengatasi kebutuhan impor minyak pada akhir dasawarsa ini.

Keberhasilan pertanian itu sebagian besar dicapai berkat dipercepatnya perluasan tanah irigasi. Sejak pertengahan dasawarsa 1970-an India menambahkan 2 juta hektar tanah irigasi per tahun sedangkan sebelumnya kurang dari 1 juta hektar. Sekitar separuh potensi irigasi India masih harus dimanfaatkan. Ini ikut menghasilkan evaluasi optimis mengenai potensi pertanian untuk berkembang lebih lanjut.

Suatu faktor lain yang menunjang pertumbuhan pertanian yang meningkat adalah penemuan cadangan gas alam yang besar yang ikut mengurangi kebutuhan impor pupuk buatan India dari US\$827 juta tahun 1980/81 men-

jadi US\$571 juta tahun 1981/82 dan US\$151 juta pada tahun 1982/83. Tetapi kebutuhan pupuk buatan akan terus meningkat dan oleh sebab itu adalah penting bahwa cadangan gas yang terbukti lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masukan 10 pabrik pupuk buatan yang besar -- 2 di antaranya dalam tahap pembangunan dan 1 lagi dalam perencanaan.

Investasi dalam *perluasan agraris*, pengembangan varietas unggul, bibit yang tahan hama, dan meningkatnya penggunaan obat hama dan bahan kimia lain adalah bagian-bagian lain dari suatu program yang sangat menguntungkan India. Suatu paket semacam itu untuk tanah pertanian tadah hujan belum ada, sebagian karena lebih mahal pengembangannya dan kemiskinan boleh jadi tidak akan dapat diatasi dengan cepat bagi banyak orang miskin pedesaan. Namun, suatu program riset yang aktif untuk pertanian tadah hujan yang telah dimulai di India, jika dibantu oleh masyarakat riset internasional, bisa menjadikan revolusi hijau suatu gejala di seluruh India dalam dua dasawarsa mendatang. Di antara faktor-faktor lain yang bisa mengurangi kemiskinan di pedesaan India adalah arus kiriman uang dari luar negeri dan kebijaksanaan pemerintah untuk menggalakkan industri manufaktur di luar kota-kota.

Di sektor *industri*, produksi selama tiga dasawarsa yang lalu telah meningkat enam kali lipat. Indeks produksi industri pemerintah tidak lagi tumbuh dengan laju 6,9% per tahun 1950-1960, tetapi masih tumbuh dua kali lebih cepat daripada penduduk, bahkan tanpa menghitung produksi yang tidak terdaftar dalam ekonomi informal yang besar dan cepat berkembang. Sifat investasi industri juga berubah. Mula-mula investasi itu sebagian besar ditujukan pada penciptaan prasarana. Tetapi ia bergeser ke arah tekanan yang lebih besar atas industri dasar dan berat di bawah pemerintahan Jawaharlal Nehru, dan belakangan ini ke arah suatu campuran yang berorientasi konsumen yang lebih beranekaragam. Yang paling penting, dalam tiga puluh tahun ini telah terlihat produksi meningkat dalam barang-barang esensial: produksi semen dari 2,7 menjadi 20,9 juta ton; mesin listrik dari 0,1 menjadi 4,4 juta tenaga kuda; aluminium dari 4 menjadi 206,8 juta ton; dan pupuk buatan nitrogen dari 9 menjadi 3.144 juta ton. Dalam periode ini produksi tenaga listrik meningkat lebih dari 10 kali lipat.

Basis produksi India kini beranekaragam melebihi apa yang bisa diharapkan dari suatu negara dengan pendapatan per jiwa yang rendah. Suatu akibat ialah bahwa dalam dasawarsa yang lalu produksi industri menjadi komponen ekspor India yang semakin besar. Ekspor barang-barang permesinan seperti baja dan alat-alat tangan naik dari US\$155 juta tahun 1970/71 menjadi US\$921 juta tahun 1980/81. India juga semakin banyak memenangkan kontrak-kontrak di Dunia Ketiga dan di lain tempat untuk perencanaan,

pemolaan, dan pembangunan proyek-proyek bangunan dan pabrik-pabrik yang canggih. Perluasan dan diversifikasi kemampuan ekspor industri ini ternyata suatu asset neraca pembayaran yang sangat berharga dalam periode menurunnya harga untuk goni, kopi, kapas dan komoditi-komoditi ekspor lain belakangan ini.

Di sektor *energi*, produksi minyak mentah dalam negeri telah meningkat dari hampir nol pada waktu kemerdekaan menjadi 26 juta ton per tahun. Sungguh, sejak 1979 India telah banyak mengurangi ketergantungannya pada impor minyak mentah melalui suatu akselerasi produksi domestik dan suatu penurunan dalam pertumbuhan konsumsi, yang sebagian besar dipacu dengan menaikkan harga produk-produk minyak. Dalam tahun fiskal 1983/84, impor minyak dan produk-produk minyak turun menjadi US\$3,6 milyar dari US\$4,4 milyar tahun sebelumnya. Ratio impor minyak dan produksi dalam negeri telah terbalik secara dramatis, dari sekitar 60:40 menjadi 30:70 dalam lima tahun. Produksi minyak sekarang ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah India dalam Rencana Ekonomi Lima Tahun India yang Keenam (1980-1985). Dari sudut pandangan anggaran, perusahaan-perusahaan minyak negara mendapat keuntungan sekitar US\$1,5 milyar per tahun, yang ikut mencegah krisis keuangan di sektor pemerintah yang telah menimpa banyak negara berkembang. Studi-studi geologi mengisyaratkan bahwa jika pemerintah terus memberikan prioritas tinggi kepada eksplorasi dan pengembangan minyak, India bisa menjadi swasembada pada akhir abad ini.

HAMBATAN-HAMBATAN KEMAJUAN

Akan tetapi tiada diskusi mengenai hari depan bisa dipercaya tanpa menyebutkan masalah-masalah serius yang membandel.

Ketidakefisienan dalam penggunaan sumber-sumber daya khususnya besar di beberapa perusahaan negara India yang besar. Perusahaan-perusahaan negara bertanggung jawab atas sekitar 50% seluruh investasi modal tetapi hanya menyediakan 15% biaya yang diperlukan. Akibat jeleknya operasi sektor pemerintah maupun swasta, India dihadapkan dengan suatu ratio modal-produksi yang meningkat. Sebagai akibatnya barang-barang diberi harga terlalu tinggi bagi pasaran domestik pendapatan rendah; pertumbuhan sektor industri -- dan potensinya menciptakan kesempatan kerja -- juga terhambat dan ekspor barang jadi India menjadi kurang bersaing. Untuk meringankan masalah ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya dan menekan biaya produksi. Ini akan menuntut -- di samping tindakan-tindakan lain, pengu-

rangan restriksi-restriksi atas perusahaan domestik lebih lanjut, penciptaan insentif bagi arus modal ke dalam industri-industri di mana India mempunyai potensi untuk menjadi produsen biaya ringan menurut ukuran internasional -- yaitu industri-industri padat karya yang bisa menjamin lebih banyak kesempatan kerja dan menggunakan lebih sedikit modal -- dan penyusunan kembali bea cukai dan tarif-tarif yang lebih rendah.

Investasi adalah suatu masalah lain. India telah mencapai banyak kemajuan dalam usaha mengurangi kendala-kendala kekurangan tenaga, pengangkutan dan batubara yang lama dan saling terjalin, sebagian besar dengan pengelolaan investasi-investasi yang ada secara lebih baik. Perbaikan lebih lanjut bukan saja akan menuntut peningkatan penggunaan kapasitas yang lebih besar tetapi juga investasi baru yang substansial, suatu tugas yang menuntut terpusatnya perhatian pemerintah dan alokasi-alokasi modal baru yang lebih besar. India telah mempunyai tingkat tabungan domestik yang sangat tinggi bagi suatu negara dengan pendapatan per jiwa yang rendah -- sebagian berkat pengembangan sistem perbankan dan perpajakan yang canggih -- tetapi tingkat tabungan sektor pemerintah terlalu rendah, dan tabungan itu dapat ditingkatkan melalui efisiensi yang lebih besar dan kebijaksanaan-kebijaksanaan harga yang lebih baik. Tabungan dan investasi sektor swasta juga dapat ditingkatkan -- tanpa membahayakan tujuan-tujuan sosial-ekonomi negara yang fundamental -- seperti diakui oleh keputusan-keputusan investasi pemerintah belakangan ini. Dalam beberapa tahun yang lalu Pemerintah India merencanakan sekitar 60% investasi baru dalam sektor pemerintah, tetapi ia cukup luwes untuk membiarkan bagian itu menurun menjadi 40%. Ini mungkin karena pemerintah semakin menghargai sektor swasta. Saling curiga antara para pengusaha dan pemerintah telah memainkan peranan negatif dalam perekonomian dari pertengahan 1960-an sampai pertengahan 1970-an. Contoh-contoh adanya pragmatisme yang lebih besar meliputi kesediaan baru pemerintah untuk mengizinkan sektor swasta menanamkan modal dalam prasarana seperti pusat pembangkit listrik dan pembebasan parsial harga semen, dan secara demikian memberikan kepada industri yang sakit yang membutuhkan impor sebagai dinamisme untuk memacu produksinya, mengurangi ketergantungan luar negerinya, dan melakukan investasi baru dalam hanya beberapa tahun. Kemajuan lebih lanjut akan bergantung pada perbaikan manajemen sektor pemerintah dan pada penyusunan suatu kerangka kerja pengaturan yang lebih luwes bagi sektor swasta. Baik ketidakpastian maupun waktu yang dibutuhkan untuk mendapat ijin perlu dikurangi.

Peranan investasi asing langsung merupakan suatu soal abadi dalam strategi pembangunan India. Menyusul perlawanan awal terhadap investasi asing, yang untuk sebagian adalah reaksi terhadap kolonialisme yang lalu, Pemerintah India semakin mengakui bagaimana usaha-usaha patungan dapat

digunakan untuk memasukkan teknologi baru, meningkatkan ekspor dan menciptakan kesempatan kerja dalam negeri. Oleh sebab itu peraturan-peraturan dikendorkan, tetapi suatu sistem kendali yang menyusahkan atas produksi pada umumnya dan investasi asing pada khususnya tetap merupakan hambatan bagi skala investasi yang kini dicari India. Karena India bersaing dengan negara-negara berkembang lain yang secara aktif mencari perusahaan asing, ia perlu meninjau kembali dan menjelaskan peraturan-peraturannya untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan internasional bahwa mereka bisa beruntung dengan menanamkan modal di India. Yang harus diakui secara lebih luas ialah bahwa perekonomian India kini telah tumbuh menjadi begitu besar sehingga segala bahaya dominasi asing -- baik oleh orang asing maupun orang India di luar negeri -- jauh lebih kecil daripada 30 tahun yang lalu. Investasi asing langsung juga bisa mendukung strategi neraca pembayaran India untuk menggalakkan ekspor dan menggantikan impor. Kemarahan rakyat atas insiden tragis di Bhopal, yang menewaskan paling tidak 2.000 orang India, akan merugikan diri kalau ia menciptakan hambatan-hambatan baru yang tak teratasi terhadap pembaharuan di bidang ini.

Kesulitan-kesulitan keuangan domestik masih merupakan ancaman lain terhadap kemajuan India. Memperoleh cukup pendapatan untuk mendukung segi-segi administrasi maupun pembangunan anggaran pemerintah merupakan suatu masalah universal. Ia menjadi lebih berat di India akibat pendapatan per jiwa yang rendah, luasnya ekonomi informal dari mana sedikit pajak dikumpulkan, dan kekuatan politik pertanian yang membuat pemajakan pedesaan India sangat sulit. Menjamin adanya dana yang memadai untuk modal kerja dan pabrik maupun kebutuhan-kebutuhan pertanian perusahaan-perusahaan swasta yang sehat tidak selalu mudah dalam konteks seluruh kendala keuangan. Selain itu, pemerintah kadang-kadang terlalu melindungi perusahaan-perusahaan yang tak mampu membayar hutang, dalam beberapa kasus karena tekanan politik, untuk menasionalisasi firma-firma tak efisien dalam rangka melindungi lapangan kerja. Intervensi salah arah dalam sistem keuangan itu mahal, bukan saja karena sumber daya yang digunakan, tetapi karena membantu firma-firma tak efisien cenderung untuk menyadap kekuatan perusahaan-perusahaan yang lebih berhasil. India telah berbuat banyak untuk mengerahkan sumber daya keuangannya, tetapi penggunaan dana-dana ini masih dapat ditingkatkan.

Masalah-masalah perburuhan juga bisa muncul. Para pemimpin serikat-serikat buruh semakin mengakui bahwa dari sekitar 10 juta orang yang memasuki angkatan kerja setiap tahunnya, hanya 500.000 kiranya akan bergabung dengan gerakan buruh yang diorganisasi. Banyak orang lain mendapatkan pekerjaan di industri-industri dan bidang-bidang di mana belum ada serikat kerja. Namun, mengingat kekuasaan serikat-serikat atas sektor-sektor sen-

sitif, seperti pengangkutan kereta api, penambangan batubara dan pembangunan tenaga listrik, setiap kesulitan serius yang berlanjutan dengan pekerja-pekerja itu bisa menimbulkan kekacauan hebat dalam perekonomian.

Akhirnya terdapat *masalah-masalah sosial dan politik*. Perbedaan-perbedaan tetap: terdapat kekurangan gizi dan kelaparan di samping "swasembada pangan" yang dibanggakan oleh pemerintah; banyak buta huruf di samping suatu sistem pendidikan tinggi yang luas; dan kepincangan dalam distribusi pendapatan yang tidak banyak berkurang selama 30 tahun. Perkiraan Bank Dunia tahun 1981 mengenai suplai kalori harian per jiwa sebagai prosentase kebutuhan menempatkan India pada 86%, yang kedua belas terendah di dunia berkembang. Perkiraan Bank Dunia yang lain menunjukkan bahwa hanya 7% dari seluruh pendapatan rumah tangga diterima oleh 20% penduduk yang terendah dan 16,2% oleh lapisan terendah pertama dan kedua, sedangkan 49,4% diterima oleh 20% lapisan teratas. Angka-angka ini bukan indikator yang lebih besar dari adanya kemiskinan daripada kenyataan bahwa 40% penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut proyeksi-proyeksi, penduduk India yang menjadi dua kali lebih besar dalam 30 tahun terakhir, bisa meningkat dua kali lipat lagi dalam 45-50 tahun mendatang. Sensus India 1981, yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk sedikit di atas 2%, merupakan suatu kejutan yang mengecewakan karena berlawanan dengan harapan penurunan laju kelahiran. Memberi makan orang-orang itu masih mungkin, tetapi masalah menciptakan kesempatan kerja tampak serius. Tiada orang, apalagi Pemerintah India, yang mere-mehkan seriusnya *tantangan demografi* India. Akan tetapi dalam usaha memperhatikan dampak pertumbuhan penduduk atas hari depan India, beberapa hal menonjol. Pertama, dengan laju pertumbuhan pendapatan nasional kotor setinggi 5% dan laju pertumbuhan penduduk sedikit di atas 2%, pertumbuhan pendapatan per jiwa menjadi lebih baik; ini berarti perbaikan taraf hidup. Kedua, laju pertumbuhan penduduk tetap tinggi lebih sebagai akibat menurunnya angka kematian daripada karena menurunnya angka kelahiran. Menurut angka-angka Bank Dunia, angka kelahiran per mille India menurun dari 48 tahun 1960 menjadi 34 tahun 1982 -- sedangkan angka kematiannya menurun dari 24 menjadi 13 -- suatu penurunan separuh lebih. Tetapi diperkirakan bahwa pada tahun 2000 seluruh angka kelahiran -- atau jumlah anak yang akan lahir dalam satu rumah tangga -- adalah 2,9 lawan 4,8 tahun 1982. Akhirnya, program keluarga berencana di India adalah salah satu yang paling tinggi perkembangannya di Dunia Ketiga.

Terjalin dengan berlanjutnya perbedaan-perbedaan dan tekanan penduduk adalah pergesekan-pergesekan regional dan komunal yang terus mengganggu masyarakat India. Terdapat banyak gerakan separatis dan agitasi

komunal sering mengakibatkan kekerasan dan pertumpahan darah. Walaupun tiada bahaya serius bahwa India akan terpecah belah, tuntutan-tuntutan negara-negara bagian dan kekuatan-kekuatan lain akan lebih banyak kekuasaan ekonomi dan politik merupakan masalah-masalah yang berat.

Ketegangan regional dan komunal pada tahun-tahun mendatang bisa menggeser kekuasaan dari pemerintah pusat ke negara-negara bagian -- seperti terjadi di masa lampau -- tetapi tidak sampai suatu tingkat yang akan merongrong pembangunan ekonomi India di masa datang. Khususnya kebijaksanaan industri telah kokoh di tangan pemerintah pusat.

Akan tetapi, perbedaan-perbedaan maupun perpecahan akan mempengaruhi kebijaksanaan ekonomi di masa depan seperti terjadi sejak kemerdekaan. Berlanjutnya legitimasi politik pemerintah pusat harus dibeli dengan tindakan-tindakan khusus untuk membantu kaum miskin dan mempertahankan persatuan regional. Pertukaran dalam jangka pendek antara target pertumbuhan dan sasaran pembagian dalam beberapa hal bisa mahal, tetapi dalam jangka panjang kedua sasaran itu bisa sejalan.

MEMPERTAHANKAN MOMENTUM

Untuk mengatasi kendala-kendala itu dan mempertahankan momentum pertumbuhannya, India akan memerlukan mobilisasi valuta asing yang tiada presedennya. Rencana Lima Tahun yang Keenam mengantisipasi suatu peningkatan berarti dalam tabungan asing untuk melengkapi suatu usaha penabungan dalam negeri yang cukup besar. Ini meliputi, untuk pertama kalinya, pinjaman non-konsesi yang besar dari luar negeri, sekitar 4% seluruh investasi dan 7% impor. Untuk sebagian kebijaksanaan baru ini mengungkapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan India yang lebih ekspansif dan lebih terbuka dan untuk sebagian suatu kesediaan untuk mengambil manfaat dari pengakuan, paling tidak dalam masyarakat keuangan internasional, bahwa India layak mendapat kredit. Hal itu juga berasumsi bahwa bantuan keuangan resmi akan tetap memainkan peranan yang menentukan.

Untuk mendukung program penyesuaian dan investasinya yang terarah pada pertumbuhan, India berpaling kepada IMF pada tahun 1980.² Keputusan India untuk pergi ke IMF secara dini, dalamantisipasi berlanjutnya tekanan atas neraca pembayarannya dan mendahului berakhirnya aksesnya ke pasar modal swasta, mengungkapkan pandangan pemerintah bahwa

²Catherine Gwin, "Financing India's Structural Adjustment: The Role of the Fund," dalam John Williamson (ed.), *IMF Conditionality* (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1985), hal. 511-531.

memburuknya kedudukan eksternal memberi India suatu klaim sah atas sumber-sumber daya IMF; bahwa dalam konteks macetnya bantuan luar negeri, India perlu memperluas dan menganekaragamkan sumber-sumbernya bagi pinjaman luar negeri; bahwa dengan menarik dana dari IMF guna mendukung suatu strategi penyesuaian melalui pertumbuhan, India dapat menekan biaya peningkatan pinjaman komersial dan mempertahankan tingkat kelayakannya mendapatkan kredit untuk pinjaman di masa depan; dan bahwa ia tidak akan menemui banyak kesulitan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan persyaratan IMF mengingat perubahan-perubahan dalam kebijaksanaan pinjaman IMF belakangan ini dan seluruh fokus Rencana Keenam India sendiri.

Namun, Kiri dan Kanan di India dan Pemerintah AS mengajukan keberatan: kritisi di AS dan India bertemu mengenai dua hal: keragu-raguan mengenai perlunya pinjaman sebesar itu dan suatu preferensi untuk pinjaman komersial. AS yang akhirnya tidak memberikan suara dalam pemungutan suara di IMF mengenai pemberian pinjaman kepada India itu, mengatakan bahwa neraca pembayaran India tidaklah begitu lemah untuk membenarkan pembiayaan semacam itu, atau paling tidak pembiayaan pada tingkat yang diberikan kepada India itu. Menyetujui program India akan membuat suatu preseden yang bisa mengancam posisi likuiditas IMF dan banyak merubah watak lembaga itu. Menurut AS, IMF akan didorong untuk menjadi suatu pengantara keuangan jangka sedang dan bukannya memainkan peranan tradisionalnya sebagai suatu dana moneter yang memutar, yang memberikan pembiayaan neraca pembayaran sementara atas dasar kontingensi.

Akan tetapi sejarahnya mengisyaratkan bahwa strategi India-IMF untuk mencapai penyesuaian dengan pertumbuhan adalah tepat. Neraca pembayaran India cukup membaik untuk mengizinkan pemerintah membiarkan bagian kedua dan terakhir pinjamannya dari IMF. Yang terpenting, peluang dini untuk mendapatkan sumber-sumber daya IMF menolong India mempertahankan momentum pembangunannya, menghindari trauma langkah mundur yang sangat mahal, dan memperkuat standing kredit internasionalnya. Keefektifan tanggapan IMF kepada India diperbaiki dengan bekerjasama secara erat dengan Bank Dunia, yang mengizinkan suatu integrasi penanganan krisis dengan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang.

Sejak 1949, Bank Dunia memberi India pinjaman hampir sebesar US\$20 milyar -- US\$6,5 milyar dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dengan bunga yang mendekati tingkat pasaran dan US\$12,3 milyar dari International Development Association (IDA) dengan syarat sangat lunak. Ini menjadikan India kreditor IDA yang terbesar, dan bertanggung jawab atas lebih dari sepertiga seluruh hutang luar negerinya. India mengambil sampai 40% dana IDA per tahun sejak 1968. Namun India hanya

yang ke-40 dari 51 penerima dana dalam komitmen-komitmen tahunan atas dasar per kapita mulai 1981, dan menurut kriteria penduduk dan pendapatan per kapita yang baku yang digunakan untuk mengalokasikan dana IDA, akan mendapatkan jauh lebih banyak dari 40%. Kenyataannya, pinjaman Bank Dunia dan IDA adalah kurang dari seperdua belas jumlah yang dibelanjakan oleh pemerintah itu sendiri untuk pembangunan.

Dalam periode pengisian kembali IDA yang ketujuh (yang mulai pertengahan 1985) India ditetapkan untuk membagi dengan RRC suatu jumlah yang tidak melebihi 40% seluruh pembiayaan IDA. Selain itu, karena AS tidak bersedia menyumbang lebih dari US\$750 juta per tahun untuk pengisian kembali IDA yang ketujuh, seluruh dana IDA yang tersedia untuk dialokasikan dalam periode 3 tahun dibatasi sampai US\$9 milyar. Ini berarti bahwa, terlepas dari inflasi, besarnya IDA-7 akan 25% lebih kecil daripada IDA-6. Kecuali kalau Bank Dunia berhasil mendapatkan dana tambahan, bantuan bagi India akan sangat berkurang secara absolut maupun dalam prosentase.

Suatu argumen pokok AS untuk suatu IDA yang lebih kecil ialah bahwa India -- maupun RRC -- kini mampu meminjam lebih banyak di pasaran modal swasta dan lebih banyak dari "hard loan window" Bank Dunia. Ini mungkin suatu taksiran yang tepat mengenai posisi kredit India yang langsung -- yang kuat sebagian besar karena India sejauh ini mencari begitu sedikit pinjaman komersial -- tetapi mengabaikan segi-segi fundamentalnya. Kini sampai kapan pun, unsur konsesional pinjaman IDA penting untuk menekan beban debt-service India dan untuk memungkinkan pinjaman kotor yang lebih besar daripada halnya tanpa pinjaman lunak itu. Setiap pengurangan besar dalam bantuan konsesional melebihi apa yang telah diantisipasi India dan dimasukkan dalam Rencana Lima Tahun Keenam dan strategi pembiayaannya akan mengancam gerak India ke arah suatu perekonomian yang lebih terbuka. Suatu pergeseran sebelum waktunya dari pinjaman konsesional pemerintah ke pinjaman non-konsesional swasta bisa memaksa India untuk menerima suatu beban debt-service yang sangat berat, atau kemungkinan lebih besar mengingat konservatisme fiskalnya mengerem pembangunan nasionalnya. Opsi-opsi itu tidak melayani kepentingan India atau Barat. Sungguh, sekarang setelah India dalam proses mencatat laju pertumbuhan tinggi yang berlanjut dan melakukan sejumlah penerobosan yang penting, kiranya sangat bodoh untuk tidak mendukung para pembuat keputusan India dan tokoh-tokoh berpengaruh lain yang mendukung strategi liberalisasinya. Minimal pengurangan dana IDA bagi India harus secara berangsur-angsur dan akses kepada IBRD harus ditingkatkan.

Telah dinyatakan kekhawatiran di India bahwa suatu krisis neraca pembayaran akan timbul sebelum akhir dasawarsa dan bahwa dengan mencari pin-

jaman luar negeri untuk membiayai defisit perdagangan yang berlanjut, India bisa kena "penyakit Brasilia." Beberapa orang dari mereka yang menyatakan kekhawatiran itu secara ideologis menentang lebih terbukanya perekonomian India bagi perdagangan. Mereka akan lebih senang melihat New Delhi sangat membatasi impor daripada menekankan peningkatan produksinya untuk ekspor atau pinjaman luar negerinya sendiri. Lain-lain secara sah khawatir bahwa impor bertumbuh lebih cepat daripada ekspor dan bahwa pinjaman komersial mulai meningkat pada waktu bantuan konsesional berkurang.

Sebagai akibat ratio debt-servicenya yang masih rendah, India masih jauh dari kesulitan. Dan oleh sebab ia memilih untuk tidak mengambil bagian akhir pinjaman IMF-nya, pembayaran kembali kewajiban-kewajiban tahun 1985 dan sesudahnya akan cukup besar tetapi tidak sebesar antisipasi sebelumnya. Namun sekarang banyak hal bergantung pada kemampuan India untuk mengurangi impor berbagai barang dan untuk meningkatkan daya saing eksportnya. Keduanya akan makan waktu dan bukan saja bergantung pada tindakan yang diambil India tetapi juga pada pertumbuhan perekonomian dunia dan keterbukaan negara-negara industri bagi impor.

Biarpun banyak hal dapat dilakukan untuk memacu lebih lanjut produksi domestik barang-barang yang merupakan bagian besar dalam rekening impor India -- termasuk minyak, bahan kimia, mesin, pupuk buatan, minyak goreng dan baja -- dalam konteks meneruskan kemajuan ekonomi, pertumbuhan kebutuhan akan barang-barang itu dan barang-barang modal serta barang-barang kebutuhan lain pasti akan menaikkan rekening impor India dengan cepat. Meningkatnya ekspor dan meningkatnya pinjaman komersial yang dimungkinkannya adalah esensial kalau India ingin mengikuti gerak meningkatnya kebutuhan impornya. Dewasa ini, kendala-kendala kunci bagi perluasan ekspor India adalah ketidakefisienan produksi dan ketidakmampuan untuk meningkatkan produksi barang-barang yang dapat dijual lebih cepat, bukan kebutuhan eksternal yang tidak memadai. Tetapi setelah India mulai mengurangi kendala-kendala itu, akan menjadi semakin penting bahwa keadaan perdagangan dunia tidak memburuk lagi secara serius. Dalam hubungan ini, besarnya defisit anggaran dan perdagangan AS -- yang mengancam akan merongrong pemulihan ekonominya dan mendorong tindakan-tindakan proteksionis -- sangat mencemaskan kawan-kawan dagang AS, termasuk India.

Dapat diajukan argumen yang kuat bahwa kepentingan India adalah memperkuat arah kebijaksanaannya sekarang ini. Peluang-peluang di masa depan terutama terletak di bidang pertanian dan dalam perusahaan-perusahaan padat karya yang kecil dan sedang -- sektor-sektor yang juga berpotensi untuk mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga-tenaga tak trampil. Sedikit lebih kontroversial adalah pandangan bahwa

akselerasi pembangunan India juga akan melayani kepentingan AS dan negara-negara demokrasi lain. Akan tetapi letak geografis dan kekuatan ekonomi dan militer India yang potensial sangat diperhatikan oleh Barat. Demikian pun nilai-nilai demokrasi dan usaha-usaha India untuk mengusahakan suatu taraf hidup yang wajar bagi rakyatnya. Kemajuan di India menyanggah dalil bahwa rezim-rezim otoriter lebih mampu menangani tantangan pembangunan daripada lawan-lawan demokratisnya. Ia juga menyanggah pendapat bahwa bantuan luar negeri tak banyak membantu pembangunan. Oleh sebab itu AS harus meninjau kembali persepsinya mengenai India dan memikirkan apa yang bisa dilakukannya untuk membantu India mewujudkan prospek pertumbuhannya pada 1980-an.

Juga terdapat pertimbangan-pertimbangan dagang yang penting. Ekspor AS ke India belakangan ini meningkat, kendati banyak menyusutnya nilai dolar tahun-tahun belakangan ini. Pada tahun 1982, ekspor AS ke India mendekati US\$1,5 milyar dan pada tahun 1983 sekitar US\$1,8 milyar. Angka-angka tahun 1984 hanya menurun sedikit. Ekspor India ke AS bahkan tumbuh lebih cepat, dari US\$1,4 milyar tahun 1982 menjadi US\$2,2 milyar tahun 1983. Volume impor India ini terlalu kecil untuk menjadi saingan komersial yang serius di pasaran AS, tetapi meningkatnya perdagangan itu sekali lagi menjadikan AS kawan dagang India yang paling besar, suatu posisi yang didudukinya sampai 1981, ketika ia dikalahkan oleh Uni Soviet. Sekalipun Uni Soviet akan tetap kawan dagang yang penting, khususnya dalam suplai barang-barang militer, Moskwa tidak dapat memberikan teknologi modern yang semakin dicari New Delhi dan yang memberi peluang luas kepada pedagang-pedagang dan investor-investor AS. Khususnya rencana India untuk meningkatkan industri elektroniknya sepuluh kali lipat, dari US\$1,2 milyar sekarang ini, akan memerlukan tingkat-tingkat impor teknologi yang substansial dan memberikan peluang-peluang menarik kepada industri AS. Bidang minat lain boleh jadi adalah industri perbankan, di mana persetujuan antara serikat-serikat pegawai bank India dan perhimpunan banker India telah meratakan jalan bagi instalasi komputer-komputer dan sistem-sistem pengambilan informasi lain yang berkaitan. Masih ada peluang-peluang lain bagi bisnis AS di bidang-bidang mesin-mesin minyak dan gas, telekomunikasi, dan pemrosesan pangan. Kalau AS tidak memanfaatkan peluang-peluang itu, negara-negara lain akan melakukannya. Sejak akhir 1982, pemimpin-pemimpin Jepang dan Prancis adalah dua di antara mereka yang pergi ke India untuk tujuan-tujuan yang pada pokoknya komersial.

Kepentingan AS di India bukan saja politik dan komersial tetapi juga strategis. Seperti dicatat orang-orang lain: "Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi India dan kemampuannya untuk diperintah ... adalah syarat-syarat esensial bagi stabilitas regional, self-management regional, dan kerjasama

strategis inter-regional.”³ Khususnya di bidang-bidang inilah AS berkepentingan untuk bekerjasama dengan India.

Hubungan India dengan AS tidak selalu baik. Kesulitan-kesulitan diplomasi sebagian bersumber pada perbedaan-perbedaan nyata dalam kepentingan keamanan kedua negara. Tetapi beberapa kesulitan bersumber pada ketidaktahuan di pihak para pembuat kebijaksanaan di kedua negara mengenai sifat negara yang akan mereka pengaruhi. Pada tahun-tahun mendatang tidak akan ada kebijaksanaan AS yang baik terhadap India sampai pejabat-pejabat AS menyadari arti geografis dan komersial keberhasilan ekonomi India yang baru itu dalam dan luar negeri.

³Lloyd I. Rudolph dan Susanne H. Rudolph, "The United States, India and South Asia," dalam J.P. Lewis dan V. Kallab (eds.), *U.S. Foreign Policy and the Third World: Agenda 1983* (Washington, D.C.: Overseas Development Council, 1983), hal. 89.

Segi-segi Ekonomi Hubungan India-Indonesia*

H.M.L. BERI

Hubungan India-Indonesia menjadi lebih baik secara berangsur-angsur dan mantap sejak Presiden Soeharto memegang jabatan. Pada 8 Agustus 1974 India menandatangani persetujuan pertamanya mengenai penentuan batas-batas landas benua dengan Indonesia. Persetujuan ini menentukan batas-batas landas benua India dan Indonesia di area antara wilayah pulau India Nikobar Besar dan Sumatera di Indonesia. Pada 14 Januari 1977 India dan Indonesia menandatangani lagi suatu persetujuan yang menentukan batas-batas maritim sepanjang 480 km antara kedua negara berdasarkan asas garis tengah. Garis perbatasan 77 km yang ditentukan pada tahun 1974 diperpanjang ke jurusan timur laut ke Laut Andaman sampai jarak 200 mil-laut dari pantai masing-masing. Berdasarkan persetujuan itu, pulau-pulau Nikobar mendapat status yang sama seperti suatu negara kepulauan yang berdaulat. Dengan adanya persetujuan bilateral antara India dan Indonesia, antara India dan Muangthai, dan antara Indonesia dan Muangthai, maka tiba saatnya untuk mengidentifikasi titik temu tiga (negara). Pada 22 Juni 1978, India, Indonesia dan Muangthai menandatangani suatu persetujuan tiga pihak yang menentukan titik temu tiga batas-batas dasar laut mereka, secara kasar 100 mil laut dari titik terdekat pantai masing-masing. Menurut persetujuan ini, titik sambungan tiga India, Indonesia dan Muangthai di Laut Andaman adalah titik yang koordinatnya garis lintang utara $07^{\circ}47'00$, garis bujur timur $95^{\circ}31'48''$.

KUNJUNGAN-KUNJUNGAN

Presiden Soeharto merasa bahwa masih banyak kemungkinan untuk mengembangkan hubungan India-Indonesia. Beliau mengatakan di New Delhi

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Konperensi Indonesia-India IV, Jakarta, 19-21 Agustus 1985. Diterjemahkan oleh Kirdi DIPOYUDO.

pada 1 Desember 1980: "Bagi kami India bukan sekedar suatu bangsa yang mewarisi suatu sejarah dan kebudayaan dengan peradaban tinggi, dan yang menjalin hubungan dengan Indonesia berabad-abad yang lalu. Bagi kami, India adalah sahabat, sahabat akrab kami; sebagai sahabat, sebagai kawan seperjuangan dan sesama warga gerakan Non-Blok, negara-negara kita harus meningkatkan kerjasama demi kemajuan bangsa kita masing-masing dan juga demi perbaikan dunia." Kemudian pada bulan September 1981 almarhum PM Indira Gandhi mengadakan kunjungan ke Indonesia. Pada kesempatan itu soal-soal ekonomi dibicarakan. Bulan November berikutnya Pranab Mukherji, Menteri Perdagangan waktu itu, mengunjungi Jakarta. Menurut laporan pada kesempatan itu diputuskan untuk membangun suatu pabrik aluminium. Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara, bekas Menteri Luar Negeri P.V. Narashima Rao mengadakan kunjungan ke Jakarta pada bulan Januari 1984. Sesudah itu Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja mengunjungi New Delhi. Pada kunjungan ini ia membicarakan soal peningkatan kerjasama ekonomi.

Belakangan ini, bulan September 1984, Wakil Menteri Perdagangan P.A. Sangma mengunjungi Indonesia sebagai ketua suatu Trade Cum Rubber Study Team 6 orang. Selama di Indonesia ia juga mengunjungi Proyek Semen Padang, yang dikerjakan bersama oleh Project Equipment Corporation (PEC) dan Walchand Nagar Industries.

HUBUNGAN EKONOMI

Kedua negara telah mengambil langkah-langkah berikut untuk memperbaiki kerjasama ekonomi:

1. Joint Business Council dibentuk berdasarkan suatu persetujuan tahun 1978 antara Federasi Kamar Dagang dan Industri India dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
2. Pada 15 Februari 1979, kedua negara setuju untuk membentuk suatu satuan tugas multi-disipliner untuk mengidentifikasi berbagai faset sektor ekonomi dan industri untuk kerjasama dan kolaborasi;
3. Bank Negara India dan Bank India membuka cabang mereka di Indonesia untuk memberikan pelayanan konsultasi manajemen yang memonitor pinjaman yang diberikan kepada usaha-usaha patungan India dan Indonesia dan memberikan informasi mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia kepada markas besar mereka;
4. Suatu kantor Engineering Export Promotion Council dibuka di Jakarta untuk membantu dan membimbing para eksportir India mengeksport barang-barang engineering ke Indonesia;

5. Suatu Pameran Engineering India yang lengkap (INDEE '79) diadakan di Indonesia pada tahun 1979, India ikut Jakarta Fair (20-27 Juli 1983) dan Pameran Machine Tool di Indonesia bulan Desember 1983. Trade Fair Authority juga akan mengadakan suatu Pameran India pada tahun 1986;
6. Bulan November 1981 ditandatangani suatu persetujuan untuk mengeksport pelet Kudremukh ke Indonesia dan mengimpor sponge-iron dari negara ini;
7. Suatu satuan multi-disipliner yang terdiri atas wakil-wakil Departemen Industri Berat, Kementerian Luar Negeri, Bharat Heavy Electrical Limited, Hindustan Machine Tools mengunjungi Indonesia pada bulan Februari 1982 untuk membicarakan usul-usul yang dibicarakan pada kunjungan PM Indira Gandhi dan Menteri Perdagangan India dan membicarakan lebih lanjut perkembangan daerah Sumatera Barat;
8. Engineering Export Promotion Council mengadakan suatu workshop mengenai Indonesia di New Delhi pada bulan Oktober 1983 untuk menggalakkan ekspor barang-barang engineering India ke Indonesia.

Perhimpunan Ekonomi Indonesia dan India, suatu sayap Kadin Indonesia di Jakarta, juga membantu menggalakkan usaha-usaha patungan. Perhimpunan ini mewakili hampir semua rumah dagang India, industri dan perdagangan India, termasuk Tata, Birla, Goenka dan Singhanian. Yang terakhir adalah Mafatlal yang telah mulai suatu usaha patungan dengan firma Indonesia, P.T. Goodfaith. Usaha patungan ini diberi nama PT Standard Engineering Works dan membuat alat-alat tekstil seperti roller dan rubber chord. Usaha-usaha patungan India di Indonesia bergerak di bermacam-macam bidang seperti tekstil, pakaian, rayon, fibre, bahan wenter, perabot rumah tangga dari baja, bahan kimia, hasil-hasil pertanian, alat-alat engineering, baja, minyak dan kertas.

Usaha patungan India yang paling mahal dan mentereng di Indonesia adalah pabrik baja Ispadendu. Dimulai tahun 1977 dan selesai tahun 1981, pabrik Ispadendu ini dibangun dengan biaya US\$70 juta dengan kapasitas terpasang 250.000 ton baja. Dewasa ini produksinya 60% kapasitas terpasangnya dan mengerjakan 800 orang Indonesia dan 60 orang India.

Selain itu, pada bulan Desember 1983 perusahaan bijih besi Kudremukh menandatangani suatu memorandum of understanding dengan PT Krakatau Steel Indonesia untuk ekspor 0,15 juta ton pelet Kudremukh tahun 1985 dan 0,5 juta ton tahun 1986.

Setelah UU Investasi Asing diundangkan bulan Januari 1967 (diperbaiki tahun 1970 dan 1974) Indonesia mulai mengundang investasi asing. Ketentuan-ketentuan pokok undang-undang investasi ini adalah sebagai berikut:

1. Semua investasi biasanya berhak untuk mempercepat depresiasi (untuk empat tahun mulai pada saat pengeluaran dimulai). Bagi kebanyakan item depresiasi itu diperhitungkan 10% per tahun atas dasar garis lurus, tetapi sejak pembaharuan perpajakan 1 Januari 1984, ia diperhitungkan 25% atas dasar menurunnya neraca. Investor asing juga berhak atas tunjangan investasi dan kompensasi bagi kerugian akibat nasionalisasi. Sebagai akibat amendemen tahun 1974, hak untuk mengimpor mesin dan bahan mentah bebas bea masuk dihapus.
2. Repatriasi keuntungan dibolehkan biarpun modal tidak boleh dipulangkan selama proyeknya menikmati konsesi-konsesi.
3. Usaha patungan dengan peserta Indonesia diwajibkan sejak 1974. Harus ditetapkan suatu jadwal untuk pemindahan paling tidak 51% saham ke tangan Indonesia, dan sejak 1974 peraturan yang minta penempatan orang-orang Indonesia secara maksimal dalam proyek-proyek milik asing diperketat.
4. Berdasarkan undang-undang investasi, investor asing dibebaskan dari pajak perusahaan selama 2-6 tahun untuk proyek-proyek dalam sektor-sektor prioritas (termasuk proyek-proyek yang berorientasi ekspor yang menggunakan bahan mentah lokal, dan pembuatan barang-barang konsumsi pokok seperti pangan dan sandang). Tax holiday ini dicabut oleh undang-undang pajak baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 1984, dan umumnya orang berpendapat rencana depresiasi yang diusulkan oleh pembaharuan pajak merupakan ganti rugi bagi tax holiday yang dihapus.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejak Januari 1967 sampai September 1983, didirikan sekitar 800 proyek usaha patungan di Indonesia. Di samping itu satu atau dua proyek pertambangan dimulai pada tahun 1967 oleh pengusaha-pengusaha asing.

Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tidak termasuk sektor-sektor minyak dan perbankan, investasi-investasi asing baru (seperti yang tercantum dalam Tabel 1) disetujui tahun 1982 dan 1983.

Komoditi utama ekspor India terdiri atas: mika, gula, makanan hewan, mineral kasar, bahan kimia, bahan pewarna dan samak, produk medis dan obat-obatan, kertas dan papan kertas, mesin listrik dan nonlistrik, kendaraan bermotor.

Sebaliknya komoditi utama impor India dari Indonesia terdiri atas sponge-iron, rempah-rempah, minyak nabati, bahan penyamak, minyak yang mudah menguap, urea, pupuk buatan dan semen.

Tabel 1
INVESTASI ASING BARU YANG DISETUJUI
(jutaan US\$)

	1982	1983
Pertanian	15,9	—
Kehutanan	63,3	—
Perikanan	6,2	—
Pertambangan & Penggalan	226,4	19,0
Manufaktur	1.245,9	1.751,6
Bangunan	30,9	1,5
Pengangkutan dan komunikasi	17,9	—
Perdagangan dan pariwisata	19,2	25,0
Real estate dan jasa-jasa lain	204,9	92,6
Jumlah	1.830,7	1.889,8

Tabel berikut menunjukkan perdagangan India dengan Indonesia beberapa tahun terakhir. Tabel menunjukkan bahwa India mempunyai neraca perdagangan yang positif dengan Indonesia untuk beberapa tahun terakhir yang meningkat sampai tahun 1976-1977. Akan tetapi, ia menurun pada tahun 1977-1978, khususnya sebagai akibat meningkatnya impor minyak goreng dan beberapa produk kimia. Namun kecenderungannya tetap sama.

Tabel 2
PERDAGANGAN INDIA DENGAN INDONESIA 1968-1984
(dalam jutaan Rupee)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
1968-1969	55,5	1,4	+ 54,1
1969-1970	40,4	2,3	+ 38,1
1970-1971	41,0	2,5	+ 39,5
1971-1972	32,1	1,7	+ 30,4
1972-1973	53,0	2,7	+ 50,3
1973-1974	267,8	4,1	+ 263,7
1974-1975	509,4	26,3	+ 483,1
1975-1976	520,2	34,4	+ 485,8
1976-1977	605,5	28,8	+ 576,7
1977-1978	410,0	230,9	+ 189,0
1978-1979	807,9	125,0	+ 687,4
1979-1980	562,8	207,0	+ 362,1
1980-1981	516,0	161,4	+ 354,6
1981-1982	600,7	219,8	+ 380,9
1982-1983	488,2	85,8	+ 410,7
1983-1984	361,8	254,9	+ 45,2
1984-1985(April-September)	241,6	194,2	+ 47,4

Catatan: US\$1 = 8 Rupee.

Sumber: DGCI & S Calcutta; dan Annual Report issued by Ministry of Commerce & Industry.

LIST OF INDIAN JOINT VENTURES IN INDONESIA

Indian Party	Name and Address of Joint Venture	Field of Collaboration	Date of Approval	Remarks	Equity US\$.000	
					Total	Indian
1	2	3	4	5	6	
Ind Woolen Mills Ltd., Building, orarjee Marg, rd Estate, bay	PT Jaykay Files Indonesia, Hotel 6 Jalan M.H. Thamrin Jakarta	Engineering Steel files & rasps	19.10.72	In production from July 1976	450	130
Century Spg. & Mfg. Co. Ltd., stry House, Churchgate, mmation day- 400 020	PT Elegant Textile Industry 10 C Jalan Budi Kemullaan Jakarta	Textile yarn	10.5.73	In production Indian participation is 44.82. Divldends not yet declared RS. 90 lakhs of addl. export have been generated	1,100	.493
at Commerce & Industries Ltd., ara Kiran Building 5th Floor, asturba Gandhi Marg, E Delhi	PT Horizon Syntex Kedung Baruk, Rungkut Surabaya	Textile yarn	1.7.74	In production February 1976	1,836	761
utibag Entrepreneurs (P) Ltd., N No. 38, utibag House, utibag, Ahmedabad	PT Famaltex Tromelpos 3102 JKT 63 Jalan Petogogan Kebayoran Baru	Polyster blended yarn	27.2.74	In production May 1976	3,750	.1,913
al Malleables (P) Ltd., alash Society, am Road, eedabad	Sri Riken Wlguna Indonesia 10 C Jalan Budi Kemullaan Jakarta	Malleable iron pipe fittings	10.10.75	In production Sept. 1977	1,325	132
aripur Industries Ltd., rseas Division) par House 12, anpath I Delhi	Saraswati Bhakti Coated Papers 10 C Jalan Budi Kemullaan Jakarta	Coated art paper	28.7.75	In production January 1978	2,550	1,250
E Engineering & Consul., abourne Road, outta	Ispat Indo Jalan Jaksa No. 2 Jakarta	Ribbed torsteel	11.3.77	In production October 1977	2,024	775
bhai M. Chemicals, rmaceutical Division, E Box No. 31, i.l, Baroda	Indosara Tromelpos 3702 JKT Jalan Petogogan 1/63 Kebayoran Baru Jakarta	Antibiotics	29.7.76	In production	725	490
rum Products Ltd., ibbay Mutual Building, rabourne Road outta	Kusum Products Indonesia 5 Jalan Nilam Barat Surabaya	Oilseeds crushing and solvent extraction etc.	29.3.75	In production January 1978	2,250	1,069
erej & Boyce Mfg. Co. (P) Ltd., erej Bhavan, Home Street, Fort, ibbay	PT Godrej Indonesia 23-25 Jalan Kopl Jakarta	Steel Furnitures, security equipment, etc.	4.2.76	Under Implementation, & likely to go into production shortly	1,000	600
arput Industries Ltd., erseas Divlslon), par House, 12 Janpath, E Delhi	PT Ganesh Ballar Pur paper	Paper	21.2.77	Under Implementation, project has been delayed due to problems arising out of devaluation of Rupiah	900	3,600

1	2	3	4	5	6
12. Amar Pvt. Ltd., (Formerly Paper Cables Pvt. Ltd.,) Opposite DI Cabln, Chalni Road Baroda		Aluminium alloy wire rods and allied products	28.2.77	Under implementation	Rs. 37.5 lakhs
13. Maharashtra Sugar Mills Ltd., Industrial Insurance Bulding, Churchgate, Bombay	—	Sugar Mills		Under implementation	11,000
14. Gwalior Rayond Silk Mills Mg. (Wvg.) Co. Ltd., Birlagram, Nagda	PT Indoragan 24 Jalan Johar Jakarta	Viscose Staple fibre, sodium Sulphate	12.4.78	Under implementation. The proposed Indian participation is 20% Rs. 252 lakhs of addl. exports are envisaged	8,222
15. Tungabhadra Industries Ltd., 108, Walkar Town, Secunderabad, A.P.	—	Dyestuffs	22.4.78	Under implementation	850
16. Tungabhadra Industries Ltd., 108, Walkar Town, Secunderabad, A.P.	—	Viscose Staple fibre	3.6.78	Under implementation	7,000
17. Bombay Dyeing & Mfg. Co. Ltd., Neville House, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Bombay	PT Flve Star Industries Ltd., 184, Clpaganil, Bandung	Composite textile pill	26.10.78	Under implementation	8,575
18. M/s. Gokak Patel Volkart Ltd., Forbes Building, Charanjeet Rai Marg, Bombay	PT Gokak Indonesia Wlsma Kosgoro Jalan M.H. Thamrln Jakarta	Textile Mills	18.7.79	Under implementation	2,300

Interaksi India-Indonesia*

K.N. RAMACHANDRAN

I

India dan Indonesia merupakan dua negara terbesar di Asia. Interaksi banyak tingkat antara kedua negara itu berasal dari zaman dahulu. Ia terputus selama zaman penjajahan di kedua negara ini. Interaksi itu telah dibuka kembali pada tahap terakhir zaman penjajahan itu, pada awal abad ke-20 sebagai akibat faktor yang sama, yaitu pergolakan nasional di kedua negara. Proses ini mau tidak mau menyebabkan diketemukannya kembali ikatan-ikatan yang dijalin di masa lampau. Hal itu merupakan landasan yang kokoh untuk saling mengadakan interaksi pada tahap kemerdekaan kedua negara yang mulai pada akhir tahun empat puluhan abad ini. Kendatipun interaksi itu pada saat-saat tertentu ditandai oleh hal-hal yang menjengkelkan dan persepsi-persepsi yang keliru, jika kita membuat neraca maka terlihat bahwa secara keseluruhan hal itu menguntungkan kedua negara dengan kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang secara tetap di masa yang akan datang.

II

Tahap awal interaksi ini (1946-1960) secara jelas menunjukkan segi-segi nasionalis dan bangkitnya kesadaran pan-Asia dan Afrika kedua negara itu. Dukungan India untuk kemerdekaan Indonesia setelah dibentuknya pemerintahan sementara India (1946) pada Asian Relations Conference yang diadakan di New Delhi (Maret 1947) dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memproyeksikan sifat Asia nasionalisme India di arena internasional. Usaha yang dilakukan oleh Indonesia, bersama dengan India dan negara-negara Asia lainnya

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Konperensi India-Indonesia IV, Jakarta, 19-21 Agustus 1985. Penerjemahnya Daniel SETYAWAN, staf CSIS.

yang baru muncul, untuk mengadakan Konperensi Asia-Afrika di Bandung (April 1955) berhasil menunjukkan segi-segi pan-Asia nasionalisme Indonesia. Segi bilateral interaksi itu tercermin pada: (a) perjanjian bantuan timbal-balik antara Angkatan Udara India dan Indonesia serta kerjasama yang dijalin Angkatan Laut kedua negara; (b) perjanjian untuk mengadakan dinas kurir dua bulan sekali antara kedua negara, dan (c) keputusan untuk menggalakkan perdagangan dan kerjasama.

Akan tetapi sejumlah hal yang menjengkelkan dan kesukaran timbul antara kedua negara itu dalam tahun enam puluhan dan baru setelah "Orde Baru" terbentuk menyusul penumpasan pemberontakan G-30-S (1965) interaksi itu dinormalisasi kembali.

Hal-hal yang menjengkelkan yang timbul sejak tahun 1960 adalah akibat beberapa faktor. India dan Indonesia berbeda persepsi mengenai sistem internasional dan cara-cara serta sarana untuk menyelesaikan persoalan dan masalah yang terdapat dalam sistem itu, terutama yang berhubungan dengan ancaman perang nuklir dan kecenderungan umum untuk mematikan aspirasi-aspirasi sah negara-negara Asia-Afrika yang baru muncul. Indonesia mulai menempuh jalan konfrontasi radikal yang akhirnya mengakibatkan negara itu keluar dari PBB (1965). Rezim Nasakom Soekarno, dengan mendapat dukungan kuat dari PKI yang sekarang sudah dibubarkan menempuh jalan yang berbeda dengan persepsi India mengenai tata internasional. Dipandang secara bilateral Indonesia menyedihkan yang dianggapnya sebagai sikap lunak India sehubungan dengan usaha Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat (1960-1961). Selanjutnya, Indonesia mengambil sikap netral terhadap konflik perbatasan Cina-India (1962) dan masalah-masalah yang berkaitan pada Konperensi Kolombo Negara-negara Non-Blok (Desember 1962) dalam mencari penyelesaian krisis itu. Bahkan sikap ini mengalami perubahan yang menguntungkan sikap Cina dalam tahun 1963 ketika berlangsung persekutuan Cina-Indonesia. Lagi pula Indonesia merasa bahwa India lebih mementingkan pertemuan non-blok kedua daripada konperensi Afro-Asia kedua -- yang merupakan usul Indonesia -- pada tahun 1963-1964 ketika masalah itu menjadi pusat perhatian. Indonesia juga mengambil sikap pro-Pakistan menjelang pecahnya Perang India-Pakistan tahun 1965 dan malahan menawarkan bantuan militer kepada Pakistan.

Di lain pihak, sekalipun sependapat dengan Indonesia mengenai perlunya diadakan perubahan-perubahan dalam sistem internasional, India berpendapat bahwa cara evolusi adalah yang paling tepat untuk hal itu karena perang nuklir antar negara adikuasa merupakan ancaman yang nyata -- suatu anggapan yang ditolak oleh Indonesia. Dari segi bilateral dan regional, India menganggap sikap Indonesia yang pro-Beijing (1963) dan pro-Pakistan (1965) keliru; demikian pula konfrontasinya terhadap Malaysia (1963-1965) suatu

tindakan yang mengganggu kestabilan kawasan Asia Tenggara di tengah-tengah suatu sengketa besar di Vietnam.

Masalah-masalah pokok itu telah dipaparkan di sini hanya untuk menekankan kenyataan bahwa pada tahap ini solidaritas tahun-tahun sebelumnya dirusak oleh bermacam-macam masalah dan sikap terhadapnya. Dalam hal Indonesia, faktor-faktor politik dan ekonomi dalam negeri juga memegang peranan penting.

III

Berakhirnya konfrontasi terhadap Malaysia (1966) dan kembalinya Indonesia ke PBB melambangkan semangat baru. Pemberian prioritas kepada sektor pembangunan ekonomi yang terbengkalai, serta dipilihnya peranan pengembangan damai dalam sistem internasional, pada dasarnya menunjukkan arah Orde Baru. Faktor-faktor ini menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penghayatan interaksi bilateral.

"Iklim" yang dimaksudkan di atas pada hakikatnya berarti melenyapkan perbedaan-perbedaan atau dissonansi yang tajam dalam pendekatan kedua negara terhadap pelbagai masalah dan faktor dalam sistem internasional. Negara-negara adikuasa, perlombaan senjata, politik Non-Blok, Samudra Hindia, Asia Tenggara, Cina dan Asia Selatan merupakan masalah-masalah dan faktor-faktor yang dimaksudkan.

Pertama, mengenai negara-negara adikuasa dan Sistem Internasional, sejak tahun 1966 India dan Indonesia banyak mengurangi perbedaan-perbedaan mereka sebelumnya. Kedua negara itu sekarang memandang pembicaraan serta perundingan negara adikuasa untuk mengendalikan perlombaan senjata dan menjamin stabilitas dunia sebagai suatu segi penting tata internasional dipandang perlu tetapi tidak cukup:

Kedua, India dan Indonesia sependapat bahwa perlombaan senjata merupakan suatu bahaya besar, dan bersama negara-negara non-blok lainnya mereka telah membantu menciptakan suatu iklim pendapat pro-perdamaian di PBB dan lain tempat. Pendekatan yang luas menuju perdamaian ini sangat mendesak karena, seperti dikatakan oleh Presiden Soeharto pada perjamuan makan untuk menyambut Presiden Fakruddin Ali Ahmed (26 Mei 1975): "Ketegangan-ketegangan dunia belum hilang sama sekali." Beliau menambahkan: "Jurang antara negara kaya dan miskin masih menonjol, ancaman perang terbatas masih menghantui kita, sebab-sebab potensial pelbagai krisis ekonomi belum disingkirkan seluruhnya, kompetisi serta perebutan daerah pe-

ngaruh masih merupakan duri dalam daging, kekerasan masih digunakan untuk memaksakan kemauan sendiri."

Ketiga, demikian pula dalam gerakan non-blok, kedua negara telah memainkan peranan yang positif karena baik India maupun Indonesia ikut mendirikan kelompok non-blok itu. Perbedaan-perbedaan mengenai arah gerakan itu memang timbul pada tahun enampuluhan ketika Presiden Soekarno menempuh jalan yang radikal. Sebaliknya Orde Baru telah memilih "prinsip muafakat," demikian pula India. Hal ini dapat dilihat pada sikap kedua negara terhadap masalah-masalah yang dihadapi pertemuan para Kepala Negara atau Pemerintah Non-Blok yang ke-6 di Havana (September 1979). Pemimpin delegasi Indonesia Wapres Adam Malik mengatakan bahwa tujuan negara ini adalah "memperkuat solidaritas non-blok, bukan melemahkannya; meningkatkan kemampuan kolektif gerakan untuk bertindak, bukan untuk mengurangnya." Ia menambahkan: "Negara-negara luar telah memanfaatkan konflik-konflik intern kita dengan cepatnya untuk mendiskreditkan citra kita dan merusak kemampuan gerakan." Senada dengan ini Menlu India Shri S.N. Mishra berkata: "Marilah kita mengakui secara terus terang bahwa bahaya bagi gerakan kita tidak hanya berasal dari faktor-faktor luar, tetapi juga dari perselisihan-perselisihan bilateral dalam persaudaraan kita. ... Tekanan-tekanan terhadap gerakan kita akan berlanjut ... tetapi kalau kita dapat bertindak dengan kematangan dan kebijaksanaan, bertindak bersama-sama seperti kita lakukan untuk mengakhiri penjajahan, kita dapat menjadikan gerakan non-blok sebagai motor untuk mendirikan tata dunia yang baru."

Keempat, kedua negara juga mempunyai persepsi yang sama mengenai peranan negara-negara besar di Samudra Hindia. Pandangan Indonesia adalah sama dengan pandangan India dalam arti bahwa kedua negara bertekad untuk menjadikan Samudra Hindia suatu zona perdamaian dan bahwa masalah-masalah keamanan regional harus ditangani oleh negara-negara pantai itu sendiri. Akan tetapi pemimpin-pemimpin Indonesia yang berpengaruh juga berpendapat bahwa kalau tujuan ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat, dapat dicapai "keseimbangan antara negara-negara adikuasa." Hal ini jelas berarti bahwa tidak satu pun negara boleh memainkan peranan yang dominan di Samudra Hindia -- kiranya sampai diadakan suatu perjanjian yang memungkinkan negara-negara adikuasa itu mengundurkan diri dari militerisasi.

Kelima, dalam hal Asia Tenggara, kedua negara ini tidak mempunyai perbedaan-perbedaan tajam mengenai masalah-masalah dan perkembangan di kawasan ini sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia.

India menyambut baik pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada bulan Agustus 1967. Pada hakikatnya India meman-

dang ASEAN sebagai kerangka yang penting -- cukup luwes untuk menggunakan konsultasi dan pembentukan konsensus dalam mencari penyelesaian masalah-masalah regional tanpa tekanan atau campur tangan luar dan sebagai sarana untuk menggalakkan kerjasama ekonomi regional. Pandangan India ini mirip dengan konsep Indonesia mengenai "Ketahanan Regional" -- suatu proses negara-negara anggota kelompok itu memperkuat diri melalui usaha-usaha individual dan kolektif.

Mengenai perkembangan-perkembangan lain di kawasan Asia Tenggara, Kampuchea merupakan suatu persoalan di mana perbedaan-perbedaan yang tajam telah timbul di masa lampau tetapi sekarang telah berkurang.

Perbedaan-perbedaan itu memang tampak ketika Kampuchea tampil sebagai akibat penggulingan pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk oleh Marsekal Lon Nol yang didukung oleh Amerika Serikat pada tahun 1970. Langkah ini merupakan sebagian dari usaha Amerika Serikat untuk memperluas peperangan sampai Kampuchea karena tempat-tempat perlindungan Viet Cong berada di perbatasan Kampuchea dengan yang waktu itu disebut Vietnam Selatan -- sebuah terminal jalan Ho Chi Minh yang terkenal itu. Meluasnya peperangan sampai ke Kampuchea mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengadakan suatu konperensi guna membahas masalah itu pada bulan Mei 1970. Sebelas negara menghadiri konperensi tersebut tetapi India tidak karena merasa bahwa sebuah konperensi negara-negara non-blok akan lebih tepat untuk itu. Tidak ikut sertanya India itu disesalkan oleh Indonesia.

Masalah Kampuchea muncul kembali menyusul pengakuan rezim Heng Samrin pada tahun 1980 oleh India -- rezim yang telah menggulingkan rezim Pol Pot yang membantai rakyatnya (yang mulai berkuasa pada tahun 1975) dengan dukungan kuat dari Vietnam. Sementara India maupun Indonesia tidak mempunyai rasa simpati terhadap rezim Pol Pot, perbedaan pendapat timbul mengenai keabsahan rezim Heng Samrin sehubungan dengan peranan Vietnam yang menentukan dalam menumbangkan kelompok Pol Pot.

Pengakuan rezim Heng Samrin oleh India berdasarkan beberapa faktor. Pertama, karena menguasai sebagian besar dari wilayah itu, maka rezim Heng Samrin memenuhi syarat bagi pengakuan India. Kedua, telah dikemukakan oleh beberapa kalangan, terutama di India, bahwa pengakuan India adalah suatu tindakan pro-Soviet, karena rezim Pol Pot adalah pro-Beijing dan dengan segala alasan praktis India tidak menjalin hubungan dengan rezim itu.

Argumen ini tidak benar karena India tidak melaksanakan politik diskriminasi dalam soal pengakuan kecuali dalam hal Afrika Selatan. Kenyataannya India telah lebih dahulu memberikan pengakuannya terhadap kekuasaan

Milton Obote yang telah menggulingkan rezim Idi Amin di Uganda dengan bantuan Tanzania yang menentukan. Dalam kedua hal itu, rezim-rezim pembunuh rakyat digulingkan dengan bantuan luar. Dalam kedua hal itu kebijakan India ditentukan oleh sifat pembunuh rakyat dari rezim-rezim tersebut.

Pada semuanya itu dapat ditambahkan bahwa Indonesia pun tidak menyetujui kebijakan berdarah kelompok Pol Pot serta hubungan eratnya dengan Beijing. Indonesia tidak mengakui rezim Heng Samrin rupanya karena tekanan-tekanan politik regional, yaitu solidaritas dengan ASEAN. Indonesia kenyataannya telah mengakui Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratik (CGDK = Coalition Government of Democratic Kampuchea) yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan dibentuk pada tahun 1981. Patut dicatat pula bahwa dalam melaksanakan pendekatan ini, Indonesia tidak bersikap keras (hardliner) terhadap Vietnam. Ia mempertahankan garis komunikasi dengan Vietnam karena memandang Vietnam sebagai pelaku yang merdeka, suatu benteng terhadap ambisi Cina di kawasan itu. Indonesia juga mempunyai keberatan-keberatan yang serius terhadap *Khmer Merah*, komponen pro-Beijing CGDK yang kuat, dan bersikap lebih simpatik terhadap Son Sann dan kelompok-kelompok Sihanouk. Dipandang dalam kerangka ini maka pendekatan-pendekatan Indonesia secara kualitatif berbeda dengan pendekatan keras terhadap Vietnam dalam kelompok ASEAN.

Dengan latar belakang ini maka posisi India dan Indonesia adalah sama mengenai diteruskannya dialog dengan Vietnam. Mereka juga sama dalam memilih jalan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa di Kampuchea. Sebenarnya perbedaan hanya mengenai masalah pengakuan.

Keenam, persepsi kedua negara mengenai peranan Cina di kawasan Asia Tenggara khususnya dan di dunia pada umumnya juga sama. Meskipun politik luar negeri Cina sekarang ini mencari koeksistensi damai, kedua negara itu (India dan Indonesia) yakin bahwa Cina merupakan negara besar di kawasan ini dan berambisi untuk menjadi negara adikuasa di bidang militer, ekonomi dan politik. Dalam ulasannya mengenai politik koeksistensi damai Cina, Radio Jakarta (20 April 1985) mengatakan: "Prinsip koeksistensi damai diumumkan oleh almarhum Perdana Menteri Zhou Enlai pada Konperensi Asia-Afrika di Bandung tiga puluh tahun yang lalu. Hendaknya diingat bahwa setelah Konperensi Asia-Afrika itu, RRC mulai mengambil sikap yang bertenangan dengan prinsip koeksistensi damai dengan menyerbu India pada tahun 1962 dan Vietnam pada tahun 1979." Akan tetapi, ia menambahkan, bahwa Cina tidak mau menyerbu Vietnam untuk kedua kalinya menyusul ofensif besar-besaran Hanoi di Kampuchea baru-baru ini menunjukkan bahwa Cina bermaksud mendapatkan kembali kepercayaan negara-negara tetangganya di Asia akan prinsip koeksistensi damai sebagai salah satu prinsip pokok politik luar negerinya.

Akan tetapi perlu ditekankan bahwa peranan Cina sebagai kekuatan regional juga -- akan -- merupakan sumber ketidakpercayaan di Asia Tenggara karena bermacam-macam faktor, seperti persepsi bahwa Cina mengganggu stabilitas di masa lampau dan dukungannya yang aktif bagi pemberontakan-pemberontakan di kawasan ini (sekarang agak disembunyikan karena alasan-alasan praktis dan taktis) dan tujuan-tujuan jangka panjang negara itu. Lagi pula, masalah Cina Perantauan (OSC = Overseas Chinese) dan persoalan-persoalan mengenai kebangsaan mereka serta hubungan mereka dengan Daratan Cina dengan alasan-alasan ekonomi dan politik telah menimbulkan kekhawatiran di banyak negara Asia Tenggara. Kebijaksanaan Cina sekarang ini untuk mendorong orang-orang Cina Perantauan yang kaya untuk menanamkan modalnya di RRC dan ikut memajukan keempat modernisasi agak mencemaskan karena negara-negara tersebut tidak menghendaki modal dialihkan keluar dari negara mereka masing-masing. Menurut pandangan India, masalah OSC itu merupakan bagian dari persoalan dalam negeri masing-masing negara yang harus diselesaikan oleh mereka sendiri, tanpa campur tangan atau tekanan luar mana pun. Indonesia pun telah menegaskan pandangan ini. Lebih penting lagi, seperti Indonesia, India pun merasa khawatir mengenai tujuan jangka panjang politik luar negeri Cina.

Peranan Cina mengganggu kestabilan di Indocina, khususnya usahanya memberi "pelajaran" kepada Vietnam (1979) dan ancamannya untuk memberi pelajaran yang kedua sejak itu, dukungannya kepada para pemberontak Kampuchea dari Pemerintah Koalisi Kampuchea Demokratik (CGDK) melawan rezim Heng Samrin, khususnya persekutuannya yang erat dengan *Khmer Merah* pemusnah bangsa dan komponen koalisi itu, merupakan masalah-masalah di mana India dan Indonesia mempunyai persepsi yang serupa walaupun tidak identik. Indonesia merasa simpatik terhadap kelompok Sihanouk dan Son Sann, tetapi mencurigai *Khmer Merah*. Selanjutnya India berpendapat bahwa sementara Vietnam adalah pusat kekuatan di Asia Tenggara, ia tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hegemoni apa pun di kawasan karena faktor-faktor geostrategis. Indonesia sependapat. Hanya Muangthai merasa terancam karena berbatasan dengan Laos dan Kampuchea yang merupakan sekutu-sekutu Vietnam. Kekhawatiran Muangthai dapat dimengerti dan memang juga dirasakan oleh kelompok ASEAN. Apa pun faktor-faktor tradisional dan historis yang telah membentuk persepsi Muangthai terhadap Kampuchea dan sebaliknya, dewasa ini ketegangan-ketegangan telah timbul sebagian besar sebagai akibat terlibatnya Muangthai dalam sengketa Kampuchea dengan memberikan tempat-tempat perlindungan dan bantuan material kepada para pemberontak dengan dukungan Cina dan Amerika Serikat.

Dipandang dari segi ini, dapat dikatakan bahwa penyelesaian masalah Kampuchea bersama tindakan-tindakan untuk membangun kepercayaan oleh

negara-negara Indocina yang berpangkal pada perundingan dan persetujuan dengan Muangthai akan menciptakan kondisi yang perlu untuk menjamin keamanan Muangthai. Indonesia mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat ini. Akan tetapi sikapnya terhadap Vietnam, yang secara kualitatif berbeda dengan sikap Muangthai, Singapura, Pilipina dan lebih dekat dengan Malaysia, menunjukkan bahwa Indonesia juga percaya bahwa dalam jangka panjang keamanan regional hanya dapat dibangun berdasarkan persetujuan regional serta pembangunan saling kepercayaan, bukan dengan bantuan luar.

Masalah penting lain lagi yang telah menimbulkan kekhawatiran kedua negara berkenaan dengan kerjasama militer Cina-Amerika Serikat. Baik India maupun Indonesia, dengan cara yang berbeda, telah sampai pada kesimpulan bahwa boleh jadi Cina melihat perkembangan ini, dalam arti strategis, sebagai persetujuan Amerika Serikat yang tak diucapkan untuk mencapai tujuan regionalnya dengan kedok usaha melawan Soviet.

Dengan kata lain, terlepas dari kekhawatiran mengenai kegiatan negara-negara adikuasa itu, India dan Indonesia mempunyai persepsi yang sama mengenai tujuan dan maksud jangka panjang Cina yang merupakan negara tetangga dekat di kawasan ini. Akan tetapi, persepsi ini tidak menghalangi kedua negara ini mengadakan hubungan dengan Cina pada tingkat yang berbeda.

Ketujuh, persepsi kedua negara mengenai perkembangan di Asia Selatan, terutama mengenai peranan Soviet di Afghanistan, juga penting. Baik India maupun Indonesia menentang kehadiran militer negara asing, khususnya negara adikuasa, di suatu negara Non-Blok. Akan tetapi, titik berat kedua negara ini agak berbeda. India memandang masalah ini secara keseluruhan dengan memperhitungkan rangkaian sebab dan kejadian yang mengundang campur tangan Uni Soviet itu, dan banyak di antaranya berasal dari persepsi Uni Soviet mengenai aktivitas negara-negara lain. Pandangan Indonesia seperti disuarakan oleh media dan para pemimpinnya menunjukkan kritik dan keberatan-keberatan terhadap peranan Uni Soviet semata-mata. Namun, perlu dicatat bahwa apa pun isi penekanan masalah-masalah yang berkaitan dengan Afghanistan, sebagai anggota penting kelompok Non-Blok, kedua negara mendukung sebuah kerangka untuk mencari penyelesaian bagi masalah ini. Deklarasi politik yang telah disetujui KTT Non-Blok ke-7 di New Delhi pada bulan Maret tahun 1983 mendukung seruan Konperensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Non-Blok yang diadakan pada bulan Februari 1981. Sambil mengulangi pandangan ini para kepala negara atau pemerintah menyerukan suatu "penyelesaian politik atas dasar penarikan mundur pasukan-pasukan asing dan hormat sepenuhnya terhadap kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan teritorial dan status non-blok Afghanistan serta pelak-

sanaan sepenuhnya prinsip non-intervensi dan non-campur tangan. Mereka juga menegaskan kembali hak para pengungsi Afghanistan untuk kembali ke rumah mereka dengan selamat dan hormat Mereka menyerukan kepada semua negara untuk mengendalikan diri agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan itu serta mengambil langkah-langkah yang sedemikian rupa sehingga akan menciptakan kondisi yang menjurus pada hubungan yang stabil dan harmonis antara negara-negara kawasan itu."

IV

Mengenai hubungan bilateral antara kedua negara ini, interaksi dan rasa persaudaraan semakin meningkat sejak berdirinya Orde Baru di Indonesia. Hal itu mulai secara resmi ketika Menlu Adam Malik mengunjungi India bulan September 1966. Suatu dorongan kuat diberikan ketika PM India Ny. Indira Gandhi mengunjungi Indonesia pada bulan Juni-Juli 1969. Konsolidasi lebih lanjut diusahakan ketika Presiden Soeharto mengunjungi India bulan Desember 1980. Pertemuan Menteri Luar Negeri tahunan yang terus-menerus diadakan antara kedua negara ini telah memberikan suatu kerangka kelembagaan yang efektif untuk membicarakan masalah-masalah bilateral dan global.

Beberapa persetujuan penting telah dicapai kedua negara itu sejak tahun 1970-an. Karena bidang perdagangan India-Indonesia dibahas secara terpisah, di sini dapat dicatat perkembangan di bidang-bidang lainnya.

Sebuah Memorandum Pengertian (Memorandum of Understanding) mengenai kerjasama di bidang ekonomi dan teknik ditandatangani pada bulan Februari 1979 di New Delhi sebagai tindak lanjut dari kunjungan Biju Patnaik, Menteri Urusan Baja dan Pertambangan India, ke Indonesia sebelumnya. Suatu perjanjian kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditandatangani oleh kedua negara pada bulan Februari 1982 di Jakarta. Sebenarnya Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja telah mengatakan bahwa perjanjian itu "melambangkan kerjasama dalam kerangka kerjasama di bidang teknologi antara negara-negara berkembang untuk mempercepat terwujudnya tata ekonomi internasional baru." Mungkin perlu pula dikemukakan bahwa kedua negara telah mempunyai perjanjian mengenai kerjasama dalam bidang penggunaan tenaga atom secara damai.

Kejadian-kejadian penting pada tahun-tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kemajuan telah dicapai dalam interaksi (hubungan) bilateral. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan. Kendati adanya perjanjian-perjanjian semacam itu, pengetahuan dan pengertian satu sama lain an-

tara kedua negara mengenai lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan bidang-bidang pengambilan keputusan lain yang penting masih harus melintasi tahap tinggal landas. Alasan-alasan kecenderungan ini harus dilihat pada tidak adanya jalinan-jalinan bilateral banyak tingkat yang intensif dan luas. Membangun jalinan-jalinan semacam itu harus menjadi tugas kedua negara dalam bagian kedua dasawarsa 1980-an ini dengan maksud untuk memperkuat dan memajukan hubungan bilateral yang saling menguntungkan antara India dan Indonesia. Menyambut kedatangan Presiden Soeharto di India pada tanggal 1 Desember 1980, Presiden India waktu itu, Sanjeeva Reddy, menekankan pendekatan ini ketika ia mengatakan: "Kita akan tetap berusaha menemukan bidang-bidang kerjasama yang baru dan saling menguntungkan dan mengambil inisiatif untuk menyusun program-program baru di pelbagai lapangan sehingga hubungan kita yang meningkat dapat menjadi suatu model kerjasama antara negara-negara berkembang."

Hubungan Bilateral Indonesia-India*

Kirdi DIPOYUDO

Fokus perhatian ulasan ini adalah hubungan antara Indonesia dan India sekarang ini, akan tetapi untuk memahaminya lebih baik, kita juga harus kembali sebentar ke masa yang silam. Penulis mengusulkan untuk membahas secara singkat hubungan antara kedua negara itu di masa lampau untuk memberikan latar belakang kepada tema kita. Secara berturut-turut kita akan membahas tahap-tahap perkembangan hubungan antara Indonesia dan India dan menggariskan kemungkinan-kemungkinan hubungan mendatang mereka dalam rangka mendapatkan hasil-hasil yang saling menguntungkan.

ASAL MULA HUBUNGAN

Hubungan antara Indonesia dan India bermula pada abad ke-5 ketika pedagang-pedagang India datang di Indonesia untuk berdagang emas, kayu cendana dan rerempah dengan membawa kebudayaan dan agama mereka. Dalam proses itu mereka banyak mempengaruhi kehidupan sosial dan politik negeri baru tempat mereka menjalin hubungan. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Mataram di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh Hinduisme dan Budhisme. Karya-karya kepahlawanan Ramayana dan Mahabharata dengan mitologi dan filsafatnya menjadi bagian kehidupan rakyat.¹

Akan tetapi pembangunan negeri-negeri jajahan oleh negara-negara Barat di Asia pada abad ke-18 dan ke-19 memisahkan Indonesia dari India. Hu-

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Konperensi India-Indonesia IV, Jakarta, 19-21 Agustus 1985.

¹Lihat Robert Van Niel, "The Course of Indonesian History," dalam Ruth T. McVey (ed.), *Indonesia* (New Haven: Yale University Press, 1963), hal. 272-273.

hubungan antara mereka yang erat terputus. Indonesia menjadi jajahan Belanda dan India jatuh di bawah kekuasaan Inggris. Namun, jalinan antara kedua bangsa itu tidak pernah putus sama sekali. Kebudayaan India telah meninggalkan pengaruhnya yang besar dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Segi-segi tertentu kebudayaan India, termasuk kesusasteraan, mistik dan asketiknya, masih sangat dihargai oleh rakyat Jawa Tengah. Agama mereka adalah suatu sinkretisme antara Hinduisme, Budhisme dan Islam. Sejumlah orang Indonesia, khususnya di Pulau Bali, masih menganut agama Hindu. Semuanya itu merupakan peringatan hidup akan adanya interaksi antara Indonesia dan India sejak abad ke-5.²

HUBUNGAN DIBUKA KEMBALI

Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh Indonesia dan India sekitar empat dasawarsa yang lalu mendekatkan kembali kedua negara. Pergerakan nasionalis Indonesia sangat dipengaruhi perjuangan kemerdekaan India yang mulai lebih dahulu. Ir. Soekarno, salah seorang pemimpin nasionalis Indonesia dan Presiden Pertama Indonesia, pernah mengatakan bahwa penyair agung Tagore mengilhaminya sebagai seorang pemuda dalam pergerakan nasionalis dan bahwa Mahatma Gandhi telah meresapinya dengan keberanian keyakinan untuk meneruskan perjuangan sampai akhir logisnya, yaitu Indonesia Merdeka.³

Pemimpin-pemimpin baru Indonesia dan India bertekad untuk membarui hubungan yang putus akibat intervensi negara-negara kolonial. Dengan kesadaran baru memiliki latar belakang kebudayaan dan sejarah yang sama dan menderita penindasan dan pemerasan kolonial yang sama, pemimpin-pemimpin baru itu menunjukkan rasa solidaritas dan keinginan untuk saling membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang inheren dalam pembangunan negeri mereka masing-masing.⁴

Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, harus membela kemerdekaannya terhadap Belanda yang berusaha memulihkan kekuasaannya atas Indonesia dengan bantuan pasukan-pasukan Inggris yang ditugaskan untuk perlucutan senjata dan repatriasi

²Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965* (The Hague-Paris: Mouton, 1973), hal. 507-508.

³Lihat *Friendly Relations: Indonesia-India*, Special Issue No. 27, Kementerian Penerangan RI, 1958, hal. 7.

⁴Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 508.

pasukan-pasukan Jepang. Secara terang-terangan dan tegas India mendukung Indonesia dan menghimbau bangsa-bangsa lain untuk memberinya pengakuan internasional. Dalam suatu pidato pada 7 September 1946, hanya lima hari setelah pembentukan Pemerintah Sementara India, Nehru berkata: "Dengan perhatian dan kecemasan India mengikuti perjuangan bangsa Indonesia untuk kebebasan dan kepada mereka kita mengirimkan ucapan selamat kita."⁵

Pada Konperensi Hubungan Asia yang diadakan di New Delhi pada 23 Maret - 2 April 1947 dalam rangka solidaritas Asia, India menggunakan kesempatan itu untuk memperjuangkan kebebasan di Asia. Nehru mendukung perjuangan Indonesia dan menjadikannya suatu persoalan yang lebih luas dan minta perhatian bangsa-bangsa yang percaya akan kebebasan. Ketika menyambut delegasi Indonesia pimpinan Shahrir pada 1 April 1947, ia mengatakan bahwa Indonesia pada tahun-tahun belakangan memainkan suatu peranan penting dalam kejadian-kejadian di Asia dan dunia dan bahwa partisipasi Indonesia sangat penting bagi konperensi dan India.⁶

Ketika Belanda melancarkan aksi militernya pada 17 Juli 1947, India memberikan suatu reaksi yang tajam. Setelah mengadakan pembicaraan dengan Shahrir yang terbang ke New Delhi pada 22 Juli 1947, Nehru dengan tegas mengutuk aksi Belanda itu dengan mengatakan: "Tiada suatu negara Eropa, apa pun ia, yang boleh menempatkan tentaranya di Asia melawan bangsa Asia."⁷ Empat hari kemudian, India mengumumkan keputusannya untuk melarang penerbangan Belanda atas wilayahnya. Bersama Australia ia mengajukan persoalan Indonesia kepada PBB. Dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Nehru menegaskan bahwa aksi Belanda tersebut membahayakan perdamaian internasional dan oleh sebab itu ia menghimbau Dewan Keamanan agar mengambil tindakan-tindakan yang tepat.⁸

India juga mengecam aksi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda pada 18 Desember 1948 terhadap Indonesia, dan memprakarsai suatu langkah untuk menjadikan soal kemerdekaan Indonesia suatu persoalan bersama semua negara Asia dan masyarakat internasional. India menyelenggarakan suatu konperensi 18 bangsa mengenai Indonesia di New Delhi pada 20 Januari 1949. Konperensi ini menerima suatu resolusi yang mendesak agar segera di-

⁵Lihat Jawaharlal Nehru, *India' Foreign Policy. Selected Speeches, September 1946 - April 1961*, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1983, hal. 3.

⁶*Asian Relations, Being a Report of the Proceedings and Documentation of the First Asian Relations Conference, New Delhi, March-April 1947* (New Delhi: Asian Relations Organization, 1948), hal. 22 dan 79.

⁷Dikutip dari Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 32.

⁸*Security Council Official Records (1947)*, Supplement no. 16, Annexure 41, hal. 50.

adakan gencatan senjata, pasukan Belanda ditarik dan pemimpin-pemimpin Indonesia segera dibebaskan, dan minta kepada Dewan Keamanan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu.⁹ Negara-negara besar dan Dewan Keamanan memperhatikan resolusi itu dan mendesak agar diadakan perundingan untuk menyelesaikan sengketaanya, lagipula membentuk suatu komisi bagi Indonesia untuk membantu menyelesaikan perselisihan itu. Sebagai hasil usaha-usaha itu akhirnya suatu Konperensi Meja Bundar dibuka di Den Haag pada bulan Agustus 1949. Pada 1 November 1949 dicapai kata sepakat mengenai kemerdekaan Indonesia dan pada 27 Desember 1949 Belanda secara formal mengakui kedaulatan Indonesia.¹⁰

Hubungan Indonesia dan India itu selanjutnya menjadi lebih kokoh berkat pendekatan bersama mereka terhadap urusan-urusan dunia. Kedua negara itu bekerjasama sangat erat dalam soal-soal politik luar negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia dan India didasarkan atas asas non-blok dan bertemu dengan satu tujuan: memelihara perdamaian dunia dan menjauhkan diri dari kedua blok kekuatan dalam perang dingin. Eratnya kerjasama antara kedua negara pada waktu itu terungkap dalam penandatanganan Perjanjian Persahabatan bulan Maret 1951, yang menentukan suatu perdamaian abadi dan suatu persahabatan yang tak bisa diubah.¹¹

Pada 28 April - 2 Mei 1954, perdana menteri Indonesia, India, Birma, Sri Lanka dan Pakistan mengadakan pertemuan di Kolombo untuk menyatakan pandangan-pandangan kolektif mereka mengenai masalah-masalah waktu itu dan menghimbau negara-negara besar agar menciptakan perdamaian di Indocina. Mereka menyerukan gencatan senjata dan kemerdekaan negara-negara Indocina. Pada konperensi ini Indonesia mengajukan usul untuk mengadakan suatu konperensi negara-negara Asia dan Afrika yang lebih besar dalam rangka menyatakan kemauan kolektif negara-negara yang baru merdeka untuk ikut menangani urusan-urusan dunia. Konperensi membicarakan usul itu dan akhirnya mendukung suatu usul agar Perdana Menteri Indonesia menjajaki kemungkinan diadakannya konperensi semacam itu.¹² Dalam kunjungannya ke India bulan September 1954, PM Ali Sastroamidjojo mendapat dukungan PM Nehru. Secara demikian kedua perdana menteri itu memainkan peranan penting untuk diadakannya Konperensi Asia-Afrika di Bandung bulan April 1955.¹³

⁹Lihat G.H. Jansen, *Nonalignment and the Afro-Asian States* (New York: Praeger, 1966), hal. 89.

¹⁰Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*; hal. 59, 67-70.

¹¹*Ibid.*, hal. 508-509.

¹²Lihat G.H. Jansen, *op. cit.*, hal. 414.

¹³Lihat Roeslan Abdulgani, *The Bandung Connection. Konperensi Asia-Afrika di Bandung Tahun 1955* (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hal. 19; dan *Foreign Policy of India: Texts and Documents 1947-1959* (New Delhi, 1959), hal. 117.

Konperensi Bandung itu sendiri yang dihadiri 29 negara Asia dan Afrika, merupakan pernyataan sikap merdeka mereka di antara bangsa-bangsa dunia maupun suatu demonstrasi solidaritas dan keinginan mereka akan perdamaian dunia. Pada pembukaan Presiden Soekarno memperjuangkan penghapusan kolonialisme, sedangkan PM Nehru mengatakan pada sidang penutupan bahwa: "Kalau ada sesuatu yang ingin dikatakan Asia kepada mereka itu ialah: di masa mendatang tidak akan ada pendiktean; tiada "yes-men" di Asia ... atau di Afrika."¹⁴

Hubungan antara Indonesia dan India juga diperkuat oleh kerjasama bilateral antara mereka, khususnya di bidang angkatan bersenjata. India memberikan bantuan di bidang ini kepada Indonesia dan menyumbang pada peningkatan keahlian teknis personal angkatan-angkatan, khususnya angkatan udara.¹⁵

Kemauan baik India untuk Indonesia juga ditunjukkan pada waktu Indonesia diancam Pemberontakan Permesta pada tahun 1958. India menunjukkan simpatinya dengan usaha Indonesia untuk memelihara persatuan-nya.¹⁶

Untuk meringkas, hubungan antara Indonesia dan India pada dasawarsa 1950-an berkembang secara berangsur-angsur menjadi kerjasama berdasarkan kemauan baik satu sama lain. Ini diperkuat oleh pendekatan bersama terhadap soal-soal internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

HUBUNGAN MENJADI DINGIN

Berlawanan dengan harapan, pada tahun 1960-an hubungan antara Indonesia dan India menjadi dingin sebagai akibat berbagai faktor yang menjurus pada sederetan salah paham. Salah satu faktor penting perubahan ini adalah berubahnya persepsi prioritas-prioritas di Indonesia.

Di bawah "demokrasi terpimpin" yang dilaksanakan Presiden Soekarno, politik luar negeri Indonesia mendapat suatu tekanan baru dan suatu sifat yang berlainan. Cirinya adalah perjuangan militan melawan kolonialisme dan

¹⁴Untuk pidato Nehru lihat appendix dalam George McTurnan Kahin, *The Asian-African Conference* (Ithaca, N.Y., 1956), hal. 73.

¹⁵Lihat K.N. Ramachandran, "India-Indonesia Relations," dalam K. Subrahmanyam (ed.), *Self-Reliance and National Resilience* (New Delhi, 1975), hal. 145-146.

¹⁶*Ibid.*, hal. 146-147.

imperialisme dengan maksud agar Indonesia tampil sebagai pemimpin negara-negara Non-Blok dan secara demikian mendapat reputasi di dunia. Mengenai hal ini Presiden Soekarno berkata: "Juga dalam hubungan antara Republik dan dunia luar kita tetap berpegang teguh pada semangat Revolusi, yaitu untuk menghimpun segala kekuatan nasional dan internasional guna bertempur melawan dan akhirnya menghancurkan imperialisme dan kolonialisme, di mana pun mereka berada dan dalam bentuk apa pun mereka. Khususnya kita meletakkan tekanan atas perjuangan untuk membebaskan Irian Barat, karena di Irian Barat imperialisme-kolonialisme itu bercokol dalam daging dan darah kita sendiri."¹⁷

Presiden Soekarno memperkenalkan pandangan barunya mengenai urusan dunia dan kedudukan bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam pidatonya dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960. Ia mendesak bangsa-bangsa yang baru merdeka untuk membangun dunia kembali karena pada hematnya: "Kita hidup, kita semua, dan di mana pun di dunia, di zaman pembangunan bangsa-bangsa dan buyarnya imperia. Ini adalah era bangsa-bangsa yang bangkit dan pergolakan nasionalisme."¹⁸ Pidatonya dijiwai tekad untuk memimpin pertarungan melawan imperialisme dan kolonialisme dan secara demikian menjadi pemimpin bangsa-bangsa yang baru muncul dalam perjuangan mereka untuk suatu dunia baru berdasarkan kebebasan, perdamaian dan keadilan sosial.¹⁹

Kebijaksanaan luar negeri yang baru itu diperjuangkan secara terang-terangan pada Konperensi Non-Blok di Beograd bulan September 1961. Gagasan "new emerging forces" sebagai lawan "old established forces" itu menjadi fokus utama pidato-pidato Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa sifat antitetis kedua kekuatan itu akan menjurus pada suatu pertarungan yang tak terelakkan antara mereka, yang akhirnya akan menghasilkan kemenangan "new emerging forces."²⁰

Pada konperensi ini perpecahan antara Indonesia dan India muncul ke permukaan untuk pertama kalinya. Karena obsesinya dengan perjuangan kemerdekaan dan keadilan bangsa-bangsa yang baru merdeka melawan dominasi negara-negara mapan yang lama, Presiden Soekarno sangat sakit hati ketika PM Nehru dalam pidatonya meremehkan bahaya kolonialisme dan menekankan sebagai kewajiban pertama konperensi menciptakan iklim yang

¹⁷Soekarno, *Toward Freedom and the Dignity of Man. A Collection of Five Speeches by President Sukarno* (Jakarta: Department of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, 1961), hal. 106.

¹⁸*Ibid.*, hal. 123.

¹⁹Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 287.

²⁰*Ibid.*, hal. 314.

tepat dan baik untuk memungkinkan kedua negara adidaya untuk berunding dalam rangka mencegah perang dan meredakan ketegangan. Ia menganggap pernyataan Nehru itu sebagai penolakan terhadap tesisnya mengenai fungsi negara-negara Non-Blok.²¹ Akan tetapi perbedaan antara kedua pemimpin itu tidak substansial sifatnya, melainkan soal prioritas saja.

Di samping perbedaan-perbedaan itu terdapat banyak faktor di bawahnya yang mengganggu hubungan antara mereka. Usaha Nehru dalam Konperensi Bandung 1955 untuk tampil sebagai pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika dan sikap paternalistisnya merasa lebih tahu daripada lain-lain sangat tidak disenangi oleh banyak peserta dan khususnya Indonesia. Kemudian, ketika Presiden Soekarno memberikan bentuk baru kepada politik luar negeri Indonesia, maksud utamanya ialah menegaskan peranan Indonesia dalam urusan-urusan dunia dan mengincar kepemimpinan negara-negara Asia-Afrika. Itulah sebabnya mengapa ia secara persisten berusaha mengadakan suatu konperensi Asia-Afrika yang kedua. Tetapi gagasan itu sejak lama ditentang dan lawan terbesarnya ialah PM Nehru, yang tidak melihat gunanya mengadakan konperensi sebesar itu dan hanya meramalkan terjadinya perbedaan pendapat antara negara-negara peserta yang akan merugikan persatuan Asia-Afrika yang telah lemah. Presiden Soekarno sangat tersinggung oleh sikap PM Nehru itu, dan sejak itu hubungan antara kedua pemimpin itu menjadi semakin dingin.²²

Dengan demikian Konperensi Beograd dapat dipandang sebagai awal memburuknya hubungan antara Indonesia dan India. Sesudah bentrokan terbuka antara Soekarno dan Nehru itu, kedua negara kehilangan keeratannya hubungan tahun 1950-an. Perpecahan antara mereka muncul ke permukaan secara tragis sesudah agresi Cina terhadap India bulan september 1962. Keraguan Indonesia untuk mengutuk agresi Cina yang terang-terangan itu merupakan pengukuhan sikap Indonesia terhadap India. Indonesia tampak tak bersedia mengorbankan hubungannya yang berkembang dengan Cina untuk memihak India hanya karena India terjalin sangat erat dengan dirinya secara kultural sejak abad ke-5, dan juga tidak karena India selalu mendukung Indonesia selama perjuangan kemerdekaannya melawan usaha Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonialnya.²³

Perbedaan pendapat yang lebih tajam antara Indonesia dan India muncul mengenai persoalan Malaysia ketika Indonesia melancarkan politik konfrontasinya terhadap negara ini. Tetapi India mengakui Malaysia sejak saat

²¹*Ibid.*, hal. 332.

²²*Ibid.*, hal. 334-335.

²³*Ibid.*, hal. 517.

proklamasinya dan menjadi pembelanya. Sebagai akibatnya, hubungan Indonesia-India menjadi lebih buruk lagi.²⁴

Suatu bahan percekcoakan lain adalah gagasan mengadakan konperensi Asia-Afrika kedua. Presiden Soekarno sejak lama menyerukan diadakannya konperensi semacam itu. Konperensi Afro-Asia yang pertama di Bandung mendatangkan nama harum dan prestise bagi Indonesia dan dapat dipandang sebagai titik permulaan peranan aktif Indonesia dalam urusan dunia. Presiden Soekarno bertekad untuk menyelenggarakan konperensi kedua dan dengan maksud itu menggunakan segala kesempatan untuk membujuk negara-negara Asia dan Afrika agar mendukung gagasannya mengenai konperensi Bandung kedua. Pada tahun 1957, ketika masalah Irian Barat ditolak untuk dibicarakan oleh Majelis Umum PBB, ia menyatakan dalam pidato Hari Kemerdekaannya bahwa konperensi Afro-Asia yang kedua harus diadakan untuk mencari dukungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika bagi tuntutan Indonesia atas Irian Barat yang masih diperintah oleh Belanda. Sejak 1960 himbauannya untuk mengadakan konperensi semacam itu menjadi semakin kuat. Ia memperkenalkan doktrin politik luar negerinya yang baru mengenai adanya kontradiksi antara "new emerging forces" dan "old established forces," dan ia merasa bahwa melalui suatu konperensi Afro-Asia ia bisa berhasil mendapatkan penerimaan yang lebih luas bagi doktrinnya mengenai kebijaksanaan luar negeri yang anti-kolonialis dan anti-imperialis. Pada awal 1963, perjuangannya untuk mengadakan konperensi Afro-Asia yang kedua telah menjadi suatu keharusan baginya sehubungan dengan politik konfrontasi dengan Malaysia.²⁵

Sesudah Perang Cina-India tahun 1962, Cina mendukung diadakannya konperensi semacam itu karena ingin mempengaruhi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Dengan maksud itu PM Chou En-lai mengadakan suatu kunjungan keliling di Afrika pada bulan Desember 1963 untuk mempropagandakan gagasan suatu konperensi Afro-Asia yang kedua dan membujuk negara-negara yang dikunjunginya itu agar mendukung Cina sebagai imbalan bantuan ekonomi dan teknik. Pada tahun 1962 Pakistan pun telah muncul sebagai pendukung gagasan konperensi Afro-Asia yang kedua. Negara ini memandang suplai senjata Barat kepada India menyusul perang Cina-India sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanannya. Oleh sebab itu Pakistan berusaha menjalin hubungan baik dengan Cina. Dengan demikian, ketika tahun 1963 berakhir, Cina dan Pakistan telah bergabung dengan Indonesia.²⁶

²⁴Lihat K.N. Ramachandran, *loc. cit.*, hal. 159-160.

²⁵Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 519.

²⁶*Ibid.*, hal. 520.

Di lain pihak, PM Nehru muncul sebagai lawan yang paling gigih terhadap diadakannya konperensi semacam itu. Ia menentang gagasan itu secara terang-terangan dan tegas sampai ia meninggal bulan Mei 1965, sehingga hubungan antara Indonesia dan India menjadi lebih tegang dan Indonesia terasing sama sekali. Presiden Soekarno tidak pernah mengampuni PM Nehru yang telah menghalang-halangi gagasannya untuk mengadakan konperensi Afro-Asia yang kedua dan sangat tidak senang dengan usaha Nehru untuk membujuk negara-negara lain, khususnya Mesir, agar menggagalkan rencana politiknya. Dalam kenyataan, perlawanan ini adalah alasan pokok membukanya hubungan Indonesia dengan India.²⁷

Untuk menghentikan prakarsa Indonesia, Cina dan Pakistan itu, India dan Mesir memperjuangkan diadakannya konperensi Non-Blok yang kedua sebelum konperensi Afro-Asia. Sebagai hasilnya Srilangka dipilih sebagai negara sponsor suatu pertemuan persiapan duta-duta besar negara-negara Non-Blok yang akan diadakan di Kolombo bulan Maret 1964 untuk mempertimbangkan kemungkinan mengadakan konperensi Non-Blok yang kedua. Pertemuan ini memutuskan bahwa konperensi itu benar-benar akan diadakan di Kairo paling lambat bulan Oktober tahun itu. Tetapi pertemuan itu juga terpaksa menerima suatu kompromi dengan memutuskan bahwa konperensi Non-Blok ini tidak menghalang-halangi diadakannya konperensi Afro-Asia yang kedua. Disetujui bahwa pada awal April 1964 akan diadakan pertemuan tingkat menteri di Jakarta sebagai persiapan bagi konperensi Afro-Asia yang kedua itu.

Pada pertemuan para menteri negara-negara Asia dan Afrika yang berlangsung pada 10-15 April 1964, Indonesia, Cina dan Pakistan bentrok dengan India dalam setiap persoalan. India hampir sendirian membela pandangannya, tetapi mencapai suatu kemenangan ganda. India mengajukan sebuah usul yang menjamin bahwa konperensi Afro-Asia yang kedua tidak akan mendahului konperensi Non-Blok yang kedua, dan pada waktu yang sama ia menggagalkan maksud Indonesia untuk menjadi tuan rumah konperensi Afro-Asia lagi. Akan tetapi kemenangan ini hanya memperlebar perpecahan Indonesia-India. Indonesia juga tidak senang dengan perjuangan India untuk menempatkan Malaysia pada daftar undangan pada waktu politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia mencapai puncaknya.

Konperensi Afro-Asia yang kedua akan diadakan di Algiers bulan Maret 1965, tetapi karena persiapannya tidak dapat diselesaikan pada tanggal itu, ia ditunda sampai 29 Juni. Penundaan ini akan mempunyai akibat fatal bagi hari depan pertemuan Afro-Asia. Pada 19 Juni Presiden Ben Bella disingkirkan

²⁷*Ibid.*, hal. 523.

oleh suatu kudeta militer dan digantikan suatu dewan revolusi di bawah Kolonel Boumedienne. Perkembangan ini membantu negara-negara yang tidak menghendaki bahwa pertemuan puncak itu akan mencapai sasaran-sasarannya. Sebagai akibatnya, konperensi ditunda lagi sampai 5 November 1965, tetapi kebanyakan delegasi merasa bahwa konperensi itu tidak akan diadakan dan sejarah membuktikan bahwa mereka benar. Tidak pernah ada konperensi puncak Afro-Asia yang kedua.

Penundaan itu merupakan suatu pukulan hebat bagi para pendukung konperensi, khususnya Indonesia. Presiden Soekarno mempunyai alasan-alasan lain untuk mendesak agar konperensi diadakan sedini mungkin. Selain maksudnya untuk mendapatkan dukungan untuk memencilkan Malaysia dari negara-negara Asia dan Afrika, kenyataan bahwa Indonesia keluar dari PBB pada bulan Januari 1965 mendorongnya untuk mempercepat pelaksanaan gagasannya mengadakan suatu konperensi "the new emerging forces" (Conefo) yang telah diumumkannya dalam pidato Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1963.²⁸ Dalam hal ini ia mendapat dukungan penuh dari Cina yang bertekad untuk menjadi ko-sponsor konperensi yang dimaksud sebagai suatu tandingan PBB itu di mana Cina dan Indonesia akan memainkan peranan dominan.

Adalah maksud Presiden Soekarno mendapatkan dukungan konperensi Afro-Asia yang kedua di Algiers itu bagi gagasannya mengadakan Konperensi "New Emerging Forces" pada bulan Agustus 1966. Kalau gagasan ini diterima, Soekarno akan mendapat dukungan moral mayoritas bangsa Asia-Afrika, dan ia akan dapat mengatakan bahwa konsepsinya adalah ungkapan kemauan lebih dari 1.400 juta orang, lebih dari separuh penduduk dunia. Dengan demikian taruhan Presiden Soekarno tinggi sekali sehingga ia bekerja keras agar konperensi Afro-Asia yang kedua itu diadakan pada waktunya.

HUBUNGAN BAIK LAGI

Dengan munculnya Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto pada bulan Maret 1966, terjadi beberapa perubahan penting dalam politik luar negeri Indonesia. Kalau kebijaksanaan luar negeri Presiden Soekarno menyimpang dari asas Non-Blok dan bersekutu dengan Cina komunis, Pemerintah Orde Baru langsung menekankan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi di dalam negeri dan asas Non-Blok dalam kebijaksanaan luar negeri.

Akan tetapi perkembangan ini tak lain ialah suatu gerak kembali ke pokok-pokok kebijaksanaan luar negeri Indonesia. Sejak Proklamasi Ke-

²⁸*Ibid.*, hal. 534.

merdeka, Indonesia bertekad untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Rumusan ini dianggap sebagai doktrin landasan politik luar negeri Indonesia yang tak berubah-ubah karena berakar pada Pembukaan UUD yang menetapkan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan," dan bahwa Indonesia akan "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Dengan berkembangnya persekutuan-persekutuan perang dingin pada tahun-tahun berikutnya, ketentuan itu diartikan bahwa Indonesia harus tetap merdeka dari blok-blok kekuatan yang bersaing dan tidak memihak.

Pemerintah Orde Baru berusaha memperbaiki penyimpangan-penyimpangan di bawah Orde Lama dari kebijaksanaan semula itu dan menganutnya kembali. Pernyataan pokoknya terdapat dalam Ketetapan MPRS mengenai politik luar negeri No. XII/MPRS/1966. Sambil mengukuhkan kembali perlawanannya terhadap imperialisme dan kolonialisme, dan mendesak agar usaha-usaha untuk memajukan solidaritas Afro-Asia diteruskan, MPRS menjunjung tinggi asas koeksistensi damai dan kebijaksanaan bertetangga baik, dengan menegaskan bahwa Indonesia selalu ingin bersahabat dengan semua bangsa. Indonesia hendaknya juga menjalin hubungan ekonomi demi kepentingan nasionalnya. Bantuan dan pinjaman luar negeri dicari, tetapi hanya sebagai pelengkap. Demi kepentingan nasionalnya Indonesia hendaknya juga mengambil bagian lagi dalam kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi internasional dan dalam perjuangan untuk memperbaiki Piagam PBB sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru di dunia.

Ketetapan ini menempatkan tekanan pada rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan itu ditandaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus diarahkan untuk mendapatkan dana dan keahlian yang diperlukan dari luar negeri. Ini berarti bahwa salah satu tugas pokok kebijaksanaan luar negeri Indonesia adalah mendapatkan pinjaman dari pemerintah kepada pemerintah dan menarik investasi asing dalam rangka penggalian dan pengolahan sumber-sumber daya alam negeri dan menggalakkan perdagangan luar negeri.

Mengikuti pedoman-pedoman itu, Indonesia segera meninggalkan politik ganyang Malaysia dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya, dan dalam proses itu lahirlah ASEAN. Indonesia juga kembali ke gerakan Non-Blok yang murni dan melepaskan persekutuannya dengan RRC. Selanjutnya ia menghentikan proyek Conefo-nya dan kembali menduduki kursinya di PBB. Bersamaan dengan itu ia merundingkan penjadwalan kembali hutang-hutangnya dan perjanjian-perjanjian bantuan baru dengan para

kreditor Baratnya, serta berusaha menarik investasi asing. Sebagai hasilnya, dana-dana yang diperlukan untuk membiayai rehabilitasi perekonomiannya dan pembangunannya, khususnya di bidang ekonomi, mulai mengalir dalam jumlah-jumlah yang semakin besar.²⁹

Dengan berubahnya persepsi mengenai prioritas-prioritas nasional itu, politik luar negeri Indonesia mengambil "low profile" dalam arti bahwa ia tidak lagi di garis depan dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya sekarang, ia menekankan kerjasama dan bukannya konfrontasi, dan dalam forum-forum internasional ia mengambil sikap yang moderat. Berbicara pada 4 April 1966, Menteri Luar Negeri baru Adam Malik menekankan tema kerjasama dengan semua negara.

Khususnya mengenai hubungan dengan India, Adam Malik menegaskan di depan Parlemen pada 5 Mei 1966: "Khususnya mengenai India, Pemerintah bermaksud memperlancar hubungan dengan India dan meninjau kembali hubungan Indonesia dengan negara itu." Lebih lanjut ia mengatakan: "Kita tidak boleh lupa bahwa India adalah salah satu negara penting dalam politik internasional, khususnya dalam politik Afro-Asia dan Non-Blok."³⁰ India menyambut baik perkembangan ini. Berbicara dalam Rajya Sabha pada 8 Agustus 1966, Menteri Luar Negeri India Swaran Singh mengatakan bahwa dengan senang hati ia mencatat usaha Pemerintah Indonesia yang baru untuk memperbaiki hubungan dengan India.³¹

Sejak itu hubungan antara Indonesia dan India menjadi lebih baik. Proses ini dipermudah kenyataan bahwa Indonesia dan India memiliki banyak persamaan. Politik luar negeri kedua negara itu didasarkan atas asas-asas non-blok dan mempunyai tujuan yang sama: memelihara perdamaian dunia dan membangun suatu tata dunia baru di mana negara-negara berkembang dan non-blok ikut menyelesaikan masalah-masalah dunia berdasarkan persamaan dan keuntungan bersama dengan negara-negara maju.

Semakin baiknya hubungan itu terungkap dan ditunjang oleh pertukaran kunjungan para pemimpin dan pejabat kedua negara secara teratur. Bulan September 1966, Adam Malik mengadakan kunjungan ke India. Kunjungan ini mempunyai arti penting dan menandai membaiknya hubungan antara In-

²⁹Lihat Franklin Weinstein, *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Sukarno to Soeharto* (Ithaca-London, 1967), hal. 171; lihat juga Ruslan Abdulgani, *Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy*, Address on 14 August 1972 before the Annual Meeting of The Australian Institute of International Affairs, Dyason House, Melbourne.

³⁰Lihat *Indonesia's Foreign Policy Based on Pantja Sila Principles* (Jakarta, 1966), hal. 4-5, 13-14.

³¹*Ibid.*

donesia dan India. Ia mengadakan pembicaraan dengan PM Indira Gandhi dan pemimpin-pemimpin India lain dalam suasana keramahan dan saling pengertian. Mereka mencapai kata sepakat untuk mengaktifkan kembali delegasi-delegasi kebudayaan dan membuka kembali kerjasama di berbagai bidang. Mereka mengukuhkan kembali kepercayaan mereka akan asas-asas non-blok sebagai alat untuk mencegah timbulnya peperangan, memelihara dan memperkuat perdamaian internasional dan mengembangkan kerjasama internasional.³² Menteri Luar Negeri India mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia pada bulan Januari 1967 dan mengadakan pembicaraan panjang lebar dengan rekan Indonèsianya. Mereka menekankan perlunya meneruskan usaha memperkuat hubungan bilateral di bidang ekonomi dan teknologi. Mereka juga sepakat untuk mengadakan kontak-kontak tingkat menteri setiap tahun dalam rangka pertukaran pandangan mengenai masalah-masalah dunia dan menilai kemajuan yang dicapai dalam usaha memperkuat hubungan bilateral.³³

Bulan Juni 1969 PM Indira Gandhi mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Pers Indonesia menyambut baik kunjungan ini dan mengatakan bahwa persahabatan yang kokoh antara kedua negara besar Asia itu adalah vital bagi perdamaian dan kestabilan dunia. Kunjungan ini memungkinkan kedua negara untuk sampai pada suatu pendekatan bersama terhadap masalah-masalah regional dan global. Ny. Gandhi dan Presiden Soeharto mengukuhkan kembali kepercayaan mereka akan sikap non-blok dan koeksistensi damai antara bangsa-bangsa.³⁴

Bulan Mei 1975, Indonesia mendapat kehormatan kunjungan Presiden Fakuruddin Ali Ahmad. Pada kesempatan ini Presiden India itu mengatakan bahwa ruang lingkup interaksi antara Indonesia dan India luas dan bahwa ia percaya usaha kedua negara untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang spesifik akan mendatangkan hasil-hasil yang positif. Di pihak lain Presiden Soeharto mengatakan bahwa wajarlah kalau India dan Indonesia sebagai tokoh konperensi Afro-Asia yang pertama memperkuat lagi Semangat Bandung. Ia menyebutkan abad-abad jalinan kebudayaan, gagasan-gagasan mulia dan bantuan berharga India bagi kemerdekaan Indonesia.³⁵

Di bawah Pemerintah Janata pun India sampai batas-batas tertentu berhasil memperluas hubungan India dengan negara-negara ASEAN dan khusus-

³²*Asian Recorder* 1966, hal. 7312-7313.

³³Lihat *Foreign Affairs Record*, Ministry of Foreign Affairs, Government of India, January 1967, hal. 6.

³⁴Lihat joint communique dalam *Foreign Affairs Record*, August 1969, hal. 139-140.

³⁵Lihat *Antara*, 27 Mei 1975 A; dan *Suara Karya*, 28 Mei 1975.

nya dengan Indonesia. Dalam kunjungannya ke India bulan November 1978, Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa ASEAN juga mulai menganggap penting kerjasama dengan India. Ia menceritakan bahwa keinginan India untuk mempunyai hubungan yang lebih erat dengan ASEAN disambut dengan baik oleh negara-negara yang bersangkutan.³⁶

Bulan Desember 1980 Presiden Soeharto mengadakan suatu kunjungan kenegaraan ke India dengan maksud untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan dan saling pengertian yang telah ada antara Indonesia dan India dan untuk bertukar pandangan mengenai soal-soal internasional. Setibanya di New Delhi ia berkata: "Bagi kami India bukan hanya suatu bangsa yang mewaris suatu sejarah dan kebudayaan yang sangat beradab yang menjalin hubungan dengan Indonesia banyak abad yang lalu. Bagi kami India adalah sahabat, sahabat karib kami. Sebagai sahabat, sebagai kawan seperjuangan dan sebagai sesama anggota gerakan Non-Blok, kedua negara kita harus meningkatkan kerjasama kita bagi kemajuan dunia." Ia mengadakan pembicaraan panjang lebar dengan PM Indira Gandhi mengenai masalah-masalah internasional dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa negara-negara Non-Blok dan berkembang harus bekerjasama untuk meredakan situasi ketegangan yang diciptakan persaingan dan konfrontasi negara besar khususnya di kawasan Asia.³⁷

Pada bulan September 1981, PM Indira Gandhi mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia dengan maksud untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara India dan Indonesia dan untuk bertukar pandangan mengenai masalah-masalah bilateral, regional dan global dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Dengan Presiden Soeharto ia membicarakan soal-soal bilateral dengan maksud untuk menambahkan kerjasama politik dan ekonomi yang lebih luas pada ikatan kebudayaan yang telah berabad-abad antara kedua negara.³⁸

Kejadian-kejadian itu menunjukkan bahwa hubungan hangat di masa lampau antara Indonesia dan India telah dipulihkan. Sejak 1969 hanya muncul beberapa persoalan yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara. Yang pertama adalah sikap India terhadap konperensi yang diadakan di Jakarta pada bulan Mei 1970 untuk membahas masalah Kamboja, yang kedua dukungan India untuk gerakan kemerdekaan di Bangladesh tahun 1971. Persoalan yang ketiga adalah pengakuan India bagi Pemerintah Heng Samrin di Kampuchea. Akan tetapi persoalan-persoalan itu tidak merusak hubungan erat yang dijalin sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia.

³⁶Lihat *Antara*, 15 November 1978 B.

³⁷Lihat *Kompas*, 5 Desember 1980; lihat juga S.S. Battacharya, "India-Indonesia Relations," dalam *Strategic Analysis* (Delhi), Februari 1981.

³⁸Lihat *Kompas*, 25 September 1981.

Hubungan antara Indonesia dan India meliputi kerjasama ekonomi dalam bentuk perdagangan, pinjaman dan usaha patungan. Ketika Adam Malik mengunjungi India pada tahun 1966, sifat mendesak dan arti pentingnya kerjasama ekonomi antara kedua negara digarisbawahi. India memberikan pinjaman sebanyak Rs 100 juta kepada Indonesia untuk membeli barang-barang India. Bulan Desember 1966 Indonesia mengadakan perundingan dengan suatu delegasi dagang India dan sebagai hasilnya ditandatangani suatu persetujuan dagang.

Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan India itu mendapatkan suatu momentum baru dengan ditandatanganinya suatu persetujuan lain mengenai kerjasama ekonomi yang lebih luas pada 15 Februari 1979. Ini meliputi pembelian 2 juta ton pelet bijih besi India untuk jangka waktu yang panjang. Diusulkan agar dibentuk suatu satuan tugas untuk merinci kerjasama ekonomi di bidang metal non-besi, industri engineering termasuk pembuatan mesin dan alat-alat mesin, tenaga listrik, pengangkutan, eksplorasi geologi, semen, industri gula, pendirian pusat-pusat latihan untuk mengembangkan tenaga kerja yang diperlukan, dan koperasi pedesaan dengan tekanan pada pengembangan produksi dan pengolahan susu sapi.

Dalam kunjungan Presiden Soeharto ke India pada tahun 1980, segi ekonomi hubungan Indonesia-India juga dibahas secara lebih terinci. Kedua negara sepakat untuk menyelidiki kemungkinan diversifikasi dan perluasan hubungan dagang. Ketika PM Indira Gandhi mengunjungi Indonesia tahun 1981, kemungkinan memperluas kerjasama ekonomi bilateral juga dibicarakan. Namun sejauh ini kerjasama ekonomi antara Indonesia dan India masih jauh dari optimal.

Pada tahun 1980 ekspor Indonesia ke India adalah seharga US\$45,8 juta. Ekspor ini terdiri atas rempah-rempah, kertas dan papan kertas, minyak kelapa sawit dan minyak lain, bahan kimia, semen, pupuk buatan dan lain-lain. Impor Indonesia dari India pada tahun 1982 adalah seharga US\$225,57 juta dan meliputi mesin pembangkit listrik, mesin listrik, kaca, balok besi dan baja, tekstil, gula, beras, bahan kimia, alat-alat medis dan lain-lain. Pada tahun 1984 impor Indonesia dari India adalah seharga US\$55,23 juta dan ekspornya ke India US\$38,05 juta.³⁹

Di bidang usaha patungan, sejumlah proyek telah disetujui, sebagian besar sudah dilaksanakan, sedangkan lain-lain masih dalam pertimbangan. Usaha-usaha patungan itu adalah di bidang tekstil, obat-obatan, pabrik baja, bubur

³⁹Lihat *Ekspor 1980* dan *Ekspor 1984*, yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1981 dan 1985. Untuk impor Indonesia dari India pada tahun 1982 dan 1984 lihat *Impor 1982* dan *Impor 1984*, yang diterbitkan Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1983 dan 1985.

kertas, minyak goreng dan lain-lain. Bulan Januari 1981, Project Trading Corporation of India (PEC), suatu filial State Trading Corporation of India, memenangkan suatu kontrak untuk membangun suatu pabrik semen di Indonesia.⁴⁰

KESIMPULAN

Dalam periode sesudah normalisasi hubungan antara Indonesia dan India pada tahun 1966, telah dicapai beberapa kemajuan. Hubungan menjadi lebih baik, tetapi juga ada kegagalan-kegagalan yang perlu ditinjau kembali. Hubungan antara kedua negara dewasa ini adalah baik dan bersahabat, tetapi belum seperti seharusnya. Hubungan dan kerjasama itu dapat ditingkatkan, khususnya di bidang ekonomi. Juga harus diakui bahwa kedua bangsa tidak banyak saling mengenal, biarpun mempunyai tradisi budaya besar yang sama dan mempunyai banyak persamaan. Karena itu, Indonesia maupun India hendaknya menaruh perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan mereka satu sama lain. Di Indonesia studi India harus digalakkan dan di India studi Indonesia.

Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan kenyataan kehidupan, bahwa hubungan antarbangsa untuk sebagian besar akan ditentukan oleh persepsi kepentingan dan prioritas-prioritas nasional masing-masing negara. Dengan demikian, gesekan antara bangsa-bangsa bisa terjadi berulang kali. Tidaklah realistis untuk mengharapkan bahwa hubungan Indonesia-India di masa depan akan bebas dari ketegangan atau pasang-surut. Yang dapat dan harus kita lakukan ialah menjamin agar hubungan bilateral kita begitu kokoh sehingga mampu menghadapi ketegangan-ketegangan akibat pergeseran aliran-aliran percaturan politik dunia.

⁴⁰Lihat *Merdeka*, 30 November 1984; lihat juga S.S. Battacharyar, *loc. cit.*; dan Thee Kian-Wie, "Indonesia as a Host Country to Indian Joint Ventures," dalam *Multinationals from Developing Countries*, hal. 133-144.

Kawasan Asia Tenggara dan Negara-negara Besar: Praktek Ambivalensi ASEAN*

J. Soedjati DJIWANDONO

Kendati nama, aspirasi-aspirasi dan pretensi-pretensinya seperti tercermin pada nama itu sendiri, ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tidak memonopoli atau mewakili seluruh kawasan Asia Tenggara. Kecuali Birma, yang telah memilih untuk tidak memasuki suatu perhimpunan khusus dengan dunia luar, kawasan Asia Tenggara, karena keadaan kalau tidak dengan sengaja, dewasa ini dan praktis terbagi antara ASEAN di satu pihak dan kelompok negara Indocina di lain pihak. Polarisasi itu merupakan suatu kenyataan kehidupan di Asia Tenggara dewasa ini tidak peduli preferensi orang.

Asas-asas di bawah masing-masing dari kedua pengelompokan ini adalah, tak perlu dikatakan, berbeda. Dan perbedaan ini saja tanpa penyelidikan kita dalam persoalannya dalam diskusi ini, pasti akan menghasilkan bermacam-macam asosiasi atau hubungan yang dipertahankan masing-masing kelompok negara dengan negara-negara besar yang masing-masing pantas diselidiki karena dirinya sendiri.

Memang, perkembangan-perkembangan di masing-masing dari kedua pengelompokan negara ini adalah begitu rupa sehingga sementara semua negara di kedua pengelompokan itu kiranya mengklaim sebagai bagian Asia Tenggara, walaupun kawasannya itu sendiri tak dapat dibatasi secara saksama, masing-masing dari kedua kelompok negara itu bisa dianggap sebagai suatu "kawasan" tersendiri.¹ Dengan demikian rupanya kini lazim menemukan suatu sebutan "Kawasan ASEAN."

*Terjemahan makalah "The Southeast Asian Region and the Major Powers: ASEAN's Exercise of Ambivalence," yang dibawakan oleh J. Soedjati DJIWANDONO pada Konperensi Indonesia-India IV di Jakarta pada 19-20 Agustus 1985. Diterjemahkan oleh Kirdi DIPOYUDO.

¹Hal ini kami bahas dalam "The Political and Security Aspects of ASEAN: Its Principal Achievements," *The Indonesian Quarterly*, Vol. XI, No. 3 (Juli 1983), hal. 19-26.

Pada hubungan-hubungan ASEAN dengan negara-negara besar itulah analisa ini dipusatkan demi simplifikasi, kemudahan dan kejelasan. Karena kendatipun terdapat variasi dan keanekaragaman dari sudut pandangan persepsi-persepsi dan prioritas-prioritas nasional, suatu kebersamaan tertentu dapat dilihat dan diidentifikasi di antara negara-negara ASEAN dalam pandangan mereka mengenai, dan dalam hubungan mereka dengan, negara-negara besar, khususnya sejak pembentukan perhimpunan itu.

PENGALAMAN HISTORIS

Seperti baru saja diisyaratkan, bahkan dengan menganggap ASEAN sebagai suatu "kawasan" tersendiri, hubungan antara negara-negara anggota ASEAN di satu pihak dan negara-negara besar di lain pihak tidaklah sederhana, jelas dan tak bervariasi. Orang sukar membuat generalisasi dan menemukan suatu pola yang tegas dan konsisten. Kenyataannya, di bawah sinar titik-titik balik tertentu dalam sejarah kawasan maupun negara masing-masing seperti akhir Perang Pasifik dan munculnya bangsa-bangsa yang baru merdeka sesudahnya, akhir Perang Vietnam dan penarikan Amerika dari Asia Tenggara, dan percobaan kudeta komunis yang gagal di Indonesia dan akhir konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang menyusulnya, hubungan dan persekutuan dengan negara-negara besar secara terus-menerus dinilai dan dibatasi kembali. Namun, hubungan-hubungan lama tertentu bertahan. Seperti dikatakan seorang penulis, "warisan adalah suatu pengaruh besar di Asia Tenggara."² Kendati regionalisme ASEAN, misalnya, orang masih dapat menemukan penyesuaian dan persekutuan-persekutuan yang sudah lama antara negara-negara ASEAN tertentu dan negara-negara besar.

Dari perspektif nasional, jenis sikap dan asosiasi umum negara-negara ASEAN dengan negara-negara besar dibentuk oleh bermacam-macam persepsi kepentingan nasional yang vital, khususnya keamanan nasional. Pada gilirannya ini untuk sebagian besar ditentukan oleh pengalaman-pengalaman historis mereka masing-masing. Kecuali Kerajaan Muangthai, yang telah menikmati sejarah kemerdekaan dan kedaulatan nasional tanpa interupsi, bagi mayoritas negara ASEAN, dan bahkan seluruh Asia Tenggara, pengalaman-pengalaman ini berasal dari periode pra-kolonial dan kolonial mereka, yang pada waktu yang berbeda dan dengan negara-negara dari luar yang berlainan, ditandai dominasi dan berbagai bentuk asosiasi sebagai bawahan yang lain.

Akan tetapi bagi negara-negara ini, sikap dasar mereka dan oleh sebab itu kebijaksanaan umum mereka terhadap negara-negara besar selanjutnya di-

²Douglas Pike, "Southeast Asia and the Superpowers: The Dust Settles," *Current History* (April 1983), hal. 145.

warnai oleh pengalaman mereka dalam proses mendapatkan kemerdekaan pada akhir Perang Pasifik. Khususnya negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam, yang menyatakan kemerdekaannya dengan memanfaatkan kekosongan politik akibat kekalahan Jepang dan melawan keinginan negara-negara kolonial yang kembali, diganggu sengketa-sengketa intern mengenai suksesi politik bagi negara-negara penjajah yang mengalami kemunduran. Sengketa-sengketa intern semacam itulah yang memancing kepentingan bersaing negara-negara besar dari luar. Dengan kata lain, sengketa-sengketa intern negara-negara itu dicampuri negara-negara besar dari luar untuk menentukan suksesi politik. Dan secara demikian mulai suatu era berlanjut intervensi negara besar di Asia Tenggara. Selain Vietnam, yang merupakan suatu contoh intervensi negara besar *par excellence* dalam sejarah modern, peristiwa 1948 di Indonesia ketika kaum komunis yang berorientasi pada Moskwa dan didukungnya melancarkan suatu pemberontakan yang tak berhasil di tengah-tengah perjuangan revolusi untuk kemerdekaan nasional merupakan suatu kasus semacam itu.

Sayang, bukan saja negara-negara yang mendapatkan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata revolusi, tetapi juga mereka yang mendapatkan kemerdekaan mereka secara damai dan bahkan Muangthai, yang dalam sejarahnya tak pernah mengalami pengalaman penjajahan, secara terus-menerus diganggu sengketa-sengketa intern. Selain itu, semuanya menderita kelemahan-kelemahan sosial, politik, ekonomi dan militer. Sebagai akibatnya mereka bukan saja bergantung dan tunduk pada negara-negara besar dari luar tetapi juga rawan terhadap segala macam campur tangan luar oleh negara-negara besar. Sejak itu Asia Tenggara menjadi tanah subur dan ruang yang besar bagi intervensi negara besar.

Era intervensi negara besar di Asia Tenggara bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara negara-negara adidaya yang menanjak dan berkembangnya Perang Dingin. Negara-negara besar ini memandang Asia Tenggara dengan perbedaan persepsi mengenai suatu tata regional yang tepat dari segi keuntungan politik komparatif, yaitu suatu tata yang kemungkinan besar akan mengamankan kepentingan-kepentingannya sendiri dan pada waktu yang sama membendung kepentingan-kepentingan saingan mereka.

Secara demikian dengan munculnya RRC dan pecahnya Perang Korea, kepentingan utama AS di kawasan adalah perluasan strategi pembendungannya terhadap perluasan pengaruh komunis di Asia, yang akhirnya menemukan ungkapan formalnya dalam pembentukan SEATO pada tahun 1954. Ini berlanjut setidak-tidaknya sampai pengumuman Doktrin Nixon pada tahun 1969.

Mengenai Uni Soviet, pergeseran dalam orientasi internasionalnya sebagai akibat buyarnya Aliansi Besar waktu perang yang digantikan oleh permulaan

Perang Dingin terungkap dalam dukungannya bagi gerakan-gerakan pemberontakan di Asia Tenggara. Kalau hanya melalui kebijaksanaan intervensi tersembunyi dalam bentuk dorongan dan propaganda dan bukannya tindakan-tindakan praktis bantuan militer, dukungan Soviet bagi gerakan-gerakan pemberontakan di kawasan mula-mula bukan saja terarah terhadap negara-negara penjajah tetapi juga terhadap pemerintah-pemerintah borjuis nasional yang dianggap bagian belakang kapitalisme dan imperialisme.

Akan tetapi dalam era pasca Stalin, kepentingan-kepentingan Soviet diarahkan untuk melawan pengaruh Amerika dan menegaskan identitasnya sendiri yang total dengan sentimen anti imperialis rezim-rezim nasionalis lokal yang militan. Kemudian, dengan timbulnya sengketa Soviet dengan RRC pada dasawarsa 1960-an, kebijaksanaan intervensi Soviet dalam berbagai bentuk bantuan ekonomi dan militer juga dimaksud untuk melawan pengaruh Cina.

Di pihaknya, Cina ternyata tidak kurang bertekad, pertama-tama untuk melawan pengaruh Amerika dan kemudian juga pengaruh Soviet. Dan berbeda dengan negara-negara besar lain, banyak orang di kawasan curiga bahwa RRC mungkin mempunyai klaim atas suatu daerah pengaruh di Asia Tenggara berdasarkan sejarah. Kiranya dengan maksud untuk mengamankan kepentingan-kepentingan inilah RRC dengan kuat mendukung politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, yang kemudian memberinya suatu kesempatan untuk melaksanakan kebijaksanaan intervensinya dalam urusan-urusan domestik Indonesia pada pertengahan 1960-an. Ini merupakan alasan pembekuan hubungan diplomasi antara kedua negara yang berlangsung sampai sekarang.

PENOLAKAN CAMPUR TANGAN LUAR

Tinjauan singkat atas berbagai bentuk kebijaksanaan intervensi oleh negara-negara besar dari luar dalam sejarah belakangan Asia Tenggara itu terutama dibuat dari perspektif negara-negara besar yang bersangkutan dalam usaha mereka untuk mengamankan kepentingan-kepentingan regional dan global mereka yang dalam persepsi mereka terikat dengan kepentingan nasional mereka yang vital. Tetapi untuk bertindak adil terhadap negara-negara besar itu, perlu dikatakan bahwa intervensi dari luar itu tidak selalu tidak diminta. Intervensi itu sering diminta. Ini terjadi bila dirasanya adanya konvergensi, jika bukan kebersamaan, kepentingan antara negara-negara pelindung atau intervensionis dan negara-negara langganan di kawasan.³

³Lihat suatu diskusi mengenai soal ini dalam "Introduction," bagi Raju G.C. Thomas, ed., *Great Power Triangle and Asian Security* (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1983).

Jadi, biarpun SEATO dibentuk dan pangkalan-pangkalan Amerika dibangun di Pilipina dalam rangka strategi pembendungan Amerika terhadap perluasan komunis di Asia, dari sudut pandangan Pilipina pengaturan keamanannya dengan AS adalah, paling tidak mula-mula, untuk menjamin keamanan nasionalnya terhadap apa yang dilihatnya sebagai suatu ancaman luar yang potensial dari Jepang. Indonesia mengundang peranan Soviet, dan melalui itu peranan Amerika, dalam konfliknya dengan Belanda mengenai Irian Barat, biarpun kedua negara adidaya turun tangan dalam konflik itu secara yang berlainan dalam konteks kompetisi global mereka sendiri. Memang, pertentangan kepentingan antara negara-negara besar yang bersaing sering dimanfaatkan oleh negara-negara kawasan untuk menunjang maksud-maksud mereka sendiri.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan intervensi kompetitif oleh negara-negara besar dari luar itu juga tidak selalu berhasil menunjang kepentingan-kepentingan kompetitif mereka. Sementara kebijaksanaan-kebijaksanaan semacam itu sering digunakan oleh suatu negara non-blok seperti Indonesia untuk mengurangi ketergantungan atau subordinasinya pada satu negara besar atau yang lain, atau dalam kenyataan untuk menegakkan kebijaksanaan merdekanya, suatu negara dari luar bisa melaksanakan kebijaksanaan intervensinya semata-mata untuk membantu negara langganan yang bersangkutan mempertahankan posisi merdekanya, dan secara demikian mencegahnya bersekutu dengan negara besar yang lain. Ini bisa berlaku bagi AS dan, sampai batas-batas tertentu, bagi Uni Soviet dalam peranan yang dimainkan masing-masing dalam sengketa Irian Barat.

Namun, keuntungan jangka pendek manapun bisa dipetik oleh negara-negara kawasan dari kebijaksanaan intervensi negara-negara besar dari luar, khususnya yang diminta oleh mereka, setidaknya-tidaknya dalam jangka panjang campur tangan dari luar bisa mengakibatkan dominasi atau bentuk-bentuk lain subordinasi yang lebih jauh pada negara-negara besar dari luar. Inilah yang dilawan oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan biaya tinggi di masa lampau. Lagipula, sifat kompetitif hubungan antara negara-negara besar itu mengandung bahaya melibatkan negara-negara kawasan dalam persaingan dan sengketa-sengketa mereka melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan intervensi kompetitif mereka.

Memang, kompetisi dan sengketa-sengketa kepentingan antara negara-negara besar itu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan intervensi mereka di Asia Tenggara tidak mengakibatkan konfrontasi langsung mana pun antara mereka. Suatu kendala besar bagi suatu konfrontasi negara besar adalah perhatian mereka untuk menghindari eskalasi menuju suatu perang umum. Namun, melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan intervensi kompetitif mereka ne-

gara-negara besar melaksanakan "wars by proxy" atau perang melalui negara-negara langganan mereka. Keterlibatan negara-negara kawasan dalam sengketa-sengketa by proxy semacam itu juga akan mengancam keamanan dan kestabilan mereka dan keamanan serta kestabilan kawasan.

Rupanya sangat besarlah kemungkinan bahwa pertimbangan-pertimbangan semacam itu mendasari penolakan negara-negara ASEAN terhadap campur tangan dari luar ketika membentuk perhimpunannya pada tahun 1967. Karena mereka "membagi suatu tanggung-jawab utama untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial kawasan dan menjamin pembangunan nasional mereka yang damai dan progresif," mereka "bertekad untuk menjamin kestabilan dan keamanan mereka dari campur tangan dari luar dalam segala bentuk atau manifestasinya"⁴ Memang, penolakan campur tangan dari luar merupakan suatu pemikiran utama negara-negara anggota ASEAN. Kenyataannya, hal itu merupakan bagian esensi regionalisme ASEAN.⁵ Deklarasi Kuala Lumpur yang ditandatangani para Menlu ASEAN pada 27 November 1971 mengenai pembentukan Asia Tenggara sebagai suatu "Kawasan Damai, Bebas dan Netral" (ZOPFAN) bisa dianggap sebagai suatu usaha untuk memberi pemikiran itu ungkapannya yang penuh dan formal. Pernyataan itu diulangi, ditekankan kembali dan dikukuhkan kembali dalam dokumen-dokumen penting ASEAN yang menyusulnya sejak itu, khususnya dalam Deklarasi Kerukunan ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama yang ditandatangani pada KTT Bali tahun 1976.

Penarikan AS dan akhir Perang Vietnam rupanya memberikan, paling tidak untuk sementara waktu, harapan baik kepada Asia Tenggara dalam arti bahwa hal-hal itu menandai berakhirnya suatu periode panjang intervensi dari luar di kawasan. Dan akhir permusuhan di Indocina rupanya menjanjikan suatu prospek kebebasan dari campur tangan dari luar selanjutnya di Asia Tenggara oleh negara-negara besar, yang bila tiada sengketa-sengketa, akan menemukan sedikit ruang untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Prospek semacam itu akan mengantarkan kawasan Asia Tenggara lebih dekat dengan realisasi ZOPFAN. Dengan demikian bangsa-bangsa Asia Tenggara rupanya mempunyai harapan akan perkembangan damai menuju kemajuan dan kemakmuran selama banyak tahun mendatang.

Akan tetapi, siapa pun mempunyai harapan semacam itu akan segera mengalami frustrasi akibat pecahnya permusuhan baru di kawasan sebelum akhir dasawarsa itu. Konflik Kampuchea, dengan invasi Vietnam dan pendudukan Kampuchea menjelang akhir 1978 dasawarsa itu sebagai puncak-puncaknya,

⁴Suatu konsiderans dalam Deklarasi Bangkok.

⁵Lihat karangan kami "ASEAN Regionalism and the Role of the USA," *The Indonesian Quarterly*, vol. XII, no. 1 (Januari 1984), hal. 62-64.

dengan alasan mana pun mengembalikan hantu campur tangan dari luar yang begitu lama ditakuti ASEAN. Konflik itu, hampir langsung sesudahnya, mendorong serangan Cina terhadap Vietnam. Dan pada gilirannya ini, lebih daripada Perang Vietnam, mengundang Uni Soviet untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu pijakan di kawasan, khususnya melalui aksesnya pada fasilitas-fasilitas militer di Cam Ranh Bay dan Da Nang di Vietnam. Sengketa Kampuchea itu mengabaikan asas-asas ZOPFAN dan bahkan regionalisme ASEAN itu sendiri.

Memang, biarpun merupakan suatu bagian Asia Tenggara, Kampuchea terletak di luar kawasan ASEAN. Tetapi gagasan ZOPFAN jelas merupakan suatu usaha untuk memproyeksikan penolakan ASEAN terhadap campur tangan dari luar ke seberang perbatasannya sendiri dan di kawasan Asia Tenggara sebagai keseluruhan. Jadi, Konflik Kampuchea, yang merupakan suatu peringatan kuat akan bahaya campur tangan dari luar, merupakan suatu kesempatan untuk mengukuhkan kembali keprihatinan ASEAN. Ini dapat dilihat dalam apa yang disebut Kuantan Principle,⁶ yang bisa dianggap sebagai bagian ungkapan keprihatinan itu dan suatu usaha, presis seperti gagasan ZOPFAN, untuk memperluas penerapan asas ASEAN ke bagian Asia Tenggara yang lain, khususnya Indocina.

SUATU PRAKTEK AMBIVALENSI⁷

Pada dasarnya, penolakan ASEAN terhadap campur tangan dari luar dan oleh sebab itu usul ZOPFAN dialamatkan kepada semua negara di luar kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman-pengalaman kawasan yang lampau seperti ditinjau secara singkat di atas, dapat dikatakan bahwa gagasan itu khususnya atau bahkan secara eksklusif diarahkan kepada negara-negara besar yang terutama mencampuri urusan-urusan regional Asia Tenggara dan memiliki kemampuan dan minat untuk melakukannya di masa depan.

Akan tetapi, rupanya jelas bahwa penolakan campur tangan dari luar dan gagasan ZOPFAN sebagai ungkapan formal dan terbesarnya tidak dimaksud sebagai penolakan total terhadap kehadiran dan secara demikian juga kepentingan dan peranan sah negara-negara besar itu di kawasan. Sikap semacam itu bukan saja akan tidak realistik sama sekali, tetapi dalam dunia yang sema-

⁶Untuk suatu diskusi mengenai prinsip Kuantan, lihat Justus M. van der Kroef, "ASEAN, Hanoi, and the Kampuchean Conflict: Between 'Kuantan' and a 'Third Alternative,'" *Asian Survey*, vol. XXI, no. 5 (Mei 1981), hal., 515-535.

⁷Gagasan-gagasan dalam beberapa paragraf berikut telah dibahas dalam karangan kami "ASEAN Regionalism," hal. 66-67.

kin saling tergantung sekarang ini juga tidak akan menguntungkan bangsa-bangsa Asia Tenggara itu sendiri. Bagaimana pun, dalam tingkat yang berbeda-beda, bersamaan maupun dalam periode yang berlainan, semua negara besar itu telah mempertahankan kehadiran mereka di kawasan dalam bentuk ini atau itu. Tiada bangsa di Asia Tenggara yang mampu atau merasa perlu mengusir negara-negara besar itu dari kawasan.

Sebaliknya, kehadiran negara besar itu dan kepentingan-kepentingan sah mereka di kawasan diakui sewajarnya. Juga diakui bahwa mereka memegang peranan, tetapi peranan ini tidak boleh membahayakan kepentingan-kepentingan vital negara-negara di kawasan. Sesungguhnya, berdasarkan hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara kawasan, mereka dapat membantu memajukan perwujudan maksud dan tujuan regionalisme ASEAN. Karena penciptaan dan penyelamatan perdamaian dan kestabilan di kawasan juga akan menunjang kepentingan negara-negara besar itu sendiri. Kenyataannya, karena kelemahan-kelemahan dan kekurangan mereka akan sumber-sumber daya tertentu negara-negara anggota ASEAN bukan saja tidak akan menolak kehadiran negara-negara besar itu, tetapi mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan mereka. Jadi penolakan mereka terhadap campur tangan dari luar dan oleh sebab itu asas ZOPFAN tidak menutup kemungkinan interaksi dan kerjasama dengan dan sampai batas-batas tertentu bahkan pengendalian dan ketergantungan pada negara-negara besar itu.

Dengan demikian, dalam arti tertentu sikap negara-negara ASEAN sebagai suatu kelompok terhadap negara-negara besar itu bercirikan suatu tingkat ambivalensi yang tinggi. Mengingat suatu pembatasan longgar "campur tangan" atau intervensi sebagai suatu bentuk "pengaruh"⁸ kendati adanya tekanan atas campur tangan dari luar "dalam segala bentuk atau manifestasi"nya seperti diberikan dalam Deklarasi Bangkok, penolakan ASEAN terhadap campur tangan dari luar bersifat selektif.

Penolakan itu selektif, pertama, dalam arti bahwa kendati penolakannya terhadap campur tangan dari luar dalam satu bentuk -- biarpun ini tak pernah

⁸Untuk suatu diskusi mengenai konsep campur tangan atau intervensi sebagai ekuivalen pengaruh dan hubungannya dengan berbagai bentuk bantuan asing, lihat David A. Baldwin, "Foreign Aid, Intervention, and Influence," *World Politics*, vol. 21, no. 3 (April 1969), hal. 425-447; dalam arti kepentingan dan maksud negara-negara intervensionis, Michael Leifer memberikan pembatasan intervensi berikut: "keterlibatan satu negara dalam urusan-urusan negara lain dengan maksud membantu, membujuk, atau memaksanya untuk menempuh atau tidak menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu atau untuk mempertahankan atau mengubah kondisi tata domestiknya, tidak peduli kemauannya;" lihat karangannya "Great Power Intervention and Regional Order," dalam *Conflict and Stability in Southeast Asia*, ed. Mark W. Zacher dan R. Stephen Milne (Garden City, New York: Anchor Press/Doubleday, 1974), hal. 181-201; kami berhutang budi kepadanya atas beberapa gagasannya mengenai intervensi negara besar di Asia Tenggara yang kami gunakan dengan leluasan dalam karangan ini.

dibatasi -- ASEAN ternyata akomodatif terhadap bentuk-bentuk campur tangan lain yang lebih halus, yang sering secara tak terhindarkan muncul dari hubungan dan kerjasama dengan negara-negara besar tersebut, khususnya sejauh hubungan dan kerjasama semacam itu meliputi berbagai bentuk bantuan⁹ yang diberikan oleh negara-negara besar itu. Kedua, penolakan itu selektif dalam arti bahwa sebagian karena pilihan dan sebagian karena paksaan keadaan ASEAN membina hubungan dan kerjasama semacam itu dengan negara-negara besar tertentu tetapi tidak dengan yang lain dan lebih erat dengan beberapa daripada dengan lain-lain negara.

Lagipula, penolakan dan dukungan bagi campur tangan dan bahkan undangan untuk campur tangan, walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda, untuk maksud yang berbeda-beda, dan sering oleh negara yang berbeda-beda, yang mengungkapkan bagaimana secara individual negara-negara ASEAN mempunyai pandangan dan persepsi yang berbeda-beda mengenai negara-negara besar itu kendati posisi dasar bersama ASEAN, sering diungkapkan bersama-sama. Jadi Menlu Indonesia Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dalam perjalanannya ke New Delhi baru-baru ini bahwa ia prihatin dengan bantuan militer AS bagi pasukan koalisi anti-Vietnam karena hal itu akan berarti keterlibatan AS dalam suatu Perang Vietnam. Namun bersamaan dengan itu ia menegaskan bahwa hubungan Soviet-Vietnam harus dilawan dengan normalisasi hubungan Amerika-Vietnam.¹⁰ Tak lama kemudian Menlu Malaysia Rithaudeen menyatakan pandangan bahwa bantuan AS bagi Son Sann adalah suatu usaha untuk menandingi bantuan Soviet bagi Vietnam dan bahwa hal itu selaras dengan seruan ASEAN di Bangkok pada awal Januari 1985.¹¹ Tetapi bantuan non-militer AS sebesar US\$5 juta bagi CGDK dilihat oleh Mochtar sebagai suatu perkembangan baru menuju penyelesaian sengketa Kampuchea.¹²

Mengenai peranan AS di kawasan, Menlu Mochtar menandakan bahwa normalisasi hubungan Amerika-Vietnam penting bagi perdamaian di Kampuchea dan Asia Tenggara sebagai suatu kawasan damai. Bagi penyelesaian masalah Kampuchea, konfigurasi politik di Asia Tenggara perlu dirubah dan suatu unsur baru perlu dilibatkan untuk melawan persaingan Vietnam-Cina. Itu adalah normalisasi Amerika-Vietnam.¹³ AS harus dibujuk untuk memainkan

⁹Lihat Baldwin, "Foreign Aid;" lihat juga John P. Lewis, *Development Cooperation: Efforts and Policies of the Members of the Development Committee*, 1981 Review (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 1981), hal. 25-31.

¹⁰*Merdeka*, 20 April 1985.

¹¹*Kompas*, 23 April 1985.

¹²*Suara Karya*, 3 April 1985.

¹³*Ibid.*, 13 April 1985.

kan peranan yang lebih besar dalam penyelesaian masalah Kampuchea. Sejauh ini ASEAN berusaha menyelesaikan sengketa itu berdasarkan strategi Soviet dan Cina di Asia Tenggara. Dengan meningkatkan peranan AS dalam penyelesaian sengketa Kampuchea, bobot ASEAN dalam usaha itu akan meningkat. Dengan demikian usul pembicaraan melalui perantara (proximity talks) itu harus diberi konteks yang lebih luas yang meliputi persaingan Cina-Soviet dan normalisasi Amerika-Vietnam. Sejauh ini Indonesia berusaha membantu menyelesaikan konflik Kampuchea dengan cara yang tak terkait dengan suatu strategi yang menyeluruh. Keterlibatan AS akan memantapkan strategi ASEAN.¹⁴ Kemudian ia bahkan mengisyaratkan bahwa pembicaraan melalui perantara itu juga harus meliputi suatu penyelesaian konflik Cina-Vietnam dan suatu jaminan oleh ketiga negara adidaya bagi suatu penyelesaian masalah Kampuchea maupun bagi pemeliharaan kestabilan dan netralitas Asia Tenggara.¹⁵ Bahkan suatu undangan untuk intervensi militer dinyatakan oleh Menlu Pilipina Juan Ponte Enrile ketika ia mengatakan bahwa secara tak langsung pasukan AS bisa diminta untuk membantu memerangi para pemberontak komunis jika ada intervensi asing.¹⁶

Mengenai peranan Uni Soviet, telah dilaporkan bahwa negara-negara ASEAN telah meminta AS untuk membicarakan soal Kampuchea dalam KTT Reagan-Gorbachev di Jenewa.¹⁷ Menlu Mochtar mengharap bahwa Moskwa dapat ikut menciptakan perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara.¹⁸ Dan sebagai jawaban atas suatu pernyataan yang dibuat oleh Dirjen Soviet untuk Asia Tenggara, A. Solvanovich, ia mengatakan bahwa Uni Soviet hendaknya mengambil langkah-langkah lebih lanjut bagi usaha ASEAN untuk mewujudkan ZOPFAN. Konflik Kampuchea adalah satu hambatan bagi ZOPFAN. Dengan demikian Uni Soviet hendaknya membujuk Vietnam di Kampuchea.¹⁹

Sementara itu Wakil Menlu Malaysia, Abdul Kadir Sheil Fadzir, yakin bahwa Moskwa menginginkan konflik Kampuchea diselesaikan oleh negara-negara Asia Tenggara. Ia tidak ingin campur tangan atau memaksakan pandangannya pada Asia Tenggara.²⁰ Sebaliknya, Sekjen Dewan Keamanan Muangthai, Prasong Soonsiri, mengatakan bahwa Uni Soviet menggunakan ketiga sekutunya di Indocina untuk memperluas pengaruhnya dan kemam-

¹⁴*Kompas dan Antara*, 30 Mei 1985.

¹⁵*Kompas*, 6 Juli 1985.

¹⁶*Suara Karya*, 7 Juli 1985.

¹⁷*Sinar Harapan*, 15 Juli 1985.

¹⁸*Jakarta Post*, 3 April 1985.

¹⁹*Antara*, 3 Agustus 1985.

²⁰*Ibid.*, 2 Agustus 1985.

puan militernya di Asia Tenggara; bahwa Uni Soviet merupakan suatu ancaman serius bagi Asia Tenggara sebagai keseluruhan maupun bagi kawasan-kawasan lain; dan bahwa Cam Ranh Bay telah menjadi suatu pusat kegiatan AL Soviet di Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia.²¹

CATATAN-CATATAN PENUTUP

Dalam hubungan dan asosiasi mereka dengan negara-negara besar, negara-negara ASEAN ragu-ragu antara perasaan nasionalisme dan kemerdekaan mereka yang kuat di satu pihak dan suatu perasaan lemah dan tak berdaya di lain pihak. Nasionalisme dan kemerdekaan mereka menasihatkan penolakan campur tangan oleh negara-negara besar karena campur tangan dari luar semacam itu bisa mengandung risiko ketergantungan dan subordinasi tak wajar kepada negara-negara besar, dan mengingat sifat kompetitif hubungan antara negara-negara besar hal itu bisa menyeret mereka ke dalam konflik-konflik yang akan merongrong stabilitas mereka. Pengalaman-pengalaman lampau mereka dalam berbagai bentuk dominasi dan subordinasi maupun dalam berbagai bentuk campur tangan dari luar akan membuat mereka waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan semacam itu.

Di lain pihak, kelemahan mereka di hadapan kekuatan dan kemampuan negara-negara besar akan memaksa mereka mengakui dan menerima peranan dan pengaruh negara-negara besar itu dan secara demikian sampai batas-batas tertentu campur tangan mereka dengan segala risikonya. Oleh sebab itu ambivalensi dan dilema mereka antara ketergantungan dan kemerdekaan; kebimbangan mereka antara suatu kerangka regional bagi penyelesaian konflik-konflik melalui penggunaan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN, ZOPFAN, asas Kuantan, himbauan ASEAN dan pembicaraan melalui perantara dalam usaha untuk mencapai suatu penyelesaian politik bagi konflik Kampuchea di satu pihak dan keterlibatan negara-negara besar dari luar di lain pihak.

Sungguh, di hadapan posisi sulit semacam itu, mengingat kemauan politik negara-negara ASEAN untuk melakukan usaha-usaha serius guna membuat regionalisme ASEAN berfungsi dan menjamin kelangsungan daya hidupnya, kerjasama regional ASEAN yang diarahkan untuk menciptakan suatu komunitas bangsa-bangsa yang damai, rukun dan makmur di mana cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik-konflik dicari rupanya merupakan kebijaksanaan alternatif terbaik yang harus ditempuh. Kalau secara individual negara-negara ASEAN lemah, maka bersama-sama dalam rangka kerjasama regional

²¹*Ibid.*, 28 April 1985.

ASEAN mereka dapat lebih baik menjamin kemerdekaan mereka di hadapan negara-negara besar dari luar, dengan siapa mereka bisa menjadi lebih mampu membina suatu hubungan saling tergantung yang berimbang. Dan diharapkan bahwa dengan hubungan berimbang di antara negara-negara besar itu sendiri, bagaimana pun negara-negara ASEAN akan mampu seolah-olah menganekaragamkan ketergantungan mereka jika hubungan saling tergantung dan asosiasi kurang berimbang untuk menghindari dominasi suatu negara besar tunggal.

Itu mungkin asal terdapat suatu hubungan berimbang yang dinamik antara negara-negara besar. Artinya, mereka tidak dalam konflik parah dan juga tidak berkomplot untuk menciptakan semacam kondominium negara besar di Asia Tenggara.

Menlu Mochtar mengatakan pada Pertemuan Menlu ASEAN di Kuala Lumpur baru-baru ini bahwa ASEAN harus mampu menyelesaikan sengketa Kampuchea segera mungkin sebelum hubungan antara Cina dan Uni Soviet menjadi lebih erat.²² Memang, mengenai bangsa-bangsa Asia Tenggara berlaku peribahasa, "bila gajah berkelahi, rumput terinjak-injak; bila kawin, rumputnya juga terinjak-injak."²³

²²*Indonesian Times*, 15 Juli 1985.

²³Suatu ucapan yang dianggap berasal dari PM Lee Kuan Yew, yang dikutip dalam Shibusawa Masahide, *Japan and the Asian Pacific Region: Profile of Change* (London: Croom Helm, untuk The Royal Institute of International Affairs, 1984), hal. 4-5.

Kerjasama Regional di Asia Selatan*

K. SUBRAHMANYAM

Ide kerjasama regional yang mulai berakar di hampir seluruh wilayah terutama didasarkan atas konsensus politik atau keamanan. Ini terjadi pada Masyarakat Ekonomi Eropa, Dewan Ekonomi Bersama (Comecon), dan ASEAN. Bilamana tidak tercapai konsensus politik dan keamanan, maka usaha-usaha ke arah kerjasama regional tidak mengalami banyak kemajuan. Ini kebetulan terjadi pada Organisasi Negara-negara Amerika, Organisasi Persatuan Afrika, dan Liga Arab. Terhadap latar belakang ini upaya untuk menciptakan kerangka kerjasama regional di Asia Selatan yang disebut Kerjasama Regional Asia Selatan (SARC) merupakan suatu eksperimen yang unik. Di sini negara-negara utama tidak memiliki perspektif yang sama mengenai masalah-masalah keamanan atau politik. Sebenarnya kepentingan keamanan mereka bertentangan dan pada taraf tertentu lebih berpaling ke dalam daripada ke luar. Oleh karena itu di sini telah diupayakan, pertama-tama mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknologi dengan harapan bahwa perspektif keamanan dan politik pada akhirnya akan berpadu atas dasar berhasilnya kerjasama ekonomi dan teknologi di antara negara-negara utama.

Sebelum pengembangan kerangka kerjasama regional, negara-negara utama di Eropa Barat, Eropa Timur dan ASEAN terbelenggu dalam perselisihan. Jerman dan Prancis saling bermusuhan. Pendahulu Jerman Timur (Prusia) dan Polandia sejak lama bermusuhan dengan Rusia dan juga antar mereka sendiri. Indonesia dan Malaysia *berkonfrontasi* sebelum memutuskan untuk bergabung dalam ASEAN. Oleh karena itu dengan adanya kemauan politik, dalam abad nuklir ini negara yang berselisih mampu mengatasi permusuhan mereka untuk kemudian membentuk kerangka kerjasama kawasan.

*Terjemahan makalah yang disampaikan pada Konperensi India-Indonesia IV, Jakarta 19-21 Agustus 1985. Penterjemahnya Ronald NANGOI, staf CSIS.

Bahkan dengan memperhitungkan pertimbangan tersebut, eksperimen Asia Selatan merupakan sesuatu yang agak khusus.

Di Asia Selatan dua negara yang relatif besar, Bangladesh dan Pakistan (negara ke-8 dan ke-9 di dunia dari segi jumlah penduduk) terpecah dari negara kedua terpadat penduduknya di dunia - India. Di mana perpecahan tersebut terjadi setelah usainya Perang Dunia II, sikap-sikap bermusuhan di kalangan negara-negara yang terpecah-belah itu tetap berlanjut, atau negara-negara tersebut bersatu karena terpaksa. Korea Utara dan Selatan, Jerman Timur dan Barat, Cina dan Taiwan adalah contoh-contoh bagi kategori pertama. Di Vietnam kelompok-kelompok yang terpecah-pecah (partisi) dipersatukan kembali setelah perang. Mengenai Asia Selatan tidak seperti halnya dengan contoh-contoh tersebut, partisi telah diterima oleh unit-unit utama. Akan tetapi permusuhan dan kecurigaan belum teratasi sepenuhnya. Masalah negara-negara yang baru muncul, yang sedang mengembangkan identitas nasional mereka tetap genting. Dan lagi berbeda dengan kasus-kasus lainnya, konflik terakhir yang paling keras di Asia Selatan baru saja terjadi pada tahun 1971. Di Jerman, krisis Berlin terakhir terjadi pada tahun 1961 dan di Korea utunglah tidak terjadi konflik sejak gencatan senjata tahun 1953. Di selat-selat Taiwan konflik keras terakhir adalah krisis Quemoy Matsu pada tahun 1958. Kerangka kerjasama regional memiliki kategori-kategori yang berbeda-beda. Di Eropa Barat selama proporsi potensi militer Jerman tidak seimbang dengan kekuatan Prancis dan sistem-sistem politik Prancis dan Jerman juga sangat berbeda (yang pertama demokratik dan yang terakhir otoriter), tidaklah mungkin untuk memiliki kerangka kerjasama regional. Barulah ketika Jerman Barat sendiri memiliki persamaan dengan Prancis dan menjadi demokratis, MEE dimungkinkan. Kendatipun terpadat di ASEAN, penduduk Indonesia hanyalah 55% dari penduduk ASEAN. Sebaliknya di CMEA penduduk Soviet terdiri atas 74%. Di Asia Selatan, India memiliki 77% penduduk Asia Selatan dalam wilayah perbatasannya.

Faktor lain yang relevan adalah tingkat pertumbuhan negara-negara bersangkutan. Di Eropa Barat tahap pertumbuhan negara-negara utama secara kasar adalah sama. Di ASEAN, Singapura dan Malaysia relatif lebih maju dalam bidang industri dan teknologi daripada negara-negara yang lebih besar. Mengenai Asia Selatan, negara terbesar adalah juga negara yang lebih maju di bidang teknologi dan di samping itu juga memiliki jumlah penduduk miskin terbesar.

Yang terpenting, dalam kerangka kerjasama regional lainnya, hanya Asia Selatan yang berupaya mempersatukan negara-negara yang terbentuk akibat perpecahan (partisi). Perpecahan ini terjadi akibat kecurigaan yang dibangkitkan kelompok besar minoritas yang tidak ingin menerima prinsip demokratik

penguasa mayoritas. Sekali lagi Bangladesh muncul karena minoritas calon Pakistan (sekarang Pakistan) menolak untuk menerima kekuasaan mayoritas. Seringkali Pakistan memuji sikap "low profile" Indonesia di ASEAN dan menganjurkan agar India sebaiknya mengikutinya. Situasi yang analog di ASEAN akan terjadi jika Sumatera, Timor atau Ambon memisahkan diri dan kemudian menjadi negara-negara merdeka, bergabung ke dalam pengaturan kerjasama regional. Pengalaman sejarah Indonesia, Malaysia, Filipina dan Muangthai sangat berlainan dan mereka tidak menghadapi masalah identitas sebagaimana dihadapi negara-negara baru di Asia Selatan. Semua negara Asia Selatan memiliki perbatasan yang sama dengan India, tapi tidak antarnegara di luar India. Penduduk yang berbahasa sama dan memiliki kesamaan suku tinggal pada perbatasan internasional yang sama yaitu antara India dan tetangga-tetangga Asia Selatannya. Tingkat pengaruh India di Asia Selatan dari segi bahasa, budaya, tradisi dan agama sangat jauh daripada di setiap pengelompokan kawasan lainnya. Barangkali suatu saat faktor ini bisa membuktikan adanya ikatan yang kuat, tetapi pada tahap ini status sebagai negara bagian di Asia Selatan yang baru ini menjadi faktor penghambat. Pada suatu saat ini merupakan tesis yang populer di kalangan pemikir Barat dan beberapa tetangga India bahwa kesatuan India tidak akan berlangsung lama. Indonesia juga menghadapi situasi yang sama. Sejarah empat dasawarsa terakhir dan kejadian-kejadian yang menakutkan akhir-akhir ini di India telah membuktikan bahwa penduduk Kashmir hingga Kanya Kumari bersatu dalam usaha penyelesaian mereka untuk membangun suatu negara yang kokoh/utuh, dan bersatu dalam keanekaragamannya.

Kenyataan-kenyataan ini disoroti bukanlah untuk membantah setiap tesis atau perspektif tertentu tetapi untuk menyajikan suatu gambaran objektif mengenai kenyataan-kenyataan akhir-akhir ini, untuk menilai tantangan dan kesempatan guna mengembangkan suatu kerangka kerjasama regional di Asia Selatan. Adalah suatu paradoks yang bisa dimengerti bahwa gerakan kerjasama regional muncul dari situasi konflik dan pergolakan ketika negara-negara utama menyimpulkan bahwa mereka menghadapi ancaman dan tantangan luar yang lebih besar, ini semakin mendesak mereka untuk lebih bersatu. Eropa Barat bersatu akibat ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. CMEA muncul untuk melindungi negara-negara bersangkutan dari ancaman yang akan menggulingkan sistem sosialis. Penyatuan kekuatan di ASEAN diakibatkan oleh persepsi ancaman komunis dari suatu kekuatan luar. Sekarang ini enam negara Teluk telah membentuk Dewan Kerjasama Teluk yang menghadapi tantangan Iran Syiah. Dari semua kasus ini kita bisa juga mencatat suatu arus unsur ideologi di balik ancaman yang menyebabkan negara-negara mengabaikan perbedaan sistem mereka sendiri jika ada. Perbedaan sistem seperti ini muncul hanya di ASEAN di mana sistem-sistem politik yang sangat berlainan hidup bersama (coexist) dalam kerangka kerjasama

regional. Ini tidak menjadi masalah bagi CMEA dan MEE karena sistem-sistem politik mereka memiliki koheren tertentu -- negara-negara sosialis pada kelompok pertama dan demokrasi liberal pada kelompok terakhir.

Di Asia Selatan tidak ada persepsi bersama akan ancaman luar. India menganggap Cina sebagai ancaman dan merasa bahwa semua kekuatan *regional* ekstra sebaiknya dicegah. Pakistan berpendapat bahwa Cina adalah kekuatan Asia Selatan dan berhak bersuara dalam setiap kejadian di Asia Selatan. Beberapa negara Asia Selatan merasa tenteram dengan mendekatkan diri pada kekuatan Amerika. Beberapa ingin memanfaatkan Cina sebagai "*faktor countervailing*" vis a vis apa yang mereka rasakan sebagai keunggulan India. Tanpa suatu kesepakatan mengenai persepsi ancaman luar, telah diusahakan untuk menonjolkan kemiskinan sebagai ancaman bersama negara-negara bersangkutan dan kerjasama regional akan memudahkan perang melawan kemiskinan dan mengurangi ketegangan internasional di kawasan. Kendatipun tesis yang bergaya liberal ini, kedengarannya masuk akal dan menarik, agaknya keliru dan makanya tidak dapat menjadi landasan pengembangan kerjasama regional.

Sulit untuk menjadikan kemiskinan musuh bersama yang jelas sebagai ancaman sehingga negara-negara suatu kawasan akan merasa perlu dan ingin bekerjasama. Kendatipun mitologis mengenai masalah tersebut, si miskin tidak pernah menjatuhkan suatu negara; hanya kelas menengah. Ini terjadi benar bahkan pada revolusi Bolshevik dan Cina. Oleh karena itu bahkan setelah revolusi proletar kelas menengah memperoleh kekuasaan dan nilai-nilai kelas menengah memperoleh kemenangan. Kedua untuk menurunkan ketegangan antarkawasan tanpa suatu tanda ancaman luar yang jelas tidaklah mudah. Seringkali perselisihan antarkawasan -- seperti perairan sungai -- dipakai sebagai alasan untuk menyembunyikan ketidakmampuan pemerintah, terutama bila suatu negara menjauhi diri dari tetangganya dalam usaha mencari identitasnya. Situasi ini semakin rumit jika agama dipakai sebagai faktor dominan dalam identitas dan sikap menjauhkan diri dari tetangga diambil atas dasar perbedaan agama. Kesulitan ini tidak ada dalam lingkungan Eropa atau Asia Tenggara yang sekuler, karena agama tidak terlalu jauh mencampuri politik hubungan internasional kendatipun ada usaha-usaha ke arah itu. Namun demikian di Asia Selatan identitas atas dasar agama telah ditegaskan dalam perumusan identitas nasional dan ini pada gilirannya menciptakan suatu kepentingan tetap (*vested interest*) dalam hal perbedaan antara agama daripada warisan nilai-nilai peradaban bersama.

Kerjasama kawasan di MEE, CMEA dan ASEAN didasarkan atas peningkatan interaksi politik dan perdagangan di antara negara-negara bersangkutan. Sayangnya dalam konteks Asia Selatan kedua kategori interaksi ini

telah ditekan serendah mungkin dengan alasan yang nyata bahwa negara-negara yang lebih kecil takut bahwa hubungan perdagangan yang lebih erat bisa mengakibatkan dominasi kekuatan yang lebih besar. Segala usaha untuk memadukan perspektif politik dicela sebagai hegemonisme.

Dalam keadaan yang sangat sulit ini, dibutuhkan keberanian maupun wawasan para pemimpin Bangladesh untuk mengatakan usul Kerjasama Kawasan Asia Selatan. India semula menganut sikap yang "low profile" karena ia merasa bahwa antusiasme akan merupakan "ciuman kematian." Sementara Nepal, Bhutan, dan Srilangka menyokong usul tersebut, Pakistan berkeberatan. Kendatipun ada keberatan-keberatan seperti ini di pihak pemerintah dan kecurigaan di kalangan elit, gagasan SARC merebut hati rakyat dan mengalami kemajuan, kendatipun sangat hati-hati dan bertahap.

SARC harus didekati secara realistis dan dirancang secara hati-hati. Terlalu riskan untuk mengharapakan sesuatu terlalu tinggi yang belum tentu bisa dipenuhi. Kesulitan dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan mengenai isu-isu politik dan keamanan dalam konteks Asia Selatan sebagai landasan pengembangan SARC telah diketahui dan oleh karenanya tidak diambil keputusan yang terburu-buru untuk menghadapi pendekatan lainnya di forum-forum kerjasama regional lainnya. Makanya diputuskan bahwa SARC, sebaiknya memulai kerjasama di bidang-bidang yang lain di luar bidang politik internasional, keamanan dan bidang-bidang yang "high profile" seperti peningkatan perdagangan. Bidang kerjasama yang dipilih adalah pertanian, pembangunan pedesaan, telekomunikasi, kesehatan, pengawasan kependudukan, meteorologi, olahraga dan kebudayaan. Juga disepakati bahwa semua keputusan akan diambil atas dasar kebulatan suara.

Pengalaman kerjasama oleh panitia-panitia yang dibentuk untuk sembilan bidang kerjasama tersebut sangat membesarkan hati, dan pertemuan menteri di New Delhi pada 1 Agustus 1983 menandatangani deklarasi yang secara resmi membentuk SARC. Pertemuan-pertemuan selanjutnya pada tingkat menteri luar negeri telah menghasilkan keputusan bahwa Pertemuan Puncak SARC akan diselenggarakan di Dakka dalam bulan Desember 1985, dan diharapkan bahwa dengan pertemuan tersebut SARC akan menjadi organisasi yang bersemangat untuk meningkatkan kerjasama regional. Masalah-masalah tertentu perlu dipecahkan -- sementara telah disetujui bahwa SARC sebaiknya memiliki sekretariat tetap, belumlah ditetapkan di mana, kapan, dan strukturnya bagaimana.

Kemungkinan-kemungkinan kerjasama regional di Asia Selatan tidak terbatas. Pemanfaatan air sungai, pengangkutan, telekomunikasi, dan pembangkit tenaga listrik adalah beberapa bidang kerjasama yang akan sangat

menguntungkan. Bangladesh dan wilayah timur laut India secara simbiotik berkaitan dari segi pembangunan. Sementara perbatasan maritim antara India, Birma, Indonesia dan Muangthai telah diselesaikan dan demikian juga Maldives dan Srilangka, perbatasan dengan Pakistan dan Bangladesh masih perlu diselesaikan. India dan Bangladesh masih berselisih mengenai pembagian air Sungai Gangga.

Hambatan utama pengembangan kerjasama tersebut adalah kecurigaan yang merupakan warisan perpecahan. Sementara negara-negara kecil yang merupakan pecahan dari India menguatirkan negara besar. Sindrom negara kecil yang ragu-ragu bekerjasama dengan tetangga yang lebih besar, didasarkan alasan kecilnya jumlah penduduk. Sering dilupakan bahwa perpecahan itu sendiri disebabkan oleh kecurigaan penduduk negara-negara yang lebih kecil, dan makanya kelonggaran yang diberikan terhadap tetangga-tetangga yang lebih kecil dilihat sebagai penghinaan dari penduduk negara yang lebih besar. Kerjasama harus merupakan proses dua arah dan khususnya dalam hal ini berdasar warisan sejarah yang berupa tuntutan bahwa negara yang lebih besar dalam bermurah hati kepada negara yang lebih kecil ada batasnya. Tidak seperti kasus-kasus lain dari negara-negara yang terpecah-belah, di sini penerimaan partisipasi itu sendiri telah merupakan tanda kemurahan hati dan keinginan akan hidup berdampingan secara damai. Kemudian usaha untuk mencabut kelonggaran satu arah dari negara tetangga yang lebih besar cenderung mengakibatkan kecurigaan lebih jauh.

Masa depan SARC akhirnya akan ditentukan oleh kepentingan keamanan dan politik, karena usaha kerjasama regional yang dirancang hati-hati melalui bidang-bidang kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), akhirnya diarahkan ke bidang ekonomi dan akhirnya politik dan keamanan. Di sini faktor nuklir sedang membayangi anak benua. India maupun Pakistan belum menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). India belum menandatangani perjanjian itu karena merasa bahwa perjanjian tersebut tidak menyebutkan masalah proliferasi yang berkembang semakin pesat, yang mengabsahkan persenjataan nuklir dan bersifat diskriminasi dalam perlindungan bagi negara-negara bersenjata nuklir dan non-nuklir, bahkan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan perancangan dan produksi persenjataan. Pakistan mengatakan ia belum menandatangani perjanjian itu sendiri karena India belum menandatangani, dan akan menandatangani setelah India. Dengan perkataan lain, sementara perhatian India terhadap NPT bersifat global, perhatian Pakistan semata-mata berorientasi India.

India melakukan percobaan nuklir damai pada tahun 1974 ketika percobaan nuklir damai sebagai kategori terpisah telah diakui negara-negara adikuasa, dan di mana masalah pokok perjanjian terpisah di antara mereka,

yang telah dilakukan berkali-kali, buku-buku teks telah ditulis, dan percobaan-percobaan tersebut dibawa dalam simposium-simposium IAEA. Sejak itu opini dunia tidak mengakui lagi keberadaan PNES serta tidak dianggap ekonomis.

Pakistan memulai program pembangunan senjata nuklir, barangkali untuk alasan yang dikemukakan Bhutto sebagai "Mitos Kemerdekaan" bahwa hanya negara-negara dengan senjata nuklir dapat benar-benar merdeka dalam lingkungan internasional dewasa ini, barangkali untuk alasan peradaban sebagaimana dikemukakan Bhutto dalam kesaksian menjelang kematiannya atau mengantisipasi kemampuan India yang diramalkan Bhutto dari 1964. Program yang dimulai tahun 1972 telah mencapai kematangan setelah satu dasawarsa dan sekarang diketahui umum bahwa Pakistan telah memperoleh atau hampir mencapai kemampuan penguasaan senjata nuklir. Pakistan mungkin melakukan atau tidak melakukan ujicoba senjata nuklirnya. Pakistan memiliki hak yang sama untuk memiliki senjata-senjata nuklir, sebagaimana AS, Uni Soviet, Cina, Inggris, Prancis dan Israel dan Afrika Selatan; dua negara yang disebut terakhir dicurigai telah memiliki senjata nuklir rahasia. India tidak lagi mempersoalkan hak Pakistan menjadi negara nuklir seperti ketika mempersoalkan hak Cina menjadi negara nuklir. Namun demikian India telah mengeluarkan pernyataan bersama AS mengenai ketidakberaatannya terhadap amandemen Symington bagi Pakistan sementara menggunakan amandemen tersebut untuk mengingkari kewajiban-kewajibannya dua dasawarsa yang lalu menyangkut reaktor nuklir Tarapur India. India juga memperjelas bahwa ia mungkin harus mengembangkan nuklir jika dalam persepsinya ditegaskan bahwa Pakistan telah merakit senjata-senjata nuklir. Harapan India adalah bahwa Pakistan bisa mengamati hambatan-hambatan yang diamati India untuk tidak membangun gudang senjata nuklir kendatipun India telah menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan persenjataan.

Pakistan mengatakan bahwa programnya hanya untuk maksud-maksud damai tetapi sejauh ini belum menjelaskan bagaimana pengayaan (enrichment) uranium pada skala industri cocok dengan program-program perdamaian di mana reaktor pembangkit tenaga tidak menggunakan uranium tersebut. Ini telah menciptakan masalah-masalah kredibilitas. Pakistan telah menawarkan usul-usul berikut ini dan mengklaim bahwa usul-usul ini membuktikan ketulusan hatinya:

- a. India dan Pakistan sebaiknya menandatangani NPT;
- b. Seluruh Asia Selatan sebaiknya menjadi zona bebas nuklir;
- c. India dan Pakistan sebaiknya sepakat terhadap pemeriksaan bersama untuk saling meyakinkan bahwa tidak satu pihak pun akan membuat senjata.

India merasa bahwa semua usul tersebut dirancang untuk membuat India melucuti persenjataan *vis a vis* Cina yang bersenjata nuklir. Pakistan menyanggah dalam konteks yang berbeda bahwa Cina merupakan satu kekuatan Asia Selatan tetapi tidak ingin membawa Cina ke dalam pembahasan-pembahasan zona bebas senjata nuklir Asia Selatan. Sementara Pakistan menyoroti kepentingan keamanannya *vis a vis* kemampuan nuklir India, ia mengabaikan sepenuhnya kepentingan India terhadap kemampuan nuklir Cina yang telah menganggap dirinya memiliki peranan untuk memberi "pelajaran" kepada tetangganya menurut kehendaknya.

Kedua, anjuran untuk menandatangani NPT pada tahap ini di mana perjanjian tersebut hanya membantu mengabsahkan persenjataan nuklir negara-negara berkekuatan nuklir dan tidak membantu mementingkan penyebaran nuklir menimbulkan kesimpulan di India bahwa Pakistan bertindak sebagai agen negara adikuasa untuk menjerat India ke dalam NPT.

Ketiga, usul untuk melakukan pemeriksaan bersama hanya merupakan pemberian perlindungan penuh melalui "pintu belakang." Usul-usul Pakistan tersebut yang menentang prinsip dasar kebijakan India mengenai perjuangan perlucutan senjata menambah keragu-raguan apakah Pakistan sungguh-sungguh terhadap usul-usulnya ataukah mengajukan mereka sebagai "basa-basi."

Keempat, penolakan India atas usul Zona Bebas Senjata Nuklir mencapai titik puncaknya ketika Perdana Menteri Morarji Desai menolaknya pada sidang khusus PBB mengenai Perlucutan Persenjataan Pertama pada tahun 1978 dan ia juga memberikan alasan-alasannya. Tetapi usul diulangi lagi tanpa memperhatikan isu-isu yang dikemukakannya. Bahkan Zona Bebas Senjata Nuklir Amerika Latin yang banyak dipublikasikan tidak sepenuhnya efektif tujuh belas tahun setelah diumumkan ketika Argentina maupun Brasilia belum memberlakukannya.

India selalu berpandangan bahwa yang disebut pendekatan pengawasan persenjataan bersifat mekanistik dan tidak dapat menggantikan pendekatan politik yang akan meningkatkan kerjasama dan pengertian di antara negara-negara. Pendekatan pengawasan persenjataan dipertimbangkan oleh kalangan kelompok kekuatan yang ingin tetap bermusuhan untuk jangka waktu yang lama, sementara pendekatan kerjasama ekonomi dan pengertian politik dimaksudkan untuk menghapuskan permusuhan di antara negara-negara Asia Selatan dan mengarahkannya persahabatan yang menguntungkan.

Pendekatan Pakistan tampaknya menghadapi suatu permusuhan abadi dengan India dan jarak antara kedua negara. Mungkin sekali penguasa elit Pakistan belum memikirkan dampak pendekatan mereka dan juga proses

yang digerakkan oleh usul SARC akan berhasil serta kerjasama politik, keamanan, dan ekonomi akan muncul sebagai permulaan yang hati-hati dan "modest." Ketika hal ini terjadi, penghargaan akan diperoleh Bangladesh, yang memprakarsai usul SARC dan Srilangka dan Nepal yang secara konsisten mendukungnya dan yang terpenting rakyat anak benua yang telah menyatakan hak mereka bagi perdamaian dan kerjasama menentang ketakutannya sendiri serta kegelisahan berbagai kalangan penguasa elit.

Asia Selatan dan Kepentingan Negara-negara Besar*

K. SUBRAHMANYAM

Asia Selatan berbatasan dengan dua negara besar -- Cina dan Uni Soviet. AS telah menciptakan suatu komando sentral dengan yurisdiksi atas salah satu dari negara-negara di Asia Selatan. AS memperlakukan Pakistan sebagai negara garis depan dan menjalin hubungan keamanan dengan negara itu. Cina pernah berperang dengan India, pernah mengancam untuk turun tangan dalam perang India-Pakistan pada tahun 1965 dan mendapat tekanan dari AS untuk turun tangan dalam perang India-Pakistan pada tahun 1971. Satuan Tugas Armada ke-7 AS telah dikirim ke Teluk Benggala dalam salah satu latihan yang menunjukkan penggunaan kekerasan tanpa perang. Beberapa mungkin akan menganggap Afghanistan sebagai salah satu negara Asia Selatan. Bahkan kalau tidak, intervensi Uni Soviet di Afghanistan telah mempunyai dampaknya pada Pakistan. Karena itu Asia Selatan merupakan daerah interaksi ketiga negara besar itu. Akan tetapi bersamaan dengan itu harus diakui pula bahwa dampak ketiga negara besar tersebut di Asia Selatan lebih terbatas daripada di Asia Tenggara, Asia Barat dan Asia Barat Daya yang mengapit kawasan Asia Selatan.

Kepentingan serta interaksi ketiga negara besar di kawasan Asia Selatan telah mendahului dekolonisasi. Lenin pernah berbicara mengenai jalan ke London dan Paris melalui Calcutta. AS mengadakan pengangkutan melalui udaranya secara besar-besaran ke Cina dari India selama Perang Dunia II. Daerah itu mempunyai peranan yang strategis pada waktu Perang Dunia I dan II. Dengan India sebagai pangkalan dalam Perang Dunia I tentara India digunakan untuk membebaskan Mesopotamia (sekarang Irak) dan jajahan Jerman

*Terjemahan makalah "South Asia and Major Power Interests," yang dibawakan oleh K. Subrahmanyam, Direktur IDSA New Delhi, pada Konferensi Indonesia-India IV di Jakarta, 19-20 Agustus 1985. Penterjemahnya Daniel SETYAWAN, staf CSIS.

di Afrika. Selama Perang Dunia II India merupakan pangkalan bagi operasi untuk membebaskan Birma maupun bagi Komando Asia Tenggara. Selama beberapa tahun setelah dekolonisasi AS berharap bahwa tentara India akan tersedia bagi Barat untuk memainkan peranan di Asia Barat. Setelah punahnya harapan akan hal itu AS berpaling mencari bantuan Pakistan untuk membangun suatu struktur keamanan guna membendung Uni Soviet. Demikian pula di Asia Tenggara mereka membentuk SEATO (Southeast Asia Treaty Organisation). Penolakan India untuk ikut serta dalam pakta militer dalam rangka usaha global untuk membendung daratan komunis yang sangat luas itu menyebabkan AS mendukung Pakistan dalam masalah Kashmir dan mempersenjatai Pakistan dalam tahun lima puluhan. Dalam kurun waktu yang sama politik non-blok Indonesia telah pula memancing pelbagai usaha untuk menggoncangkan stabilitas negara itu. Dalam tahun empat puluhan dan awal tahun lima puluhan negara-negara Komunis juga percaya akan penyebarluasan revolusi. Karena itu pemberontakan baik di India maupun di Indonesia didukung oleh negara-negara komunis. Pada awal tahun lima puluhan Uni Soviet maupun Cina telah menghentikan dukungan mereka bagi pemberontakan-pemberontakan di India. Cina telah mengadakan Perjanjian Panch Sheel dan India-Cina mengalami bulan madu yang singkat. Uni Soviet mulai meningkatkan hubungannya dengan India setelah masa Stalin berakhir, rupanya karena persengketaan mereka dengan Cina mulai meruncing.

Dalam tahun lima puluhan ketika AS mendirikan pangkalan-pangkalan komando udara strategis di seluruh dunia, pangkalan udara Peshawar dibangun di Pakistan dan dari pangkalan inilah Gary Powers telah bertolak dalam misi U-2 yang gagal itu. Mereka juga mempunyai sebuah pangkalan pengawasan serba elektronis di Badkher untuk memonitor Uni Soviet. AS juga membantu kaum pemberontak Khampa di Tibet dengan menggunakan wilayah-wilayah Nepal, Muangthai dan Birma Utara. AS dan India sangat berbeda paham mengenai masalah Kashmir, bantuan senjata bagi Pakistan dan dekolonisasi Goa. Bersamaan dengan itu AS memberi bantuan makanan dan ekonomi kepada India dalam jumlah yang besar. Hal ini agaknya terdorong oleh persepsi mereka bahwa India dan Cina merupakan saingan. Bantuan ekonomi AS terbatas pada pembangunan infrastruktur serta dukungan bagi sektor industri swasta dan tidak dimaksudkan untuk pengembangan industri dasar atau sektor industri pemerintah. Pakistan diperlakukan sebagai model pembangunan oleh Kelompok Penasihat Harvard (Harvard Advisory Group) dan titik berat terletak pada industri untuk konsumsi yang diurus oleh sektor swasta.

Dalam periode setelah Konperensi Bandung Pakistan mulai menggarap Cina dan negara ini juga membalas langkah Pakistan ini. Cina, walaupun in-

teraksinya dengan India meningkat, dengan sengaja mengambil sikap tak me-mihak (non-commitment) dalam persengketaan mengenai Kashmir.

Setelah kunjungan Jawaharlal Nehru ke Moskwa pada tahun 1955 dan kunjungan balasan Khrushchev dan Bulganin ke India setelah itu pada tahun yang sama hubungan India-Uni Soviet meningkat dengan sangat cepatnya. Uni Soviet menandatangani Perjanjian Bhilai dan membantu rencana industri-alisasi India dengan bantuan material. Uni Soviet akhirnya mendukung India dalam masalah Kashmir dan Goa dan sejak tahun 1959 ketika sengketa perba-tasan India-Cina menjadi terang-terangan, Uni Soviet secara implisit menun-jukkan dukungannya untuk India.

Persengketaan yang dimulai oleh Cina melawan India bukanlah semata-mata sengketa perbatasan. Hal ini juga mempunyai implikasi-implikasi bagi hubungan Cina-Uni Soviet, perebutan kekuasaan dalam negeri RRC dan mungkin bahkan bagi filsafat pembangunan Cina. Jelaslah sekarang bahwa Liu Shao Chi serta Deng Xiao Ping lebih condong pada strategi pembangunan yang agak analog dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Nehru di In-dia dan pertentangan ideologi serta perebutan kekuasaan dalam negeri RRC menjadikan Nehru dan India penjahat di mata orang Cina. Makin parahnya perpecahan Cina-Uni Soviet dan berkembangnya persahabatan Uni Soviet de-ngan India telah pula menjadikan India sasaran kegusaran Cina.

Ketika Cina menyerang India pada tahun 1962 AS bergegas mengirimkan suplai militer non-senjata maut dan juga menjanjikan suatu program bantuan militer secara besar-besaran untuk memperkuat kemampuan militer India. Akan tetapi kemudian menjadi jelas bahwa AS enggan menjengkelkan Pakis-tan dan membantu India membangun kemampuan pertahanan yang berarti. Sebaliknya Uni Soviet, setelah mula-mula agak ragu-ragu karena pada waktu Cina menyerang India terjadi krisis peluru kendali Kuba, menawarkan sejumlah besar perlengkapan militer. Inilah permulaan dari kerjasama militer India-Uni Soviet.

Pada tahun 1965 Pakistan mulai "Operasi Gibraltar" untuk memasukkan secara diam-diam pasukan komando ke dalam Lembah Kashmir dengan hara-pan mengobarkan suatu pemberontakan. Operasi itu gagal dan meningkat menjadi perang benar. Walaupun AS telah memberi suatu jaminan kepada In-dia (pada tingkat Presiden Eisenhower) bahwa seandainya Pakistan menggu-nakan senjata bantuan AS terhadap India, AS akan mengambil tindakan terhadap Pakistan sesuai dengan prosedur konstitusionalnya, pada bulan April 1965 ketika Pakistan melancarkan suatu aksi terbatas terhadap India di Rann of Kutch, AS tidak bertindak sesuai dengan jaminannya itu. Ketika pecah perang pada bulan September 1965 AS menggunakan embargo senjata baik terhadap Pakistan maupun India. Karena perlengkapan AS yang dimiliki India sedikit maka embargo tersebut berakibat lebih parah bagi Pakistan.

Dalam peperangan ini ketika Pakistan kehabisan persediaan Cina menyampaikan suatu ultimatum kepada India. Namun pada 23 September dicapai gencatan senjata dan Uni Soviet bertindak sebagai penengah bagi India dan Pakistan serta menghasilkan perjanjian Tashkent.

Pada tahun-tahun berikutnya ketika sengketa Cina-Uni Soviet memuncak dalam pertempuran-pertempuran sengit di Ussuri, Cina dan AS berusaha menjalin hubungan satu sama lain dan dalam meningkatkan hubungan ini Pakistan memainkan peranan yang penting. Cina juga menjadi pensuplai senjata yang utama bagi Pakistan. Cina juga menerbitkan artikel-artikel dalam *Beijing Review* untuk menghasut para ekstremis Naxalite di India serta mulai mensuplai senjata kepada kaum pemberontak Naga dan Mizo. Pakistan mendirikan kamp-kamp latihan bagi para pemberontak India di Benggala Timur bersama Cina. Cina juga mulai membangun jalan raya ke anak benua itu -- jalan raya Amico melalui Kodari dan Kathmandu ke Nepal dan jalan raya Karakoram ke Kahsmir yang diduduki oleh Pakistan. Jalan-jalan raya ini secara komersial tidak berarti tetapi merupakan suatu ancaman militer bagi anak benua itu.

Dalam pemilihan umum di Pakistan Desember 1970 Liga Awami di Benggala Timur memperoleh kemenangan mutlak di belahan timur Pakistan dan suatu mayoritas secara keseluruhan di Majelis Nasional Pakistan. Akan tetapi tentara Pakistan dan Z.A. Bhutto yang memperoleh mayoritas di Pakistan Barat bersekongkol untuk mencegah pemimpin Liga Awami dengan mayoritas bersama mengambil-alih kekuasaan dengan melancarkan penindasan dan pembunuhan bangsa di Benggala Timur sehingga sepuluh juta jiwa mengungsi ke India. Suatu perang pembebasan nasional dilancarkan oleh Bangladesh terhadap tentara pendudukan Pakistan. Pakistan tidak akan mencari suatu penyelesaian militer seandainya tidak mendapat dukungan dari AS dan Cina bersama-sama.

Karena arus pengungsi semakin meningkat, India berusaha menekan Pakistan melalui jalur diplomatik untuk mencapai suatu penyelesaian. Pada tahap ini Dr. Kissinger mengadakan kunjungan rahasianya ke Beijing dari Pakistan dan menjadi jelas bahwa telah berkembang suatu kesepakatan Pakistan-AS-Cina yang dapat mempunyai dampak yang buruk bagi keamanan India. Akibatnya India, dalam rangka menciptakan ketidakpastian bagi Pakistan, Cina dan AS, mengadakan Perjanjian India-Soviet 9 Agustus 1971. Perjanjian ini bukanlah sebuah perjanjian pertahanan dan klausul konsultasi dalam Pasal 9 dari perjanjian ini menciptakan cukup ketidak-pastian untuk menjerakan petualangan oleh negara-negara dari luar kawasan. Hal ini dapat dilihat ketika Dr. Kissinger minta kepada Cina untuk mengadakan tekanan militer pada India bulan Desember 1971 dan Cina menolak.

Meskipun Kongres, media dan Departemen Luar Negeri AS merasa simpatik terhadap kesulitan India, Dr. Kissinger merasa bahwa AS harus mendukung Pakistan untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada Cina. Kendati sikap AS dan Cina, Bangladesh muncul sebagai negara yang merdeka.

Dalam tahun 1970-an ada tuduhan-tuduhan mengenai intervensi terselubung negara-negara besar dalam urusan negara-negara anak benua ini. Intervensi-intervensi terselubung semacam itu biasanya soal persepsi dan tidak dapat dibuktikan. Orang percaya bahwa di Bangladesh kudeta tahun 1975 di negara itu mempunyai hubungan luar dengan agen-agen AS. Dalam kesaksiannya dalam sel maut, Bhutto menghubungkan kejatuhannya dengan sikap yang diambilnya mengenai masalah nuklir di mana Dr. Kissinger mengancam bahwa dia akan dijadikan contoh yang mengerikan. Dalam media dan Kongres AS telah dikatakan bahwa Cina telah membantu Pakistan dengan rancangan bom nuklirnya yang keempat. Tinjauan di atas itu menunjukkan bahwa Asia Selatan merupakan suatu kawasan intervensi dan perhatian ketiga negara besar dunia selama tiga puluh tahun terakhir sejak dimulainya dekolonisasi.

Bersamaan dengan itu harus diakui bahwa intervensi ketiga negara besar itu agak ditahan. Kawasan Asia Selatan merupakan pewaris tradisi kebudayaan yang sama dan area itu adalah India sentris walaupun hal ini mungkin ditolak oleh beberapa negara tetangga India yang mencari suatu identitas yang bebas dari orientasi ke India. Dengan menganut politik non-blok, berkat besarnya penduduk, stabilitas politik dan kemampuannya sendiri India mampu membujuk AS dan Uni Soviet untuk menahan diri. Pada tahun 1960-an Cina meragukan Persatuan India dan karenanya menempuh jalan petualangan. Dalam hal ini mungkin ia dipengaruhi perspektif yang berasal dari Pakistan serta beberapa kalangan akademisi Barat. Dewasa ini terdapat apresiasi yang lebih baik bahkan di Cina mengenai kenyataan tentang India dan akibatnya Cina juga agak mengekang diri dalam politiknya terhadap Asia Selatan. Uni Soviet menghargai hubungan baiknya dengan India. Meskipun terjadi pasang-surut dalam hubungannya dengan India, AS telah menahan diri dalam perilakunya karena India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia dan Kongres AS kiranya tidak akan menyetujui tindakan permusuhan secara terang-terangan terhadap India. (Itulah sebabnya mengapa Nixon dan Kissinger memainkan peranan yang meragukan tanpa sepengetahuan Kongres pada tahun 1971).

Dengan latar belakang tersebut maka kepentingan ketiga negara besar itu di Asia Selatan dewasa ini dapat dianalisa. Dalam rangka pelaksanaan politik pembendungannya terhadap Uni Soviet di seluruh dunia AS berusaha untuk memakai Pakistan sebagai saluran untuk mengirimkan senjata kepada para pemberontak Afghanistan dan menuntut suatu harga bagi intervensi Uni Soviet di Afghanistan serta kehadiran angkatan bersenjata di negara itu. AS

juga berkepentingan untuk mendukung rezim di Pakistan untuk memastikan bahwa ia tidak bersepakat dengan Soviet. Itulah sebabnya AS memberi bantuan senjata kepada Pakistan, mulai pada tahun 1981, dan berjanji akan memberi suatu paket bantuan senjata dan ekonomi lagi setelah berakhirnya yang sekarang ini. Ketakutan AS bahwa Pakistan akan mengadakan kesepakatan dengan Uni Soviet ini juga telah menyebabkan AS meninggalkan amandemen Symington dan menutup mata terhadap usaha Pakistan di bidang nuklir.

AS juga mempunyai harapan-harapan tertentu mengenai peranan Pakistan di Teluk Parsi. Personal militer Pakistan yang digelar di negara-negara sekitar teluk itu dalam jumlah besar kebanyakan bukan satuan-satuan militer reguler Pakistan tetapi serdadu bayaran. Personal militer Pakistan ini membantu mempertahankan *status quo* di kawasan teluk tersebut -- yang juga menjadi sasaran AS. Kedua pertimbangan ini memberi Pakistan pengaruh atas AS.

Pada waktu yang sama Pakistan telah menerima beban para pengungsi Afghanistan. Banyak orang Pakistan percaya bahwa para pengungsi Afghanistan ini kemungkinan besar tidak akan kembali dan akan merupakan tambahan yang permanen bagi penduduk Pakistan. AS menyadari bahwa dengan berlalunya waktu tekanan-tekanan atas Pakistan untuk menerima kenyataan di Afghanistan akan bertambah. AS juga ragu-ragu mengenai hari depan negara Pakistan -- apakah sistem yang sekarang ini akan berlanjut ataukah akan timbul suatu pergolakan politik. Bila yang terakhir ini terjadi, AS juga khawatir akan akibat buruk seperti yang terjadi di Iran. Karena itu akhirnya ini AS berusaha melindungi taruhannya dengan lebih banyak memperbaiki hubungan dengan India.

Kepentingan AS di India pada hakikatnya adalah memperlemah apa yang dilihatnya sebagai keuntungan Uni Soviet mempunyai hubungan bersahabat dengan India yang berhasil. Perspektif AS mengenai seluruh dunia mengalami distorsi akibat perhatiannya yang berlebihan atas persaingannya melawan Uni Soviet dan penilaiannya mengenai bangsa-bangsa lain berdasarkan sikap mereka terhadap persaingan AS-Soviet. AS masih harus mengembangkan suatu pengertian tentang sikap non-blok yang dikacaukannya dengan netralitas dalam persaingan AS-Uni Soviet. Bahwa bangsa-bangsa lain di dunia ini bisa menempuh kebijaksanaan demi kepentingan nasional mereka sendiri dan mungkin mengatur hubungan mereka dengan kedua negara adikuasa itu atas dasar timbal-balik tanpa memihak pada yang satu atau yang lain dalam persaingan AS-Uni Soviet, masih harus dimengerti dan diterima oleh AS. Kendati kesalahan persepsi cukup mendasar mengenai non-blok ini, sejumlah pertimbangan telah mulai mempengaruhi persepsi dan perumusan kepentingan AS mengenai India. Walaupun tidak secara jelas dinyatakan di depan umum, AS

menvadari bahwa hubungan Cina-Soviet mulai pulih secara lebih cepat daripada yang diakui di depan umum oleh kedua belah pihak. Cina tidak dapat dimainkan sebagai kartu terhadap Uni Soviet. AS ingin mempertahankan opsi-opsinya terhadap India jika hubungan Cina-Uni Soviet pulih dengan cepat. Harapannya ialah bahwa dengan pulihnya hubungan Cina-Soviet, tindakan-tindakan untuk mengimbangnya akan diperlukan oleh AS dan India. Akan tetapi persepsi di India agak berbeda. Walaupun diakui bahwa kemungkinan membaiknya hubungan Cina-Soviet cukup besar, hal itu tidak perlu menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan pada India.

Kegembiraan AS terhadap Cina sudah agak berkurang dan terdapat ketidakpastian mengenai Cina dalam periode setelah Deng. Pimpinan AS telah terkesan dengan peralihan pimpinan yang lancar di India setelah pembunuhan Ny. Gandhi serta dengan hasil pemilihan umum yang segera menyusulnya. Kepercayaan akan kestabilan yang mendasar di India makin bertambah. Penampilan ekonomi India yang mantap serta kemampuannya untuk melindungi dirinya terhadap akibat-akibat resesi dunia dan menghindari dari perangkap hutang mempunyai dampak yang positif bagi pimpinan AS. Juga terdapat harapan yang berlebihan mengenai kebijaksanaan liberalisasi ekonomi India dan keuntungan yang dapat diperoleh AS dari padanya. Meskipun kurang mengerti sikap non-blok, AS kini mempunyai penilaian yang agak lebih baik daripada sebelumnya, bahwa India merdeka dan otonom dalam mengambil keputusan dan bukan pengikut Uni Soviet. Itulah sebabnya langkah-langkah yang diambil AS akhir-akhir ini -- masih bersifat coba-coba -- untuk lebih luwes dalam alih teknologi serta penjualan senjata. Masih terlalu pagi untuk mengatakan apakah langkah-langkah itu akan menghasilkan interaksi yang berarti antara AS dan India. Akan tetapi langkah-langkah ini menunjukkan adanya sedikit pergeseran dalam pendekatan AS yang menguntungkan bagi perkembangan hubungan India-AS selanjutnya.

AS masih harus mengembangkan suatu taruhan strategis dalam suatu India yang kuat. Bahkan sementara menolak amandemen Symington dalam hubungannya dengan Pakistan dan setuju untuk tidak membiarkan perundang-undangan dalam negerinya merugikan hubungan perdagangan nuklirnya dengan Cina, Amerika Serikat tidak menepati kewajibannya terhadap India dalam hal reaktor Tarapur yang disuplai oleh AS. Suatu kompromi telah dicapai di mana Prancis mensuplai bahan bakar uranium. Tetap ada perbedaan-perbedaan yang tajam antara AS dan India mengenai penyebaran nuklir serta soal-soal keamanan dunia seperti SDI, hubungan Utara-Selatan, perbaikan moneter internasional. Kebanyakan dari masalah-masalah ini juga telah menimbulkan perpecahan antara AS dan dunia Non-Blok seluruhnya. Menurut persepsi AS India merupakan suatu negara yang dengan tegas menyuarakan

pandangan non-blok dan personifikasi perbedaan paham antara AS dan dunia Non-Blok.

Perhatian AS untuk Sri Lanka meningkat setelah Presiden Jayawardene berkuasa mula-mula sebagai Perdana Menteri pada tahun 1977. Kebijakan ekonomi liberal Jayawardene yang menitikberatkan penanaman modal asing memancing dukungan AS. Karena pelbagai sebab maka eksperimen pertumbuhan Sri Lanka yang terarah pada ekspor, ternyata tidak berhasil. Minat AS untuk Sri Lanka juga terlihat pada penawaran yang dilakukan melalui perantara oleh sebuah perusahaan yang didukung AS untuk memenangkan proyek minyak Trincomalee dan tercermin juga dari didirikannya stasiun pemancar Suara Amerika (Voice of America). Kedua transaksi ini mendapat kecaman pedas dari pihak oposisi di Sri Lanka sendiri. Ada tuduhan bahwa proyek minyak Trincomalee itu akan berguna sebagai stasiun pengisian bahan bakar bagi armada AS di Samudera Hindia dan bahwa stasiun pemancar Suara Amerika itu mungkin akan mencakup pula fasilitas-fasilitas pertahanan karena bidang serta operasi tertentu akan dilayani secara eksklusif oleh personal AS. Sri Lanka, sponsor utama deklarasi Zone Perdamaian Samudera Hindia, tidak lagi tertarik akan gagasan itu dan katanya sedang merencanakan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas istirahat dan rekreasi bagi angkatan laut negara-negara dari luar kawasan.

Meledaknya kekerasan antar-suku di Sri Lanka serta pemberontakan orang-orang Tamil cenderung memperkuat hubungan AS-Sri Lanka. Secara keseluruhan AS cenderung memainkan suatu peranan yang menahan inggit kepekaan dari pihak India. Akan tetapi ketika Sri Lanka menerima jasa Mossad Israel untuk melatih komandonya, AS ikut terlibat karena kedutaan besar AS mengurus kepentingan Israel sehubungan dengan tiadanya hubungan diplomatik antara Sri Lanka dan Israel. Sri Lanka juga berupaya memperoleh beberapa perlengkapan AS untuk melawan pemberontakan.

Kadang-kadang muncul laporan-laporan dalam pers yang bersifat spekulatif mengenai minat AS untuk memperoleh fasilitas di pelabuhan-pelabuhan Bangladesh dan kebanyakan laporan itu dibantah. Akan tetapi sebagian rakyat Bangladesh yang merasa jengkel dengan India mengenai masalah pemagaran perbatasan dan pembagian air Sungai Gangga bertanya mengapa Bangladesh tidak harus mempertaruhkan nasibnya dengan memihak kepada AS. Kemungkinan kecil sekali bahwa AS akan mengembangkan kepentingan yang berarti di Bangladesh.

Kepentingan AS di Nepal, yang mulai ketika ia menempuh kebijaksanaan membendung Cina, dilanjutkan dan AS merupakan salah satu negara pemberi

bantuan kepada Nepal. Harus diasumsikan bahwa AS masih memonitor Cina (kawasan Tibet) dari Nepal.

Kepentingan Soviet di Asia Selatan merupakan konsekuensi logis dari letak geografisnya. Pada tahun 1950-an Asia Selatan merupakan satu-satunya celah dalam lingkaran pembendungan yang mengurung daratan komunis. Kemudian dibangun pangkalan udara di Peshawar serta fasilitas-fasilitas pemantauan elektronis di Badber oleh AS. Ketika persengketaannya dengan Cina meningkat, Uni Soviet juga berkepentingan untuk mengembangkan hubungan dengan India sebagai suatu negara dan pengaruh tandingan di kawasan itu. Bertahun-tahun hubungan Uni Soviet dengan India merupakan salah satu dari sedikit keberhasilan bagi Uni Soviet dan merupakan pembenar dari model hubungan Uni Soviet dengan negara-negara Non-Blok yang sedang berkembang. Uni Soviet juga telah menjadi salah satu partner dagang terbesar India. Keterlibatan Uni Soviet dalam pelbagai krisis keamanan telah disinggung sebelumnya.

Kepentingan Soviet di anak benua ini telah meningkat sekali setelah intervensi diam-diam oleh Pakistan, AS serta Cina yang mendukung para pemberontak Islam melawan rezim Marxis di Kabul. Kehadiran angkatan bersenjata Uni Soviet di Afghanistan telah menimbulkan kepentingan langsung bagi Uni Soviet dalam perkembangan di Pakistan. Ada laporan-laporan mengenai pelanggaran udara oleh Angkatan Udara Afghanistan serta pemboman dan penembakan terhadap desa-desa tertentu. Markas besar semua kelompok pemberontak yang beroperasi di Afghanistan terletak di Peshawar. AS telah meningkatkan bantuan senjatanya kepada para pemberontak dan kemungkinan besar hal itu akan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Pada waktu yang sama Pakistan tampaknya tidak khawatir bahwa akan diadakan aksi militer Uni Soviet secara langsung terhadap wilayahnya. Hal ini jelas dari digelarkannya empat divisi tentara Pakistan di perbatasan Afghanistan sedangkan kekuatan lainnya yang terdiri dari 17-18 divisi telah digelar di sepanjang perbatasan India. Uni Soviet berada dalam posisi untuk menggunakan pengaruhnya atas Pakistan seandainya negara itu memilih berbuat demikian mengingat banyaknya jumlah orang di Pakistan yang tidak menyukai rezim yang didominasi oleh militer itu. Uni Soviet menempuh politik ganda terhadap Pakistan. Sekalipun Pakistan kadang-kadang diperingatkan sehubungan dengan peranannya sebagai saluran untuk bantuan senjata kepada para pemberontak, Uni Soviet juga menawarkan bantuan ekonomi dan teknik yang berarti kepada Pakistan. Pakistan juga sangat berhati-hati dalam peranannya mengenai Afghanistan dan telah berhasil mengusahakan agar tindakannya tidak akan melebihi batas toleransi Uni Soviet. Bukanlah suatu kebetulan bahwa kelompok-kelompok yang berjuang di Afghanistan,

yang semuanya bermarkas besar di Peshawar, tidak berhasil bergabung menjadi suatu front pembebasan nasional selama lebih dari lima tahun.

Ada spekulasi apakah minat Soviet atas India akan berkurang karena Uni Soviet secara progresif memulihkan hubungannya dengan Cina. Spekulasi AS mengenai hal ini sudah disinggung sebelumnya. Jelaslah bahwa hubungan antara Cina dan Uni Soviet tidak dapat kembali seperti dulu pada tahun 1950-an. Uni Soviet akan terus berusaha menandingi kekuatan Cina dengan meningkatkan kekuatan India dan Vietnam. Tak dapat diragukan lagi bahwa dengan membaiknya hubungan diplomatik antara Cina dan Uni Soviet diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengimbangnya dalam hubungan luar negeri India dan Vietnam. Politik non-blok memang dimaksudkan untuk hal itu. Penyesuaian-penyesuaian itu tidak perlu menyebabkan sifat dasar hubungan India-Soviet mengalami perubahan. Bahkan sekarang pun India mempunyai perbedaan pandangan dengan Uni Soviet -- mengenai masalah Afghanistan dan persoalan Perjanjian Nonproliferasi (penyebaran senjata nuklir) serta tindakan pengamanannya yang dilakukan secara diskriminatif.

Kepentingan Cina di kawasan ini serta tanda-tanda bahwa ia menahan diri akhir-akhir ini sudah disinggung di atas. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa Cina sudah tidak mempunyai kepentingan lagi di Asia Selatan. Taruhannya pada Pakistan tetap besar dan bantuannya kepada Pakistan dalam industri pertahanan berlangsung terus. Ada laporan mengenai bantuan Cina untuk makin memodernisasi jalan raya Karakoram dan jalan-jalan cabang lainnya serta lapangan terbang di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Ada spekulasi mengenai keterlibatan Cina dalam program senjata nuklir Pakistan dan bahwa Cina pada gilirannya telah memperoleh teknologi Barat melalui Pakistan. Cina telah mensuplai kapal angkatan laut kepada Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Selain itu masih ada bantuan senjata-senjata lain bagi Bangladesh.

Selama tiga-empat tahun terakhir ini Cina telah menghentikan bantuan senjatanya kepada para pemberontak Naga dan Mizo. Akhir-akhir ini Cina telah memperlihatkan suatu sikap konstruktif dalam mengembangkan hubungan dengan India. Sebuah perjanjian dagang penting yang meliputi US\$1 milyar ditandatangani pada bulan Agustus 1984. Mengenai banyak masalah internasional Cina menganut pandangan yang mendekati pandangan negara-negara Non-Blok. Meskipun telah terjadi perkembangan yang positif ini masih ada beberapa masalah penting yang belum terselesaikan antara India dan Cina. Yang terpenting di antara masalah-masalah ini adalah sengketa perbatasan. Sementara perundingan masih berlangsung terus untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini, usaha-usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip yang disetujui dan yang dapat menyelesaikan persoalan ini ternyata tidak

berhasil. Cina berkeinginan untuk tetap mempertahankan *status quo* yang muncul sebagai akibat kemenangannya dalam konflik militer tahun 1962. India merasa bahwa perbatasan di sebelah Barat harus berdasarkan atas prinsip-prinsip geografis yang dibatasi secara tepat (seperti misalnya puncak gunung atau batas air) dan tidak boleh berdasarkan situasi di medan yang dipaksakan dengan kekuatan militer.

Di samping sengketa perbatasan dengan India itu, Cina belum mengakui integrasi Sikkim dengan India. Cina juga belum menyelesaikan masalah perbatasannya dengan Bhutan. Perundingan demi perundingan telah diadakan antara Bhutan dan Cina mengenai masalah ini. India dan Cina mempunyai pandangan yang berbeda mengenai masalah Vietnam dan Kampuchea.

Dewasa ini tentara Cina dilengkapi dengan senjata konvensional dari akhir tahun 1950-an serta awal tahun 1960-an. Selama perang dengan Vietnam pada tahun 1979 Cina menyadari betapa besar kelemahannya dalam senjata konvensional. Sekarang Cina sudah memulai program modernisasinya termasuk juga modernisasi persenjataan. Program modernisasi persenjataan ini akan diamati dengan prihatin oleh semua negara tetangga Cina.

Uraian di atas telah menjelaskan bahwa ketiga negara besar dunia berusaha untuk merebut pengaruh di Asia Selatan dan mereka semua mempunyai kepentingan yang beraneka-ragam. Semua negara Asia Selatan merupakan negara Non-Blok dan hal ini memberi mereka kemampuan yang diperlukan untuk bergerak di antara negara-negara besar itu. India yang merupakan 73% wilayah Asia Selatan dan 77% penduduknya harus diperhitungkan oleh semua negara dari luar yang berusaha berpengaruh di kawasan itu. Di Asia Selatan dua bangsa telah dibangun dari India, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Sementara identitas India berasal dari beberapa ribu tahun yang lalu, bangsa-bangsa baru ini mempunyai masalah-masalah identitas. Mereka berusaha untuk menciptakan identitas yang terpisah dan hal ini mengharuskan mereka menjauhkan diri dari India.

Dengan adanya warisan kebudayaan yang sama, usaha mereka itu seringkali menyebabkan mereka dengan sengaja menciptakan permusuhan dan perasaan tidak aman terhadap negara tetangga mereka yang lebih besar. Dahulu dituduhkan bahwa India ingin membatalkan pembagian itu. Ini tidak lagi dapat dipercaya karena India mengembalikan wilayah Pakistan setelah setiap perang dan tentara India segera meninggalkan Bangladesh setelah perang. Sekarang tuduhan liarnya ialah bahwa India menginginkan hegemoni dan tuduhan itu tidak diperkuat dengan contoh-contoh yang spesifik.

Perasaan tidak aman yang diciptakan sendiri di antara beberapa negara tetangga India ini telah memberikan pembenaran dan peluang kepada negara-negara dari luar untuk campur tangan di Asia Selatan. Situasi ini kiranya akan terus berlanjut sampai saat timbul cukup kepercayaan di antara negara-negara tetangga India bahwa mereka dapat membangun identitas mereka berdasarkan kewilayahan mereka sendiri tanpa harus menciptakan rasa permusuhan terhadap negara tetangga mereka yang lebih besar. Mengingat pengalaman di tempat lain di dunia, maka hal ini mau tidak mau akan merupakan proses yang makan waktu. Sampai saat itu Asia Selatan harus hidup dengan beberapa kerawanan.

ANALISA

1978—1986

Nomor-nomor tahun 1978 s/d 1983 @ Rp 500,00

- 1/1978: PERSPEKTIF 1978 *(habis)*
- 2/1978: VIETNAM-KAMBOJA, SELAT MALAKA DAN MASALAH RASIAL *(habis)*
- 3/1978: PANCASILA ARTI DAN PENERAPANNYA *(habis)*
- 4/1978: DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL *(habis)*
- 5/1978: KEBUOAYAAN DAN PENDIDIKAN
- 8/1978: STRATEGI GLOBAL DAN ASIA TENGGARA
- 7/1978: BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
- 8/1978: BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI
- 9/1978: NEGARA-NEGARA ASEAN
- 10/1978: SUMPAH PEMUDA DAN PERSATUAN INDONESIA
- 11/1978: PERSAINGAN TIMUR-BARAT
- 12/1978: PEMBINAAN GENERASI MUDA *(habis)*
- 1/1979: PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL
- 2/1979: BEBERAPA MASALAH PEMBANGUNAN *(habis)*
- 3/1979: TIMUR TENGAH DALAM SOROTAN
- 4/1979: PERATAAN PENDAPATAN
- 5/1979: FDKUS ATAS AFRIKA
- 8/1979: PERJUANGAN DUNIA BARU
- 7/1979: PERANG MELAWAN KEMISKINAN *(habis)*
- 8/1979: ASIA TENGGARA BERGOLAK
- 9/1979: STRATEGI PEMBANGUNAN DITINJAU KEMBALI
- 10/1979: MENANJAKNYA DAN PROSPEK KAWASAN PASIFIK
- 11/1979: MENUJU PEMBAHARUAN PENDIDIKAN NASIONAL
- 12/1979: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 1/1980: BERBAGAI MASALAH EKONOMI INTERNASIONAL
- 2/1980: PEDESAAN FDKUS PEMBANGUNAN *(habis)*
- 3/1980: KAWASAN TELUK ARAB-PARSI DALAM PEREBUTAN *(habis)*
- 4/1980: MENGAMANKAN SUPLAI ENERGI
- 5/1980: KAWASAN SAMUDRA HINDIA FDKUS KETEGANGAN
- 8/1980: BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI
- 7/1980: JEPANG DALAM DUNIA YANG BERUBAH
- 8/1980: PERJUANGAN KEADILAN SOSIAL
- 9/1980: ASIA TENGGARA DALAM SOROTAN
- 10/1980: PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT
- 11/1980: PERKEMBANGAN DI AFRIKA
- 12/1980: WANITA, HAKIKAT DAN PANGGILANNYA
- 1/1981: BERBAGAI MASALAH NASIONAL *(habis)*
- 2/1981: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 3/1981: PEMBANGUNAN PEDESAAN *(habis)*
- 4/1981: RRC, CALON RAKSASA DUNIA *(habis)*
- 5/1981: ORIENTASI PEMBANGUNAN NASIONAL *(habis)*
- 8/1981: TIMUR TENGAH PUSARAN STRATEGIS
- 7/1981: SEGI-SEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
- 8/1981: PERKEMBANGAN DI ASIA TENGGARA *(habis)*
- 9/1981: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
- 10/1981: ASIA-PASIFIK DASAWARSA 1980-AN
- 11/1981: PENDIDIKAN DAN KOMUNIKASI
- 12/1981: PERTARUNGAN TIMUR-BARAT
- 1/1982: PERSPEKTIF EKONOMI *(habis)*
- 2/1982: FOKUS ASIA TENGGARA *(habis)*
- 3/1982: DEMOKRASI SOSIAL
- 4/1982: AKTUALITAS INTERNASIONAL
- 5/1982: INDUSTRIALISASI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL *(habis)*
- 8/1982: HUBUNGAN UTARA-SELATAN *(habis)*
- 7/1982: PEMERATAAN KESEJAHTERAAN
- 8/1982: PERSPEKTIF ASIA-PASIFIK
- 9/1982: MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN *(habis)*

10/1982: PEREBUTAN PENGARUH GLOBAL *(habis)*

11/1982: GARIS-GARIS BESAR PEMBANGUNAN PEDESAAN

12/1982: FDKUS KAWASAN SAMUDRA HINDIA

1/1983: SOSIALISASI

2/1983: AKTUALITAS INTERNASIONAL

3/1983: PEMBANGUNAN POLITIK

4/1983: DINAMIKA ASIA-PASIFIK

5/1983: BUNGA RAMPAI PEMBANGUNAN

8/1983: PERKEMBANGAN DI ASIA SELATAN DAN BARAT

7/1983: MENGGALAKKAN PARTISIPASI EKONOMI

8/1983: ASIA TENGGARA DAN DUNIA *(habis)*

9/1983: DINAMIKA INTERNASIONAL

10/1983: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

11/1983: MENUJU STRATEGI ENERGI

12/1983: UNI SOVIET DAN RRC

Nomor-nomor Tahun 1984 dan seterusnya @ Rp 750,00

1/1984: MELAKSANAKAN PANCASILA

2/1984: KERJASAMA EKONOMI PASIFIK

3/1984: PERSPEKTIF PELITA IV

4/1984: MASALAH KAMPUCHEA DAN INDONESIA-VIETNAM *(habis)*

5/1984: PENDIDIKAN DAN BEBERAPA TANTANGANNYA

6/1984: JEPANG DALAM MASA TRANSISI

7/1984: DAMPAK HUBUNGAN TIMUR-BARAT DI BEBERAPA KAWASAN

8/1984: MEMBANGUN DEMOKRASI

9/1984: PEMBAURAN DAN TANTANGANNYA

10/1984: MEMBANGUN PEDESAAN

11/1984: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA

12/1984: INDONESIA MEMPERLUAS CAKRAWALA

1/1985: MASALAH EKONOMI YANG RUMIT & PEMECAHANNYA

2/1985: PERKEMBANGAN DEMOKRASI & POLITIK INDONESIA

3/1985: MENGGALAKKAN KEGIATAN EKONOMI

4/1985: ASIA-AFRIKA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN

5/1985: PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

6/1985: PENGALAKAN EKSPOR DAN MUNCULNYA KELAS MENENGAH

7/1985: MASALAH PEMBANGUNAN DAN KEPENDUDUKAN

8/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: POLITIK LUAR NEGERI

9/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: IDEOLOGI, POLITIK DAN EKONOMI

10/1985: KELUAR DARI KEMELUT EKONOMI

11/1985: MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN

12/1985: MEMAHAMI PERMASALAHAN ENERGI

1/1986: PETA POLITIK 1980

2/1986: MASALAH STRATEGI NUKLIR

3/1986: SWASTANISASI DAN EFISIENSI NASIONAL

4/1986: INDIA-INDONESIA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN

JILIDAN:

ANALISA 1979 Rp 9.000,00 ANALISA 1982 Rp 9.000,00

ANALISA 1980 Rp 9.000,00 ANALISA 1983 Rp 9.000,00

ANALISA 1981 Rp 9.000,00 ANALISA 1984 Rp 11.000,00

ANALISA 1985 Rp 11.000,00

Pesanan per pos tambah ongkos kirim $\pm 15\%$ (minimal Rp 200,00) ke Biro Publikasi CSIS.